



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2020**





**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)**

**KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2020**



BUPATI KARANGASEM

KATA PENGANTAR

Puja Pengastuti dan Angayu Bagya, puji dan syukur saya haturkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha-Nya*, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Karangasem Tahun 2020 telah dapat diselesaikan tepat waktu, untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Bali guna memenuhi ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LPPD Kabupaten Karangasem Tahun 2020 merupakan Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2020, sebagai bahan evaluasi dan koreksi untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta transparansi sesuai prinsip Tata Pemerintahan yang baik.


Adapun substansi dari laporan ini mencakup latar belakang, capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, dan penutup. Dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karangasem selama tahun 2020, walaupun dengan segala keterbatasan dan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan akibat mewabahnya pandemi Covid-19, secara umum roda pemerintahan berjalan dengan cukup baik.

Semoga LPPD Kabupaten Karangasem Tahun 2020 ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Pemerintah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem serta dijadikan sebagai referensi dan pijakan bagi pelaksanaan pembangunan kedepan di Kabupaten Karangasem. Hasil evaluasi baik berupa analisis, pandangan, catatan, masukan maupun saran sangat dibutuhkan untuk

memantapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di Kabupaten Karangasem pada tahun-tahun mendatang.

Om Santhi, Santhi, Santhi, Om.

Amlapura, 26 Maret 2021
Bupati Karangasem, *[Signature]*
[Signature]
Cede Dana



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	viii
Daftar Grafik	ix
Daftar Tabel.....	x
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	1
b. Data Geografis Wilayah.....	2
c. Jumlah Penduduk.....	5
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	7
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	8
f. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	13
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	16
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	17
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	18
c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Perencanaan Jangka Menengah	21
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	38
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	50
1. Pendidikan	52
2. Kesehatan	53
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	57
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	58
6. Sosial.....	59

BAB II	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	63
2.1	Capaian Kinerja Makro.....	63
1.	Indeks Pembangunan Manusia.....	63
2.	Angka Kemiskinan	64
3.	Angka Pengangguran.....	65
4.	Pertumbuhan Ekonomi	65
5.	Pendapatan Per Kapita	66
6.	Indeks Gini Rasio (Ketimpangan Pendapatan).....	67
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	69
2.2.1	Indikator Kinerja kunci Keluaran	69
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	134
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	151
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	154
a.	Target kinerja dalam perjanjian kinerja	154
b.	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja	160
c.	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya	173
d.	Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah	201
e.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai	209
f.	Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja	218
BAB III	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	228
3.1	Tugas Pembantuan dan Penugasan yang diterima	228
3.2	Tugas Pembantuan dan Penugasan yang diberikan	228

BAB IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.....	229
4.1 Urusan Pendidikan.....	229
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan.....	229
4.1.2 Target Capaian SPM serta Realisasi Urusan Pendidikan	230
4.1.3 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan.....	238
4.1.4 Dukungan Personil Urusan Pendidikan.....	239
4.1.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan	239
4.2 Urusan Kesehatan	241
4.2.1 Jenis Layanan Dasar Urusan Kesehatan.....	241
4.2.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Kesehatan	241
4.2.3 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan.....	243
4.2.4 Dukungan Personil Urusan Kesehatan.....	245
4.2.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan	246
4.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	247
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum.....	247
4.3.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum	247
4.3.3 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum.....	248
4.3.4 Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum.....	248
4.3.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum	249
4.4 Urusan Perumahan Rakyat	250
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat.....	250
4.4.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat	251
4.4.3 Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat.....	251
4.4.4 Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat.....	252
4.4.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat	252
4.5 Urusan Ketentraman, Ketertinan Umum dan Perlindungan Masyarakat	253
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar urusan Trantibumlinmas.....	253
4.5.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM urusan Trantibumlinmas	254
4.5.3 Alokasi Anggaran urusan Trantibumlinmas.....	257
4.5.4 Dukungan Personil urusan Trantibumlinmas.....	260
4.5.5 Permasalahan dan Solusi urusan Trantibumlinmas	261

4.6	Urusan Sosial	264
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial	264
4.6.2	Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial.....	265
4.6.3	Alokasi Anggaran Urusan Sosial	266
4.6.4	Dukungan Personil Urusan Sosial	267
4.6.5	Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial.....	267
4.7	Program dan Kegiatan	268
4.7.1	Bidang Urusan Pendidikan	268
4.7.2	Bidang Urusan Kesehatan	273
4.7.3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	275
4.7.4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	276
4.7.5	Bidang Urusan Trantibumlinmas.....	278
4.7.6	Bidang Urusan Sosial.....	287
BAB V	Penutup	289

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Karangasem Per Kecamatan.....	4
------------	---	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Peningkatan Jumlah Penduduk Kab. Karangasem Tahun 2016-2020.....	6
Grafik 2.1	IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020.....	64
Grafik 2.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020	65
Grafik 2.3	Indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2018	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2020	2
Tabel 1.2	Perkembangan Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020	5
Tabel 1.3	Persebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2020	7
Tabel 1.4	Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat/Banjar Dinas dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2020	7
Tabel 1.5	Perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem	8
Tabel 1.6	Rekapitulasi Jumlah PNS Kabupaten Karangasem Tahun 2020	10
Tabel 1.7	Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020	13
Tabel 1.8	Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020	14
Tabel 1.9	Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020	16
Tabel 1.10	Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021	23
Tabel 2.1	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020	64
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karangasem	66
Tabel 2.3	Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	67
Tabel 2.4	Rekapan Capaian Kinerja Makro	68
Tabel 2.5	Target Kinerja dalam perjanjian kinerja	154
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Tujuan 1, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.....	160
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Tujuan 2, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).....	161
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Tujuan 3, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas.....	161
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Tujuan 4, Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.....	162
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Tujuan 5, Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	163
Tabel 2.11	Capaian Kinerja Tujuan 6, Meningkatkan upaya	

	penanggulangan kemiskinan.....	164
Tabel 2.12	Capaian Kinerja Tujuan 7, Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.....	165
Tabel 2.13	Capaian Kinerja Tujuan 8, Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.....	166
Tabel 2.14	Capaian Kinerja Tujuan 9, Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.....	167
Tabel 2.15	Capaian Kinerja Tujuan 10, Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan	167
Tabel 2.16	Capaian Kinerja Tujuan 11, Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.....	168
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Tujuan 12, Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat	168
Tabel 2.18	Capaian Kinerja Tujuan 13, Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan	169
Tabel 2.19	Capaian Kinerja Tujuan 14, Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur	169
Tabel 2.20	Capaian Kinerja Tujuan 15, Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.....	170
Tabel 2.21	Capaian Kinerja Tujuan 16, Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.....	170
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Tujuan 17, Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.....	171
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Tujuan 18, Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat	172
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Tujuan 19, Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi	173
Tabel 2.25	Target tercapainya Visi Misi Kabupaten Karangasem Tahun 2020	173
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Tujuan 1, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.....	183
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Tujuan 2, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).....	184
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Tujuan 3, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas.....	185
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Tujuan 4, Meningkatnya peran pelayanan	

	aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.....	186
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Tujuan 5, Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	188
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Tujuan 6, Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.....	189
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Tujuan 7, Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.....	190
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Tujuan 8, Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.....	191
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Tujuan 9, Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.....	192
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Tujuan 10, Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan	193
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Tujuan 11, Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.....	193
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Tujuan 12, Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat	194
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Tujuan 13, Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan	195
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Tujuan 14, Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur	195
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Tujuan 15, Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.....	196
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Tujuan 16, Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.....	196
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Tujuan 17, Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.....	197
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Tujuan 18, Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat	198
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Tujuan 19, Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi	199
Tabel 2.45	Rata-Rata Capaian dan Kategori Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2020	200
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Tujuan 1, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.....	201

Tabel 2.47	Capaian Kinerja Tujuan 2, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).....	202
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Tujuan 3, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas.....	202
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Tujuan 4, Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.....	202
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Tujuan 5, Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	203
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Tujuan 6, Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.....	203
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Tujuan 7, Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.....	204
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Tujuan 8, Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.....	204
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Tujuan 9, Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.....	205
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Tujuan 10, Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan	205
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Tujuan 11, Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.....	205
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Tujuan 12, Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat	206
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Tujuan 13, Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan	206
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Tujuan 14, Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur	206
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Tujuan 15, Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.....	207
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Tujuan 16, Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.....	207
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Tujuan 17, Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat	207
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Tujuan 18, Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat	208
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Tujuan 19, Terwujudnya peningkatan Wawasan	

	Kebangsaan dan pemahaman demokrasi	208
Tabel 2.65	Tingkat Efisiensi Tujuan 1, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.....	209
Tabel 2.66	Tingkat Efisiensi Tujuan 2, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).....	209
Tabel 2.67	Tingkat Efisiensi Tujuan 3, Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas.....	210
Tabel 2.68	Tingkat Efisiensi Tujuan 4, Meningkatkan peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.....	211
Tabel 2.69	Tingkat Efisiensi Tujuan 5, Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	212
Tabel 2.70	Tingkat Efisiensi Tujuan 6, Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.....	212
Tabel 2.71	Tingkat Efisiensi Tujuan 7, Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.....	213
Tabel 2.72	Tingkat Efisiensi Tujuan 8, Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.....	213
Tabel 2.73	Tingkat Efisiensi Tujuan 9, Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.....	214
Tabel 2.74	Tingkat Efisiensi Tujuan 10, Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan	214
Tabel 2.75	Tingkat Efisiensi Tujuan 11, Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.....	214
Tabel 2.76	Tingkat Efisiensi Tujuan 12, Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat	215
Tabel 2.77	Tingkat Efisiensi Tujuan 13, Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan	215
Tabel 2.78	Tingkat Efisiensi Tujuan 14, Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur	215
Tabel 2.79	Tingkat Efisiensi Tujuan 15, Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.....	216
Tabel 2.80	Tingkat Efisiensi Tujuan 16, Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.....	216
Tabel 2.81	Tingkat Efisiensi Tujuan 17, Meningkatnya kualitas kehidupan	

	sosial dan kesejahteraan masyarakat.....	216
Tabel 2.82	Tingkat Efisiensi Tujuan 18, Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat	217
Tabel 2.83	Tingkat Efisiensi Tujuan 19, Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi	218
Tabel 2.84	Program yang mendukung capaian Kinerja	218
Tabel 4.1	Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Karangasem Tahun 2020	230
Tabel 4.2	Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Karangasem	238
Tabel 4.3	Target dan Realisasi SPM bidang kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2020	241
Tabel 4.4	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020	243
Tabel 4.5	Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan ...	245
Tabel 4.6	Target dan Capaian SPM Dinas PUPR Kabupaten Karangasem ...	247
Tabel 4.7	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang PU tahun 2020	248
Tabel 4.8	Target dan Realisasi Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020	251
Tabel 4.9	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat	251
Tabel 4.10	Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai DPKP Kab. Karangasem.....	252
Tabel 4.11	Target dan Realisasi SPM Satpol PP Karangasem Tahun 2020	254
Tabel 4.12	Target dan Realisasi SPM BPBD Kab. Karangasem Tahun 2020....	255
Tabel 4.13	Target dan Realisasi SPM Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Karangasem Tahun 2020	257
Tabel 4.14	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Satpol PP Kabupaten Karangasem Tahun 2020	257
Tabel 4.15	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM BPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020	258
Tabel 4.16	Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun 2020	260
Tabel 4.17	Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2020	265
Tabel 4.18	Alokasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020	266
Tabel 4.19	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020	269
Tabel 4.20	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020	273
Tabel 4.21	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020	275
Tabel 4.22	Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Dinas Pemadam	

	Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020.....	287
Tabel 4.23	Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020	287



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Dalam perjalanan sejarahnya asal mula terbentuknya Kabupaten Karangasem sebagai daerah Otonom diawali saat terbentuknya Negara Indonesia Timur dimana muncul daerah-daerah yang dikenal dengan istilah Swapraja. Salah satunya adalah “Daerah Swapraja Karangasem” yang merupakan bagian dari “Daerah Bali” sesuai dengan Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur (Staatsblad 1946 No. 143).

Seiring dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia sejak tanggal 18 Januari 1957 maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 9 Agustus 1958 ((Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)). Dalam substansi undang-undang ini keberadaan daerah Swapraja Karangasem secara resmi dibubarkan dengan pembentukan daerah-daerah tingkat II, termasuk dalam Daerah tingkat I Bali, dengan diberi nama-nama :

1. Daerah Tingkat II Buleleng;
2. Daerah Tingkat II Jembrana;
3. Daerah Tingkat II Badung;
4. Daerah Tingkat II Tabanan;
5. Daerah Tingkat II Gianyar;
6. Daerah Tingkat II Klungkung;
7. Daerah Tingkat II Bangli.
8. Daerah Tingkat II Karangasem.

Dalam bagian selanjutnya dijelaskan bahwa tempat kedudukan (ibu kota) pemerintah daerah-daerah tersebut untuk daerah tingkat II Karangasem berkedudukan di Karangasem. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 merupakan dasar pembentukan Kabupaten Karangasem yang menjadi dasar hukum keberadaan daerah otonom dimana sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah, kini Daerah Tingkat II Karangasem dikenal dengan Kabupaten Karangasem, sehingga dalam setiap produk hukum baik peraturan daerah maupun peraturan bupati, selalu merferensi Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagai dasar pembentukan Kabupaten Karangasem.

b. Data Geografis Wilayah

Luas wilayah Kabupaten Karangasem mencapai 839,54 km² atau 83.954 Ha (14,90% luas Pulau Bali) dan merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana. Kabupaten Karangasem memiliki 8 (delapan) Kecamatan, Dari delapan kecamatan tersebut, Kecamatan Kubu merupakan wilayah paling luas yaitu mencapai 234,72 Km². Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Hektar (Ha)	Persentase (%)
1	Rendang	109,7	10.970	13,07
2	Sidemen	31,15	3.515	4,79
3	Manggis	69,83	6.983	8,32
4	Karangasem	94,23	9.423	11,22
5	Abang	134,05	13.405	15,97
6	Bebandem	81,51	8.151	9,71
7	Selat	80,36	8.035	9,57
8	Kubu	234,72	23.472	27,95
	Jumlah	839,54	83.954	100,00

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2020

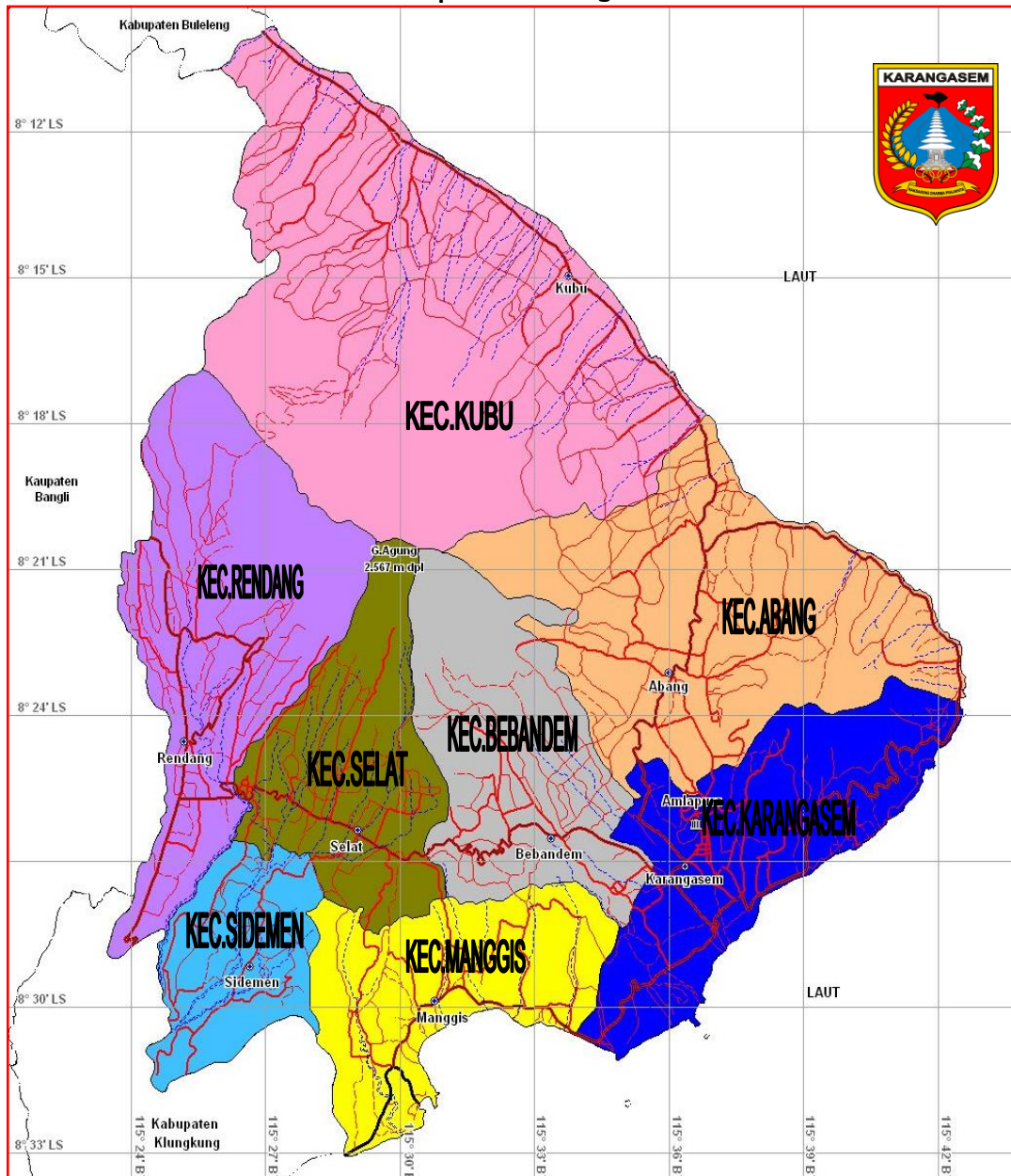
Kabupaten Karangasem merupakan satu dari sembilan kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Secara astronomis, Kabupaten Karangasem yang dikenal dengan Kabupaten “Lahar” (akibat letusan Gunung Agung) berada pada posisi $8^{\circ} 00' 00''$ - $8^{\circ} 41' 37,8''$ Lintang Selatan, dan $115^{\circ} 35' 9,8''$ - $115^{\circ} 54' 8,9''$ Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Bali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Klungkung, Bangli, dan Buleleng; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Lombok.

Lokasi Kabupaten Karangasem yang berada pada ujung Timur Pulau Bali menjadikan daerah ini menjadi salah satu akses transportasi barang yang utama antara Pulau Bali dan Pulau Lombok dengan keberadaan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten ini.

Secara administrasi kewilayahan, kabupaten dengan luas wilayah mencapai $839,54 \text{ km}^2$ terbagi kedalam 8 kecamatan, 3 kelurahan dan 75 desa. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar merupakan lahan kering dengan luas mencapai $768,14 \text{ km}^2$ (91,50%), sementara lahan basah berupa persawahan hanya seluas $71,4 \text{ km}^2$ (8,50%).

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Karangasem Per Kecamatan



Sumber : Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Karangasem 2020

Dari sisi topografis, daratan Kabupaten Karangasem umumnya berupa perbukitan dimana 43,5 % wilayahnya memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Bentangan pantai yang dimiliki kabupaten ini cukup panjang, yang mencapai 87 kilometer karena wilayah Karangasem memang dikelilingi dengan lautan dari sisi Utara, Timur dan Selatan.

c. Jumlah Penduduk

Dari segi demografis, Kabupaten Karangasem memiliki potensi penduduk yang strategis dengan jumlah yang selalu meningkat tiap tahunnya. Sisi positif dari pertumbuhan penduduk adalah tersedianya tenaga kerja potensial bagi peningkatan produktivitas karangasem, sementara dari sisi negatif pertumbuhan penduduk juga dapat menjadi beban apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan produksi pangan yang cukup.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, pertumbuhan penduduk Kabupaten Karangasem dalam periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dengan penurunan hingga hanya mencapai 12,16 % di tahun 2018 atau menurun sejumlah 62.123 jiwa, ini diakibatkan adanya pendataan dan pemuktahiran data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem. Jumlah sampai dengan akhir tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Karangasem yakni sejumlah 519.998 orang.

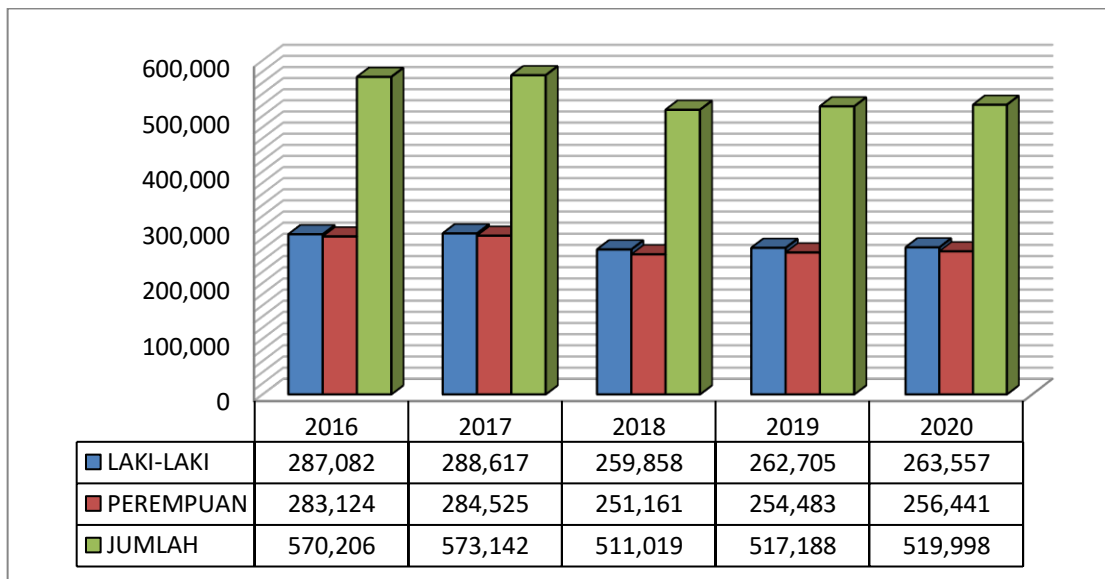
Tabel 1.2
Perkembangan Penduduk Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	BERTAMBAH/BERKURANG	%
2016	287.082	283.124	570.206	2.170	0,38
2017	288.617	284.525	573.142	2.936	0,51
2018	259.858	251.161	511.019	-62.123	- 12,16
2019	262.705	254.483	517.188	6.169	1,19
2020	263.557	256.441	519.998	2.810	0,54

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem (2020)

Grafik 1.1

Peningkatan Jumlah Penduduk Kab. Karangasem Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem 2020

Persebaran penduduk tersebut per kecamatan juga masih menunjukkan adanya persebaran yang kurang merata dengan tingkat kepadatan penduduk terendah sejumlah 370 jiwa per kilometer persegi di Kecamatan Kubu, sementara kepadatan tertinggi berada di kecamatan Sidemen dengan tingkat kepadatan mencapai 1.115 Jiwa per kilometer persegi dari luas wilayah 35,15 Km² . Rendahnya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Rendang dan Kubu disebabkan oleh kondisi topografi kedua kecamatan tersebut yang sebagian besar berupa bukit dan gunung serta lahan kering. Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Karangasem sejumlah 1101 Jiwa per kilometer persegi. Kurang meratanya persebaran penduduk ini juga membawa permasalahan adanya permukiman kumuh, terutama di kantong-kantong permukiman yang padat.

Tabel 1.3
Persebaran Penduduk per Kecamatan Tahun 2020

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		TOTAL	LUAS WILAYAH	KEPADATAN PER KM2
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	ABANG	43.875	42.363	86.238	134,05	643
2	BEBANDEM	29.197	28.550	57.747	81,51	708
3	KARANGASEM	52.430	51.304	103.733	94,23	1101
4	KUBU	44.527	42.236	86.764	234,72	370
5	MANGGIS	28.823	28.417	57.240	69,83	820
6	RENDANG	21.763	21.133	42.896	109,7	391
7	SELAT	23.213	22.991	46.204	80,35	575
8	SIDEMEN	19.729	19.447	39.176	35,15	1115
TOTAL		263.557	256.441	519.998	840	5723
Rata-rata Total						715

Sumber : diolah dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Karangasem (2020)

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Kabupaten Karangasem terdiri dari 8 kecamatan yaitu Kecamatan Rendang, Kecamatan Sidemen, Kecamatan Manggis, Kecamatan Karangasem, Kecamatan Abang, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Kubu. Di Kabupaten Karangasem terdapat 78 Desa/Kelurahan yang terdiri dari 75 Desa Definitif, dan 3 Kelurahan, sedangkan desa adat terdapat sebanyak 190 desa adat yang meliputi 714 banjar adat. Banjar dinas sebanyak 539 banjar dinas/dusun, dan 52 lingkungan. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Desa/Kelurahan, Desa Adat, Banjar Adat/Banjar Dinas dan Lingkungan di Kabupaten Karangasem Menurut Kecamatan, Tahun 2020

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa Adat	Banjar Adat	Banjar Dinas	Lingkungan
1	Rendang	6	-	26	62	62	-
2	Sidemen	10	-	19	70	51	-
3	Manggis	12	-	20	80	59	-
4	Karangasem	8	3	23	172	72	52
5	Abang	14	-	20	96	96	-
6	Bebandem	8	-	15	67	70	-

7	Selat	8	-	27	92	66	-
8	Kubu	9	-	41	75	71	-
Jumlah		75	3	190	714	547	52

Sumber : SIPD Kabupaten Karangasem, 2020

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 40 (empat puluh) Organisasi Perangkat Daerah yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.5

Perangkat Daerah di Kabupaten Karangasem

No	Nama Perangkat Daerah	Sub Bagian Dari Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah Kab. Karangasem	- Bagian Administrasi Pemerintahan - Bagian Hukum dan HAM - Bagian Humas Protokol - Bagian Ekonomi - Bagian Kesejahteraan Rakyat - Bagian Pengendalian Pembangunan - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa - Bagian Perlengkapan - Bagian Organisasi - Bagian Umum	
2.	Sekretariat DPRD Kab. Karangasem		
3.	Inspektorat Daerah Kab. Karangasem		
	DINAS DAERAH KAB. KARANGASEM		
4.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karangasem		
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karangasem		
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karangasem		
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karangasem		
8.	Kepala Dinas Pertanian Kab. Karangasem		
9.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karangasem		
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karangasem		
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kab.		

	Karangasem		
12.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem		
13.	Kepala Dinas Sosial Kab. Karangasem		
14.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Karangasem		
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karangasem		
16.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karangasem		
17.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Karangasem		
18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem		
19.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Karangasem		
20.	Kepala Dinas Kebudayaan Kab. Karangasem		
21.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Karangasem		
22.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Karangasem		
23.	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Karangasem		
24.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Karangasem		
25.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Karangasem		
26.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Karangasem		
27.	Kepala Dinas Perikanan Kab. Karangasem		
	BADAN DAERAH		
28.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Karangasem		
29.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karangasem		
30.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Karangasem		
	KECAMATAN		
31.	Kecamatan Karangasem		
32.	Kecamatan Kubu		
33.	Kecamatan Abang		
34.	Kecamatan Bebandem		
35.	Kecamatan Selat		
36.	Kecamatan Manggis		
37.	Kecamatan Rendang		
38.	Kecamatan Sidemen		
	PEMERINTAHAN UMUM		

39.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Karangasem		
	PENANGGULANGAN BENCANA		
40.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Karangasem		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karangasem, Tahun 2020

Dalam menjalankan pemerintahannya, tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Karangasem didukung oleh 6.137 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4.596 Pegawai Non ASN/ Kontrak yang tersebar pada berbagai instansi. Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat PNS di Kabupaten Karangasem pada jenjang SD sebanyak 56 orang, jenjang SMP sebanyak 133 orang, jenjang Pendidikan SMA sebanyak 613, jenjang pendidikan SMK sebanyak 339 orang, jenjang pendidikan Diploma sebanyak 656, Jenjang pendidikan Sarjana sebanyak 3928 orang, dan jenjang pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 412 orang. Jika dilihat berdasarkan Jenis Kelamin maka dapat dilihat PNS di Kabupaten Karangasem berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3497 orang, sedangkan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2640 orang. Selengkapnya disajikan pada Tabel Rekapitulasi berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 berikut.

Tabel 1.6
Rekapitulasi Jumlah PNS Kabupaten Karangasem Tahun 2020

NO	INSTANSI	JENJANG PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN		JUMLAH
		SD	SMP	SMA	SMK	DIPLOMA	S1	S2	PRIA	WANITA	
1	Sekretariat Daerah	0	0	0	0	0	1	3	4	0	4
2	Bagian Kesra	0	0	1	1	0	5	1	6	2	8
3	Bagian Administrasi Pemerintahan	0	0	5	0	0	2	3	4	6	10
4	Bagian Hukum dan HAM	0	0	3	0	0	6	1	8	2	10
5	Bagian Pengendalian Pembangunan	0	1	1	1	0	2	1	4	2	6
6	Bagian Ekonomi	0	0	3	1	0	2	2	3	5	8
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	0	0	4	0	0	6	1	7	4	11
8	Bagian Perlengkapan	1	5	4	1	0	10	0	15	6	21

NO	INSTANSI	JENJANG PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN		JUMLAH
		\$D	\$MP	\$MA	\$MK	DIPLOMA	\$1	\$2	PRIA	WANITA	
9	Bagian Organisasi	0	0	3	0	0	4	2	3	6	9
10	Bagian Humas Protokol	0	0	1	0	0	8	1	5	5	10
11	Bagian Umum	1	2	5	0	1	16	1	13	13	26
12	Sekretariat DPRD	1	0	8	1	1	16	9	20	16	36
13	Inspektorat Daerah	0	2	8	1	0	20	9	29	11	40
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0	4	35	3	1	36	16	67	28	95
15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0	2	12	3	0	19	4	24	16	40
16	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	1	3	3	0	15	8	21	9	30
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	6	2	0	3	3	13	2	15
18	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	1	4	4	2	0	16	2	19	10	29
19	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	53	9	0	26	5	91	4	95
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	1	7	2	1	16	7	24	11	35
21	Dinas Pertanian	3	4	8	8	1	66	9	76	23	99
22	Dinas Perikanan	1	5	12	2	0	11	6	32	5	37
23	Dinas Pariwisata	0	0	4	1	0	8	3	10	6	16
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	0	4	1	0	10	5	14	7	21
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	0	3	1	2	10	7	11	12	23
26	Dinas Kebudayaan	0	3	8	2	0	13	3	21	8	29
27	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2	2	3	2	0	15	1	15	10	25
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	4	2	1	14	4	18	8	26

NO	INSTANSI	JENJANG PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN		JUMLAH
		\$D	\$MP	\$MA	\$MK	DIPLOMA	\$1	\$2	PRIA	WANITA	
29	Dinas Perhubungan	0	3	13	1	2	13	2	31	3	34
30	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	3	11	0	0	11	5	22	9	31
31	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	0	3	1	0	15	3	12	12	24
32	Dinas Lingkungan Hidup	2	6	4	1	3	16	2	28	6	34
33	Dinas Ketahanan Pangan	1	2	2	1	0	7	3	9	7	16
34	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0	2	5	1	2	5	3	13	5	18
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	2	2	0	0	12	0	9	7	16
36	Dinas Pemadam Kebakaran	0	0	9	0	0	6	5	14	6	20
37	Dinas Ketenagakerjaan	2	0	3	4	9	16	7	32	9	41
38	Dinas Sosial	2	3	4	1	0	11	3	16	8	24
39	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	1	4	0	0	7	5	15	7	22
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	10	39	20	0	29	14	104	18	122
41	Dinas Kesehatan	3	15	87	106	424	228	49	345	567	912
42	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	11	28	139	127	204	3085	181	2070	1705	3775
43	KeKecamatan Abang	1	3	17	0	1	5	1	22	6	28
44	KeKecamatan Bebandem	0	4	6	3	0	9	1	19	4	23
45	KeKecamatan Karangasem	0	2	7	3	0	9	2	20	3	23
46	KeKecamatan Kubu	1	3	7	1	1	6	3	21	1	22
47	KeKecamatan Manggis	0	1	9	1	2	10	1	21	3	24
48	KeKecamatan Rendang	0	3	10	6	0	17	1	31	6	37
49	KeKecamatan Selat	1	0	8	5	0	10	2	22	4	26
50	KeKecamatan Sidemen	0	0	6	8	0	10	1	22	3	25

NO	INSTANSI	JENJANG PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN		JUMLAH	
		\$D	\$MP	\$MA	\$MK	DIPLOMA	\$1	\$2	PRIA		WANITA
51	Kelurahan Karangasem	1	0	3	0	0	4	0	8	0	8
52	Kelurahan Padangkerta	0	1	1	0	0	5	1	6	2	8
53	Kelurahan Subagan	0	2	2	0	0	6	0	8	2	10
	JUMLAH TOTAL	56	133	613	339	656	3928	412	3497	2640	6137

Sumber : BKPSDM Kab. Karangasem Tahun 2020

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Belaja Daerah

- Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 1.455.141.988.165,53 dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.510.576.917.062,23 atau 96,33% dari yang ditargetkan. Secara rinci, realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.7

Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	Pendapatan Asli Daerah	207.905.009.114,20	216.682.876.355,05	104,22%
1	Hasil Pajak Daerah	60.391.998.711,00	66.452.673.379,75	110,04%
2	Hasil Retribusi Daerah	8.580.762.000,00	9.301.444.071,00	108,40%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.968.117.309,66	11.968.117.309,66	100,00%
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	126.964.131.093,54	128.960.641.594,64	101,57%
II.	Dana Perimbangan	946.516.771.974,00	918.022.076.402,00	96,99%
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.597.564.974,00	22.582.034.404,00	81,83%
2	Dana Alokasi Umum	716.253.373.000,00	713.291.169.000,00	99,59%
3	Dana Alokasi Khusus	202.665.834.000,00	182.148.872.998,00	89,88%
III.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	356.155.135.974,03	320.437.035.408,48	89,97%
1	Pendapatan Hibah	68.365.798.978,65	69.924.120.999,00	102,28%
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan	131.531.146.245,38	5.911.697.367,89	72,92%

	Pemerintah Daerah Lainnya			
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.250.487.000,00	39.250.487.000,00	100,00%
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	35.204.047.750,00	33.547.042.455,00	95,29%
5	Pendapatan Lainnya	81.803.656.000,00	81.803.687.586,59	100,00%
	JUMLAH =	1.510.576.917.062,23	1.455.141.988.165,53	96,33%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

Tabel diatas menyajikan bahwasannya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu melampaui target yang disesuaikan dalam Perubahan APBD, yaitu terealisasi sebesar Rp.216.682.876.355,05 dari yang ditargetkan sebesar Rp.207.905.009.114,20 atau 104,22%. Sedangkan Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah masing-masing terealisasi lebih kecil dari yang ditargetkan (kurang dari 100%).

- Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja Daerah setelah sembilan kali mengalami penyesuaian melalui Perubahan Penjabaran APBD, target dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.8
Realisasi Belanja APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Jenis Belanja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	Belanja Tidak Langsung	1.030.322.509.335,80	941.915.043.047,48	91,42%
1	Belanja Pegawai	706.131.471.727,80	667.752.396.767,97	94,56%
2	Belanja Bunga	100.000.000,00	2.785.820,91	2,79%
3	Belanja Hibah	65.853.888.978,65	65.381.481.651,72	99,28%
4	Belanja Bantuan Sosial	1.750.000.000,00	1.042.261.000,00	59,56%
5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.558.235.078,48	11.558.024.859,79	100%

6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	178.574.948.000,00	176.547.740.848,00	98,86%
7	Belanja Tak Terduga	66.353.965.550,87	19.630.352.099,09	29,58%
II.	Belanja Langsung	583.078.720.080,96	490.119.080.585,11	84,06%
1	Belanja Pegawai	71.429.041.662,00	64.949.430.400,00	90,93%
2	Belanja Barang dan Jasa	415.825.587.461,73	352.725.567.410,55	84,83%
3	Belanja Modal	95.824.090.957,23	72.444.082.774,56	75,60%
	JUMLAH =	1.613.401.229.416,76	1.432.034.123.632,59	88,76%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

Dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp.1.613.401.229.416,76 terealisasi sebesar Rp.1.432.034.123.632,59 atau 88,76%. Secara lebih rinci, realisasi belanja daerah yang realisasinya sangat rendah diantaranya dari jenis Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Bunga terealisasi 59,56% dan Belanja Tak Terduga terealisasi 29,58%. Sedangkan pada jenis Belanja Langsung yang terealisasi sangat rendah adalah Belanja Modal terealisasi 75,60%.

- Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah direncanakan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.102.969.312.354,53 dan terealisasi sebesar Rp.102.972.554.540,53 atau 100,00% lebih, yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) Tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.102.969.340.904,53 dan terdapat realisasi penerimaan pada pos Penerimaan Piutang Daerah sebesar Rp.3.213.636,00.

Tabel 1.9
Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Jenis Pembiayaan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
I.	Penerimaan Pembiayaan	102.969.312.354,53	102.972.554.540,53	100,00%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	102.969.312.354,53	102.969.340.904,53	100,00%
2	Penerimaan Piutang Daerah	-	3.213.636,00	-
II.	Pengeluaran Pembiayaan	145.000.000,00	65.436.458,22	45,13%
1	Pembayaran Pokok Utang	145.000.000,00	65.436.458,22	45,13%
	Pembiayaan netto =	102.824.312.354,53	102.907.118.082,31	100,08%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bulan Desember 2020

Sedangkan dari sisi pengeluaran Pembiayaan direncanakan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp.145.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.65.436.458,22 atau 45,13%.

Dari ringkasan total Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah maka dapat diketahui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran berkenaan adalah sebesar Rp.126.014.982.615,25.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

a. Permasalahan Strategi Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi, serta adanya permasalahan akibat perubahan kebijakan pemerintah atau belum optimalnya pelaksanaan kebijakan di daerah. Permasalahan pembangunan Kabupaten Karangasem diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global. Adapun permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Karangasem dan menjadi prioritas pembangunan yang harus mendapatkan penanganan, secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Karangasem
2. Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dilihat dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia yang diakibatkan oleh rendahnya komponen capaian angka harapan hidup dan Rendahnya capaian angka rata-rata lama sekolah.
3. Rendahnya Daya Saing Ekonomi dilihat dari rendahnya rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem sebagai dampak belum optimalnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan belum optimalnya pemanfaatan berbagai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, seperti jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang mampu memberikan pertumbuhan tertinggi namun belum merupakan sumber utama pertumbuhan.

4. Masih tingginya Kesenjangan Wilayah dan Rendahnya Daya Saing Infrastruktur
5. Tingginya Resiko Bencana khususnya terkait bencana erupsi Gunung Agung, tanah longsor, banjir.
6. Belum optimalnya Tata kelola pemerintahan

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi Kepala Daerah

VISI :

" KARANGASEM CERDAS, BERSIH DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN TRI HITA KARANA "

Adapun penjabaran makna dari Visi tersebut adalah: Cerdas mengandung makna terwujudnya masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, emosional dan spiritual yang seimbang. Bersih mengandung makna terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari KKN. Bermartabat mengandung makna terwujudnya Karangasem yang Bangkit, Berwibawa dan memiliki Daya Saing.

Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, sesuai dengan Visi RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025, Yaitu: ***Terwujudnya Masyarakat Karangasem yang Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Budaya Bali.*** Secara rinci Visi Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, sesuai dengan Misi Pembangunan Daerah jangka panjang sebagaimana dituangkan dalam Misi RPJPD Tahun 2006-2025.

Karangasem yang Cerdas, sesuai dengan Misi ke-7 RPJPD, yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal dan non formal, dan Misi ke-9 RPJPD, yaitu Menata sistem kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. **Karangasem yang Bersih**, sesuai dengan Misi ke-2 RPJPD, yaitu Mewujudkan otonomi daerah yang mantap, ditunjang pelaksanaan sistem Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yang efektif dan efisien, juga

sesuai dengan Misi ke-3 RPJPD yaitu Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governave dan clean government*) dan Misi ke-5 RPJPD, yaitu Mewujudkan kesadaran dan penegakan supremasi hukum dan HAM, serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban yang dinamis dan kondusif. **Karangasem yang Bermartabat**, sesuai dengan Misi ke-1 RPJPD, yaitu Meningkatkan srada dan bakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta melestarikan nilai-nilai adat budaya yang dijiwai oleh budaya Bali, dan sesuai juga dengan Misi ke-4 RPJPD, yaitu Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang handal melalui pengembangan kemitraan. **Berlandaskan Tri Hita Karana**, sesuai dengan Misi ke-6 RPJPD yaitu Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana dan sesuai dengan Misi ke-8 RPJPD, yaitu Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang, berwawasan budaya, kesehatan dan lingkungan hidup.

2. Misi Kepala Daerah

Misi :

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 **"KARANGASEM CERDAS, BERSIH DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"**, maka dirumuskan ke dalam 6 (enam) Misi sebagai berikut :

1. Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna.
2. Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap.
3. Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah.

4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan.
5. Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan.
6. Mengembangkan peri kehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial.

Keterkaitan Misi Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dengan Misi RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Misi 1, yaitu Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna, sesuai dengan Misi ke-7 RPJPD, yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal dan non formal.
2. Misi 2, yaitu Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap, sesuai dengan Misi ke-2 RPJPD, yaitu Mewujudkan otonomi daerah yang mantap, ditunjang pelaksanaan sistem Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan yang efektif dan efisien, Misi ke-3 RPJPD yaitu Mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*good governmave dan clean government*) dan Misi ke-5 RPJPD, yaitu Mewujudkan kesadaran dan penegakan supremasi hukum dan HAM, serta menciptakan ketenteraman dan ketertiban yang dinamis dan kondusif.
3. Misi 3, yaitu Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah, sesuai dengan Misi ke-9 RPJPD, yaitu Menata sistem kependudukan dan

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dan Misi ke-4 RPJPD, yaitu Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang handal melalui pengembangan kemitraan.

4. Misi 4, yaitu Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan, sesuai dengan Misi ke-8 RPJPD, yaitu Mewujudkan pembangunan yang selaras dan seimbang, berwawasan budaya, kesehatan dan lingkungan hidup.
5. Misi 5, yaitu Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan, sesuai dengan Misi ke-6 RPJPD, yaitu Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.
6. Misi 6, yaitu Mengembangkan peri kehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial, sesuai dengan Misi ke-1 RPJPD, yaitu Meningkatkan sraga dan bakti masyarakat terhadap ajaran agama, serta melestarikan nilai-nilai adat budaya yang dijiwai oleh budaya Bali.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah adalah Program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung capaian sasaran pembangunan daerah, sehingga Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 VI – 62 menjadi program yang diprioritaskan untuk dilaksanakan tiap tahunnya. Berdasarkan hasil penjabaran Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, Program Pembangunan Daerah dijabarkan berdasarkan atas 6 Misi, 19 Tujuan dan 69 Sasaran. Berikut

secara rinci diuraikan dalam Tabel dibawah keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran program RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

Tabel 1.10
Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1. Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna			
Tujuan 1. Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.	1). Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan akses pendidikan yang berkualitas pada semua jenjang pendidikandengan memberikan perhatian lebih pada penduduk miskin.	Peningkatan pengentasan buta aksara dan wajib belajar 9 (sembilan) tahun melalui pemberdayaan dan kerja sama dengan lembaga pendidikan negeri maupun swasta.
	2). Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan SD sampai dengan SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.	Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan.	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan untuk menjamin kemudahan akses layanan pendidikan dari SD hingga SMP.
	3). Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya tingkat kelulusan SD-SMP dan SMA/SMK atau sederajat.	Meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang iptek dan seni.	Peningkatan kesetaraan masyarakat dalam memperoleh pendidikan formal dan informal jenjang usia dini, SD, dan SMP dan sederajat secara gratis.
	4). Meningkatnya prestasi murid SD dan SMP serta meningkatnya angka partisipasi sekolah.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan yang merata dan meningkatkan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan.	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dengan standar di atas rata-rata untuk menghasilkan generasi yang unggul, cerdas dan berkarakter dan membentuk generasi unggul, melalui penjarangan

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
			siswa berprestasi dari SD hingga perguruan tinggi.
	5). Meningkatnya lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Karangasem.		Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi negeri dalam rangka peningkatan SDM yang berbasis Pariwisata dan Pertanian.
Tujuan 2. Meningkatkan kualitas kualitas sumber daya manusia(SDM)	6). Meningkatnya kualitas aparatur Desa melalui bintek dan pelatihan administrasi.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia perdesaan dilaksanakan	Peningkatan kualitas Aparatur Desa melalui bintek dan pelatihan administrasi
	7). Meningkatnya kesejahteraan aparatur desa sesuai peraturan perundang-undangan.	Peningkatan kualitas SDM aparatur desa dalam pengelolaan program desa	Peningkatan kesejahteraan aparatur Desa sesuai peraturan perundang-undangan.
	8). Meningkatnya pendampingan teknis pengelolaan pembangunan bagi Desa Pekraman.	Penguatan SDM desa dalam pengelolaan keuangan daerah.	Peningkatan pendampingan teknis pengelolaan pembangunan bagi Desa Pekraman
	9). Meningkatnya pendampingan teknis pengelolaan pembangunan bagi Desa		

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3. Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas.	10). Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, murah, ramah dan paripurna.	Perluasan, jangkauan, ketersediaan, dan kemudahan layanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit kelas III secara gratis tanpa uang jaminan.
	11). Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Peningkatan jangkauan, ketersediaan, dan layanan dalam bidang kesehatan yang berkualitas.	Peningkatan derajat kesehatan yang berkualitas melalui peningkatan pengetahuan dan perilaku sehat di masyarakat
	12). Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan.	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan.	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dasar sehingga menjamin kemudahan, kelayakan akses layanan kesehatan.
Misi 2. Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap.			
Tujuan 4. Meningkatkan peran pelayanan aparatur sipil negara yang	13). Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang didukung oleh birokrasi yang bersih, transparan, efektif dan efisien.	Penerapan sistem lelang jabatan untuk eselon tertentu guna menjamin kapabilitas, kompetensi, profesional dan motivasi untuk berprestasi.

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional	14). Meningkatnya disiplin PNS.	Penerapan penghargaan dan hukuman terhadap aparatur sipil negara secara proporsional.	Peningkatan peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawadan profesional termasuk pemenuhan hak- haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	15). Meningkatnya kompetensi dan profesional PNS.	Peningkatan kapasitas, kompetensi, profesionalisme dan motivasi untuk berprestasi akan meningkatnya peran kepemimpinan dan kualitas partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur sipil negara melalui pembinaan dan pendidikan kedinasan.
	16). Meningkatnya kinerja laporan keuangan perangkat daerah.	Peningkatan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>).	Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan terhadap aparatur sipil negara untuk membangun perilaku/budaya kerja melayani, transparan, bersih, dan tidak korupsi.
	17). Meningkatnya prestasi PNS dan menurunnya jumlah penerima sanksi.	Peningkatan kualitas penegakan hukum dan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.	Penerapan penghargaan dan hukuman terhadap aparatur sipil negara secara proporsional.
	Tujuan 5. Meningkatkan kualitas sikap mental dan kultur masyarakat Karangasem Bersih dan Bermartabat.	18). Meningkatnya partisipasi Desa Pekraman dan organisasi tradisional dan kemasyarakatan dalam pengembangan budaya yang mendukung Karangasem Bersih dan Bermartabat.	Pengembangan manusia yang beretika dan beradab melalui peningkatan kualitas sikap mental dan kultur masyarakat guna mewujudkan human development (pembangunan manusia).

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
	19). Meningkatnya kompetensi lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Peningkatan peranan desa pekraman yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan yang mengikat seluruh warganya, guna menjaga kehidupan organisasi secara tertib dan tenteram dalam mewujudkan hubungan yang harmonis antar sesama warga, dengan lingkungan alam dan dengan Tuhan Yang Maha Esa.	Pemberian penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	20). Meningkatnya partisipasi para tokoh masyarakat lembaga pemerintah, lembaga adat dan kelompok lainnya yang mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat.	Pembinaan dan Pengembangan nilai-nilai agama Hindu, mengembangkan kebudayaan, memelihara dan melestarikan adat-istiadat yang hidup dan bermanfaat untuk pembangunan bangsa, mengembangkan ekonomi kerakyatan, memelihara kelestarian Kahyangan Tiga, mewujudkan pertahanan dan keamanan bersama dalam menghadapi kondisi tertentu.	Pemberian penghargaan kepada para tokoh masyarakat, lembaga pemerintah, lembaga adat dan kelompok masyarakat lainnya yang berprestasi dalam mendukung Karangasem yang Bersih dan Bermartabat.
Misi 3. Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomikerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah.			
		Tujuan 6. Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.	21). Meningkatnya pemerataan pemenuhankebutuhan pangan dan rumah layak huni bagi keluarga miskin.

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 7. Meningkatkan produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.	22). Meningkatnya ketersediaan dan ketersediaan sarana dan prasarana utilitas umum, dan panjang jalan dalam kondisi baik.	Peningkatan akses masyarakat miskin terdapat kesempatan hidup yang layak, diperlukan adanya percepatan pembangunan infrastruktur, air bersih, listrik dan transportasi.	Percepatan pembangunan pada wilayah yang kesulitan akses infrastruktur transportasi, air bersih, dan listrik
	23). Meningkatnya usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin	Peningkatan akses masyarakat miskin dapat mengembangkan potensi ekonominya sesuai dengan potensi lokal yang tersedia	Pengembangan potensi ekonomi keluarga miskin melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi setempat.
	24). Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan/pertanian (produksi sektor pertanian).	Peningkatan program pertanian dalam arti luas terdiri dari lima sub sektor, yaitu tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan	Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil produksi pertanian dalam arti luas yang berkelanjutan dan berdaya saing melalui peningkatan pemberian subsidi dan insentif.
	25). Meningkatnya sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.	Peningkatan akses petani terhadap sumber daya produksi, seperti sarana produksi pertanian permodalan, informasi, transportasi dan pasar.
	26). Meningkatnya pengembangan menghasilkan varietas baru tanaman pertanian.	Peningkatan akses petani terhadap sumber daya produksi seperti sarana produksi, permodalan, informasi, dan transportasi, dan pasar serta mengembangkan keanekaragaman hasil pertanian.	Peningkatan keanekaragaman hasil pertanian dengan mendorong kegiatan penelitian bidang pertanian untuk menghasilkan varietas baru.

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 8. Meningkatkan investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri serta perbaikan iklim perdagangan.	27). Meningkatnya angka kecukupan pangan.	Peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Karangasem.	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat (pertanian/perkebunan) untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
	28). Meningkatnya produksi perikanan.	Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil perikanan.	Peningkatan pengelolaan pesisir dan laut melalui optimalisasi komoditas andalan, unggulan dan rintisan.
	29). Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan.	Peningkatan iklim kondusif bagi investasi.	Peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika dalam rangka pengembangan potensi investasi dan kemudahan pelayanan perizinan.
	30). Meningkatnya jumlah investasi.	Peningkatan ketersediaan informasi potensi investasi, peningkatan kerjasama investasi.	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
	31). Meningkatnya industri kecil menengah dan kerajinan rumah tangga.	Peningkatan investasi didukung dengan strategi peningkatan industri kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian (agroindustri).	Peningkatan produksi industri kecil dan menengah hasil pertanian (agroindustri) yang mendukung industri pariwisata.

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 9. Meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi.	32). Meningkatnya perdagangan dalam negeri.	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana perdagangan, dan pasar tradisional.	Peningkatan pelayanan prasarana perdagangan, terutama penguatan peran sentral pasar tradisional.
	33). Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD.	Peningkatan peranan BUMD sebagai lokomotif kebangkitan ekonomi rakyat.	Peningkatan peran BUMD sebagai badan usaha milik daerah sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi rakyat.
	34). Meningkatnya daya saing pasar tradisional	Revitalisasi pasar tradisional	Peningkatan pasar tradisional untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
	35). Meningkatnya modal usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia sehingga dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan UMKM dan koperasi.	Peningkatan akses usaha kecil menengah dan koperasi terhadap permodalan, teknologi informasi dan pasar.
	36). Meningkatnya koperasi yang aktif.	Peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.	Peningkatan kapasitas kelembagaan keuangan mikro dan koperasi.

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
	37). Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.	Peningkatan kapasitas kelembagaan UMKM dan koperasi.	Peningkatan kualitas SDM lembaga keuangan mikro dan koperasi melalui pendampingan dan pelatihan.
	38). Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, dan pedagang kecil.	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah pada petani, nelayan, dan pedagang kecil.	Peningkatan penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, pedagang kecil melalui pembentukan Lembaga Penjamin.
Misi 4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan			
Tujuan 10. Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.	39). Meningkatnya daya tarik wisata yang sedang berkembang.	Pengembangan dan pemanfaatan obyek dan daya tarik wisata sesuai dengan asas otonomi daerah yang berlaku.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang sedang berkembang.
	40). Meningkatnya penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kawasan pariwisata.	Peningkatan kerjasama dalam penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata dengan pemerintah provinsi, pusat dan swasta.
	41). Meningkatnya promosi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri.	Peningkatan kerjasama dan promosi pariwisata.	Peningkatan promosi potensi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri secara efektif dan berkesinambungan.

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 11. Meningkatkan kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal	42). Meningkatnya pengembangan pariwisata spiritual.	Pengembangan pariwisata budaya yang berlandaskan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dijiwai agama Hindu	Peningkatan pengembangan pariwisata spiritual yang berbasis desa adat.
	43). Meningkatnya pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan.	Pengembangan pariwisata terutama pariwisata sepiritual yang berbasis desa adat, dan pengembangan pariwisata berwawasan pelestarian lingkungan yang berlandaskan Tri Hita Karana.	Peningkatan pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan berlandaskan <i>Tri Hita Karana</i> .
Tujuan 12. Meningkatkan pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat	44). Meningkatnya ketersediaan perencanaan tata ruang.	Peningkatan pengawasan dan penertiban terhadap implementasi rencana sebagai tindak lanjut dari penyusunan atau adanya rencana, agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.	Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	45). Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam.	Peningkatan keharmonisan tata ruang pembangunan antar sektor serta mewujudkan keterpaduan program pembangunan yang dilakukan oleh sektor-sektor terkait.	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan sumber daya alam yang berbasis tata ruang

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
	46). Meningkatnya efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi eks galian C.	Peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam khususnya galian mineral bukan logam.	Peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya khususnya eks galian mineral bukan logam
Misi 5. Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan Wilayah Berbasis Potensi Lokal perdesaan			
Tujuan 13. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah terutama kawasan perdesaan	47). Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, irigasi terutama kawasan perdesaan.	Keseimbangan pembangunan desa dan kota dengan memperkuat pemerataan pembangunan, sehingga infrastruktur di desa mendapatkan teknologi yang sesuai untuk memberdayakan daerahnya.	Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, persampahan, irigasi, telekomunikasi terutama wilayah perdesaan yang potensial.
Tujuan 14. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.	48). Meningkatnya pengelolaan persampahan.	Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, persampahan, irigasi, dan telekomunikasi bagi wilayah perdesaan yang potensial.	Peningkatan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, persampahan, irigasi, dan telekomunikasi terutama wilayah perdesaan yang potensial.
	49). Meningkatnya kualitas ruas jalan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif.	Peningkatan akses penyediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan input produksi lainnya, sehingga mendorong terjadinya peningkatan produktivitas, serta mempercepat pertumbuhan nasional	Peningkatan kualitas jalan bagi ruas-ruas jalan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 15. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	50). Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan.	Peningkatan pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor desa
	51). Meningkatnya kualitas trotoar, penerangan jalan dan taman bermain	Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa	Peningkatan kualitas trotoar, penerangan jalan, taman bermain dan olahraga.
Misi 6. Mengembangkan perikehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial.			
Tujuan 16. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.	52).Meningkatnya bantuan keuangan kepada lembaga agamadan adat.	Peningkatan kualitas pelayanan kehidupanberagama melalui pendidikan agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunanumat beragama, yang mendukung peningkatan saling percaya, saling menghormati, dan harmonisasi antar kelompok masyarakat	Peningkatan bantuan keuangan kepadalembaga agama dan adat
	53). Meningkatnya kualitas dan peranan lembaga agama dan adat melalui pembinaan dan penyuluhan.	Peningkatan kapasitas lembaga pesraman di pembinaan dan penyuluhan masing-masing desa adat.	Peningkatan kualitas dan peranan lembagaagama dan adat melalui pembinaan dan penyuluhan.
	54). Meningkatnya koordinasi serta peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam mewujudkan Karangasem yang Bermartabat.	Pembinaan kerukunan intern dan antarumat beragama, agenda menciptakanKarangasem yang aman dan damai	Peningkatan koordinasi serta peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam mewujudkan Karangasem yang Bermartabat.

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
	55). Meningkatnya kapasitas lembaga pesraman di masing-masing Desa Pekraman	Peningkatan bantuan keuangan kepada lembaga lembaga agama dan adat	Peningkatan kapasitas lembaga pesraman dimasing-masing desa pekraman
	56). Meningkatnya sarana dan prasarana tempat ibadah.	Peningkatan kehidupan ritual keagamaan dan pemahaman keagamaan di kalangan umat beragama	Peningkatan sarana dan prasarana tempat ibadah.
	57). Meningkatnya sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan	Peningkatan kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni	Peningkatan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan
Tujuan 17. Meningkatkan kualitas kehidupansosial dan kesejahteraan masyarakat.	58). Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia.	Peningkatan kesejahteraan sosial warga Karangasem yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan, akibatnya tidak mampu mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar serta tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Keluarga Berencana, pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan kesejahteraan terutama kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia
	59). Meningkatnya kualitas layanan terhadap kaum perempuan.	Mewujudkan kesetaraan gender	Peningkatan kualitas layanan terhadap kaum perempuan melalui program peningkatan kualitas keterampilan dan kompetensi perempuan
	60). Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan	Peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui program pencegahan berbagai bentuk eksploitasi

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
			terhadap perempuan dan anak
	61). Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, generasi muda, kepemudaan dan keolahragaan.	Peningkatan pembinaan pemuda	Peningkatan kualitas generasi muda melalui berbagai kegiatan kreatif yang mampu meningkatkan kualitas kebangsaan, keterampilan, sikap peduli dan pengetahuan generasi muda
Tujuan 18. Meningkatkan kualitas seni dan budaya masyarakat.	62). Meningkatnya kualitas dan pengembangan seni dan budaya yang hampir punah.	Pengembangan dan pembinaan kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya daerah yang mengandung nilai-nilai universal terutama seni dan budaya yang hampir punah	Peningkatan kualitas dan pengembangan seni dan budaya yang hampir punah.
	63). Meningkatnya perlindungan aset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.	Perlindungan terhadap aset pusaka dan kearifan lokal masyarakat dan mengembangkan sikap kritis terhadap nilai- nilai budaya dari luar dalam rangka memilah-milah nilai budaya yang positif dan serasi melalui peningkatan kreativitas atraksi seni dan budaya	Peningkatan perlindungan aset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada di masyarakat
	64). Meningkatnya kreativitas dan atraksi seni dan budaya.	Pengembangan dan pemberdayaan kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pekraman untuk berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika	Peningkatan kreativitas masyarakat melalui kegiatan atraksi seni dan budaya

Misi/Tujuan	Sasaran RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
		dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya dalam rangka mendukung Pesta Kesenian Bali	
	65). Meningkatnya seni budaya berbasis Desa Pekraman dalam rangka mendukung PKB.	Peningkatan pelestarian apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan pemberdayaan sentra-sentra kesenian.	Peningkatan pemberdayaan kelompok- kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman dalam rangka mendukung Pesta Kesenian Bali
	66). Meningkatnya penghargaan terhadap para seniman, budayawan dan penggiat seni lainnya	Perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya	Peningkatan layanan dan penghargaan terhadap para seniman, budayawan dan penggiat seni lainnya
Tujuan 19. Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi.	67). Meningkatnya wawasan kebangsaan dan demokrasi.	Peningkatan semangat kebangsaan, mendorong terwujudnya hidup yang harmonis, menjaga keutuhan bangsa serta mendorong tumbuhnya demokrasi, saling menghargai adanya perbedaan pendapat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	Peningkatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan demokrasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat
	68). Meningkatnya advokasi dan pendidikan politik masyarakat.	Pengembangan wawasan kebangsaan, meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat dan menjaga ketertiban dan keamanan yang berbasis kearifan lokal.	Peningkatan advokasi dan pendidikan politik masyarakat.
	69). Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersama sebagai bangsa atas dasar kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum	Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2020 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Isu Strategis Nasional :

- 1) Pembangunan antar wilayah masih timpang
- 2) Pusat pertumbuhan wilayah masih belum optimal
- 3) Pelayanan dasar belum optimal
- 4) Daya saing daerah relative masih rendah
- 5) Pemanfaatan ruang dan urbanisasi kurang terkendali

2. Isu Strategis Provinsi :

1) Kebijakan

- a. Pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai sekala dan niskala dari filosofi Tri hita Karana dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal bali yang dikonsepskan dalam ajaran Sad Kerthi.
- b. Ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan kepariwisataan
- c. Pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara yang kurang memadai serta transportasi yang kurang baik

2) Regulasi

Peraturan nasional khususnya yang berkaitan dengan pendapatan negara dari sumber daya alam kurang mendukung/menguntungkan pemerintah Bali secara keseluruhan

3) Tata Kelola

- a. Kondisi fiskal sangat kecil karena tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai sumber PAD Pembangunan pada tingkat prov/ kabupaten /kota se Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri, kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi, dalam satu kesatuan wilayah Bali

3. Isu Strategis Daerah Kabupaten Karangasem :

- 1) Tingginya angka kemiskinan
- 2) Rendahnya Daya Saing Ekonomi
- 3) Rendahnya Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia
- 4) Tingginya Kesenjangan Wilayah dan Rendahnya Daya Saing Infrastruktur
- 5) Tingginya Resiko Bencana
- 6) Belum optimalnya Tata kelola pemerintahan

4. Tema RKP Tahun 2020

“Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”

5. Tema RKPD Provinsi Bali Tahun 2020

“Membangun Sumber Daya Manusia Bali Unggul Dan Industri Berbasis Budaya Branding Bali Untuk Mewujudkan Bali Yang Berdikari Dalam Bidang Ekonomi”.

6. Pencapaian sasaran tahun ke empat RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 yaitu :

“Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pelayanan Dasar, Pengembangan Infrastruktur, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Menuju Pembangunan Berkelanjutan”

Makna Tema :

Peningkatan Sumber Daya Manusia :

Dimaknai upaya untuk memantapkan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Karangasem. Dukungan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, profesional, berwawasan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta loyalitas dan mental spriritual yang kuat menjadi sangat penting untuk diprioritaskan dalam upaya menjadikan masyarakat Kabupaten Karangasem sebagai subyek pembangunan

dan bukan obyek pembangunan sehingga lebih siap dalam menghadapi tantangan global.

Pengentasan Kemiskinan :

Merupakan upaya untuk mengangkat masyarakat miskin di Kabupaten Karangasem keluar dari kemiskinan secara permanen baik dari aspek ekonomi maupun kemanusiaan.

Peningkatan Pelayanan Dasar :

Merupakan upaya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Karangasem melalui kemudahan akses terhadap pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, perumahan layak, sanitasi, keamanan dan ketertiban.

Pengembangan Infrastruktur :

Merupakan upaya untuk mempermudah akses/ kelancaran peredaran barang dan jasa untuk mendukung perekonomian masyarakat Kabupaten Karangasem.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :

Perekonomian Kabupaten Karangasem didukung oleh sektor pariwisata. Pariwisata yang handal dengan didukung ekonomi kreatif berdasarkan pada potensi keunggulan daerah akan mampu menunjang perekonomian Kabupaten Karangasem melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pengenalan produkproduk unggulan daerah.

Pembangunan Berkelanjutan :

Merupakan proses pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Karangasem dengan tetap memperhitungkan dan memperhatikan potensi saat ini dan masa depan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan

dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan penunjang urusan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karangasem yang telah tersusun diterjemahkan dalam prioritas daerah yang akan menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2020, selain itu prioritas pembangunan daerah dimaksudkan juga untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Bali maupun Nasional.

Tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Karangasem tahun 2020 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem tahun 2016-2021 sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas.

Sasaran : Terwujudnya jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan SD sampai dengan SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- 3) Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan derajat pendidikan masyarakat.
- 4) Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya tingkat kelulusan SD-SMP dan SMA/SMK atau sederajat.
- 5) Meningkatnya prestasi murid SD dan SMP serta meningkatnya angka partisipasi sekolah.
- 6) Meningkatnya lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Karangasem.

Tujuan 2 : Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas.

sasaran : Terwujudnya jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- 3) Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan.

Tujuan 3 : Meningkatkan peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.

Sasaran : Terwujudnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
- 2) Meningkatnya disiplin PNS.
- 3) Meningkatnya kompetensi dan profesional PNS.
- 4) Meningkatnya kinerja laporan keuangan perangkat daerah.
- 5) Meningkatnya prestasi PNS dan menurunnya jumlah penerima sanksi.

Tujuan 4 : Meningkatkan kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem bersih dan bermartabat.

Sasaran : Terwujudnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya partisipasi Desa Pekraman dan organisasi tradisional dan kemasyarakatan dalam

pengembangan budaya yang mendukung Karangasem Bersih dan Bermartabat.

- 2) Meningkatnya kompetensi lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Meningkatnya partisipasi para tokoh masyarakat lembaga pemerintah, lembaga adat dan kelompok lainnya yang mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat.

Tujuan 5 : Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.

Sasaran : Terwujudnya upaya penanggulangan kemiskinan, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan dan rumah layak huni bagi keluarga miskin.
- 2) Meningkatnya panjang jalan di perdesaan dalam kondisi baik.
- 3) Meningkatnya usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin.

Tujuan 6 : Meningkatkan produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.

Sasaran : Terwujudnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas, dengan yang meliputi:

- 1) Meningkatnya produktivitas tanaman pangan.
- 2) Meningkatnya sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan.
- 3) Meningkatnya pengembangan menghasilkan varietas baru tanaman pertanian.
- 4) Meningkatnya angka kecukupan pangan.
- 5) Meningkatnya produksi perikanan.

Tujuan 7 : Meningkatkan investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri serta memperbaiki iklim perdagangan.

Sasaran : Terwujudnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri serta memperbaiki iklim perdagangan dan daya saing produk industri terutama agroindustri, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan.
- 2) Meningkatnya jumlah investasi.
- 3) Meningkatnya industri kecil menengah dan kerajinan rumah tangga.
- 4) Meningkatnya perdagangan dalam negeri.
- 5) Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD.
- 6) Meningkatnya daya saing pasar tradisional

Tujuan 8 : Meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Sasaran : Terwujudnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya modal usaha kecil, menengah dan koperasi.
- 2) Meningkatnya koperasi yang aktif.
- 3) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro, UKM dan koperasi.
- 4) Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, dan pedagang kecil.

Tujuan 9 : Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan,

Sasaran : Terwujudnya destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya daya tarik wisata yang sedang berkembang.

- 2) Meningkatnya penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata.
- 3) Meningkatnya promosi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri.

Tujuan 10: Meningkatkan kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

sasaran : Terwujudnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya pengembangan pariwisata spiritual.
- 2) Meningkatnya pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Tujuan 11 : Meningkatkan pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.

Sasaran : Terwujudnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya ketersediaan perencanaan tata ruang.
- 2) Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam.
- 3) Meningkatnya efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi eks galian C.

Tujuan 12: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah terutama kawasan perdesaan.

Sasaran : Terwujudnya pembangunan infrastruktur wilayah yang meliputi:

- 1) Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, irigasi terutama kawasan perdesaan.

Tujuan 13: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.

Sasaran : Terwujudnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya pengelolaan persampahan.
- 2) Meningkatnya kualitas ruas jalan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif.

Tujuan 14: Meningkatkan pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.

Sasaran : Terwujudnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan yang meliputi:

- 1) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan.
- 2) Meningkatnya kualitas trotoar, penerangan jalan, taman bermain dan olahraga.

Tujuan 15: Meningkatkan kualitas SDM perdesaan.

Sasaran : Terwujudnya kualitas SDM perdesaan yang meliputi:

- 1) Meningkatnya kualitas aparatur Desa melalui bintek dan pelatihan administrasi.
- 2) Meningkatnya kesejahteraan aparatur desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Meningkatnya pendampingan teknis pengelolaan pembangunan bagi Desa Pekraman.

Tujuan 16: Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial keagamaan.

Sasaran : Terwujudnya kualitas pelayanan kehidupan beragama dan pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial keagamaan, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya bantuan keuangan kepada lembaga agama dan adat.
- 2) Meningkatnya kualitas dan peranan lembaga agama dan adat melalui pembinaan dan penyuluhan.
- 3) Meningkatnya koordinasi serta peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam mewujudkan Karangasem yang Bermartabat.
- 4) Meningkatnya kapasitas lembaga pesraman di masing-masing Desa Pekraman
- 5) Meningkatnya sarana dan prasarana tempat ibadah.
- 6) Meningkatnya sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan.

Tujuan 17 : Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran : Terwujudnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia.
- 2) Meningkatnya kualitas layanan terhadap kaum perempuan.
- 3) Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- 4) Meningkatnya kualitas generasi muda.

Tujuan 18 : Meningkatkan kualitas seni dan budaya masyarakat.

Sasaran : Terwujudnya kualitas seni dan budaya masyarakat, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya kualitas dan pengembangan seni dan budaya yang hampir punah.
- 2) Meningkatnya perlindungan aset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada di masyarakat.

- 3) Meningkatnya kreatifitas dan atraksi seni dan budaya.
- 4) Meningkatnya seni budaya berbasis Desa Pekraman dalam rangka mendukung PKB.
- 5) Meningkatnya penghargaan terhadap para seniman, budayawan dan penggiat seni lainnya.

Tujuan 19 : Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pemahaman demokrasi.

Sasaran : Terwujudnya wawasan kebangsaan dan pemahaman demokrasi, yang meliputi:

- 1) Meningkatnya wawasan kebangsaan dan demokrasi.
- 2) Meningkatnya advokasi dan pendidikan politik masyarakat.
- 3) Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari oleh:

- 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan,
- 2) isu strategis global/nasional/daerah,
- 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan,
- 4) target capaian tahun keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021.

dan dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

- 1) pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;

- 2) pencapaian visi dan misi Pembangunan Kabupaten Karangasem sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;
- 3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
- 4) penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Memperhatikan agenda prioritas dan sasaran pembangunan nasional, provinsi dan sasaran pembangunan daerah maka pada pembangunan daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 ditetapkan ke dalam 5 (lima) prioritas yaitu :

- Prioritas 1 : Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas Sumber Daya Manusia
- Prioritas 2 : Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
- Prioritas 3 : Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi melalui Pembangunan Pariwisata, Pertanian dan Ekonomi Kreatif
- Prioritas 4 : Pelestarian Adat, Seni dan Budaya Daerah
- Prioritas 5 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2020 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;
- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021;

- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2020;
- 5) Program dan kegiatan merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 (1) dan pasal 18 (1) terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memprioritaskan 6 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan oleh setiap kementerian/lembaga.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Dimana pelayanan minimal dimaksud mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Adapun laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM di daerah memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintahan daerah.

Adapun penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kondisi awal pencapaian kinerja dan penerapan SPM yang telah

dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tahun 2020.

Sasaran capaian Tahun 2020 diharapkan setiap OPD dapat mengintegrasikan program SPM Nasional tersebut ke dalam dokumen perencanaan dan kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Tujuan dari pelaporan penerapan SPM ini adalah untuk memperoleh informasi yang aktual tentang perkembangan pelaksanaan dan pencapaian SPM di Kabupaten Karangasem, sehingga kedepan diharapkan setiap tahapan dalam penerapan SPM dapat dilaksanakan secara utuh mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan mengevaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik pada tahun berikutnya.

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- a. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. PP No. 12 Tahun 2017 tentang Binwas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c. PP NO.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- d. PERMENDAGRI NO.100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM.

Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah sesuai dengan yang tertuang dalam visi Misi Kabupaten Karangasem di Dalam RPJMD Kabupaten Karangasem 2016-2021. Adapun Visi Kabupaten Karangasem 2016-2021 adalah :

**“Karangasem Cerdas, Bersih, Bermartabat
Berlandaskan Tri Hita Karana”**

Sedangkan Misi Kabupaten Karangasem adalah :

1. Membentuk Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (Sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna.
2. Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan budaya suap.
3. Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sector ekonomi kerakyatan berbasis pertaniandalam arti luas, usaha kecil dan menengah.
4. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan.
5. Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi local pedesaan.
6. Mengembangkan prikehidupan rakyat yang religious, toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial.

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasarpendidikan antara lain:

- (1) Menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan penurunan angka buta hurufmelalui penyelenggaraan pendidikan dasar dan keberaksaraan yang mudahdiakses terutama bagi keluarga miskin.
- (2) Meningkatkan akses, keterjangkauan, ketersediaan, dan pelayanan sertapengelolaan pendidikan anak usia dini secara merata dan berkualitas.

- (3) Meningkatkan akses, keterjangkauan, ketersediaan, dan pelayanan sertapengelolaan pendidikan dasar secara merata dan berkualitas.
- (4) Meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang sesuai dneganpotensi dan kebutuhan dunia kerja melalui peningkatan akses pendidikannonformal yang berkualitas.
- (5) Mengembangkan dan menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar,pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dan kebutuhan dunia kerja.
- (6) Meningkatkan pengaturan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah Kabupaten Karangasem secara proporsional sesuai dengan kompetensi,pemerataan penyebaran dan kebutuhan masing-masing sekolah.
- (7) Memberikan kemudahan pelayanan penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangan dan peraturan yangberlaku.
- (8) Meningkatkan pelayanan penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (9) Meningkatkan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah Kabupaten Karangasem.

2. Kesehatan

Perencanaan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan sudah dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Karangasem dengan target pencapaian kinerja sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

- (1) Meningkatkan akses, keterjangkauan, ketersediaan, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas di puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melalui pelayanan pengelolaan upaya kesehatan perorangan (UKP) Daerah Kabupaten Karangasem dan rujukan tingkat Daerah.

- (2) Meningkatkan akses, keterjangkauan, ketersediaan, dan pelayanan pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat dan rujukan daerah kabupaten melalui :
- (i) Pemerataan, peningkatan mutu pelayanan dan akses pelayanan keperawatan, kebidanan dan ketekhnisian, penunjang medik, sarana prasarana dan peralatan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat Daerah Kabupaten Karangasem.
 - (ii) Peningkatan mutu sistem informasi kesehatan, mutu perencanaan di tingkat Puskesmas dan rumah sakit dan peningkatan kualitas kemampuan teknis perencana kesehatan dan deteksi dini masalah kesehatan, pemantauan, penyehatan dan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan.
- (3) Meningkatkan cakupan, mutu, dan keterjangkauan pelayanan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usialanjut, kesehatan kerja dan olahraga, pembinaan, pengembangan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer.
- (4) Meningkatkan akses, keterjangkauan, ketersediaan, dan mutu pelayanan penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular untuk upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (5) Meningkatkan kualitas lingkungan, menurunkan angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveillance, karantina kesehatan, dan kesehatan mata, meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang.
- (6) Meningkatkan akses, keterjangkauan, ketersediaan, dan mutu mutu sediaanfrmasi dan alat kesehatan melalui pelayanan kefarmasian dan penggunaan obatrasional di fasilitas kesehatan, persediaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatanyang bermutu, merata dan terjangkau di

pelayanan kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu dan rumah sakit umum daerah.

- (7) Meningkatkan pemerataan rasio tenaga kesehatan pada masing-masing unit pelayanan kesehatan medis dan paramedis dan mutu sumberdaya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
- (8) Meningkatkan pelayanan penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah kabupaten.
- (9) Meningkatkan pelayanan penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan.
- (10) Meningkatkan pelayanan penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal.
- (11) Meningkatkan pelayanan penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT).
- (12) Meningkatkan pelayanan penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga.
- (13) Meningkatkan pelayanan penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
- (14) Meningkatkan pelayanan pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah Tangga.
- (15) Meningkatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain:

- (1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai.

- (2) Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha.
- (3) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem pengolahan air minum (SPAM).
- (4) Meningkatkan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan.
- (5) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik.
- (6) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai.
- (7) Meningkatkan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman terutama pembangunan pemukiman dan perumahan layak huni bagi keluarga miskin.
- (8) Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (9) Meningkatkan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya.
- (10) Meningkatkan penyelenggaraan pembangunan dan perbaikan jalan kabupaten terutama di wilayah perdesaan.
- (11) Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi.
- (12) Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten.
- (13) Meningkatkan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dankecil).
- (14) Meningkatkan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
- (15) Meningkatkan pengendalian ruang dan harmonisasi RTRW Kabupaten Karangasem melalui penyelenggaraan penataan ruang daerah kabupaten.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar perumahan rakyat dan kawasan pemukiman antara lain:

- (1) Meningkatkan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana.
- (2) Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (3) Meningkatkan pelayanan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang murah, akuntabel dan profesional sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima.
- (4) Meningkatkan pelayanan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) yang transparan dan tepat waktu.
- (5) Meningkatkan pelayanan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Meningkatkan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
- (7) Meningkatkan pengawasan, monitoring dan pencegahan munculnya perumahandan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten.
- (8) Meningkatkan penyelenggaraan prasarana, sarana, utiliti umum (PSU) perumahan.
- (9) Meningkatkan pelayanan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat antara lain:

- (1) Meningkatkan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum guna terwujudnya stabilitas politik, ketentraman, ketertiban dan keamanan wilayah melalui:
 - (i) Peningkatan peran desa pekraman dalam upaya menjaga ketentraman, ketertiban umum dan keamanan wilayah serta perlindungan kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
 - (ii) Peningkatan penegakan/supremasi hukum.
 - (iii) Penegakan Perda dan Peraturan Bupati dan peraturan lainnya yang terkait dengan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Karangasem.
 - (iv) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten secara terpadu dengan aparat keamanan wilayah.
 - (v) Peningkatan kemampuan satuan polisi pamong praja, pecalang dan hansip dalam menangani gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan wilayah.
 - (vi) Peningkatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kabupaten Karangasem.
- (2) Meningkatkan penanggulangan bencana.
- (3) Meningkatkan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
- (4) Meningkatkan sarana dan prasarana serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- (5) Meningkatkan pelayanan investigasi kejadian kebakaran.
- (6) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.

6. Sosial

Kebijakan umum yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 dalam melaksanakan bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sosialantara lain:

- (1) Meningkatkan pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT).
- (2) Meningkatkan pelayanan penerbitan izin pengumpulan sumbangan.
- (3) Meningkatkan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- (4) Meningkatkan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah Kabupaten Karangasem.
- (5) Meningkatkan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan darititik debarkasi di Daerah Kabupaten Karangasem untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal.
- (6) Meningkatkan rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
- (7) Meningkatkan pelayanan pemeliharaan anak-anak terlantar.
- (8) Meningkatkan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kabupaten Karangasem.
- (9) Meningkatkan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten Karangasem.
- (10) Meningkatkan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten Karangasem.
- (11) Meningkatkan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten Karangasem.

Sesuai dengan RPJPD Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan kepada terwujudnya masyarakat Karangasem yang sejahtera, dan berkeadilan berdasarkan budaya Bali. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kabupaten Karangasem masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang dihadapi seperti kondisi geografis wilayah dengan minim sumber daya air, kehidupan sosial masyarakat saatini,

perubahan-perubahan yang terjadi di daerah lain, keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah, pertumbuhan antar sektor yang kurang seimbang, kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan, sistem perdagangan dan perekonomian domestik yang semakin bebas dan persaingan global yang semakin ketat.

Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, Kabupaten Karangasem memiliki potensi sumberdaya alam (lahan, hutan, perairan/ laut, keanekaragaman hayati, iklim tropis) yang masih kaya dan belum dimanfaatkan secara optimal dan sumber daya manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya Agama Hindu (tenaga, pikiran, waktu, nilai-nilai budaya/adat dan agama Hindu dan moral). Kedua sumber daya tersebut merupakan keunggulan komparatif (*comparative advantages*) sehingga arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karangasem lima tahun mendatang

adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia diarahkan guna terwujudnya Karangasem yang Cerdas, Bersih, dan Bermartabat yang berlandaskan Tri Hita Karana.

Landasan kebijakan pembangunan Kabupaten Karangasem sesuai dengan Visi dan Misi yang bertumpu pada tiga pilar utama yaitu: (a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (b) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, (c) Peningkatan harkat dan martabat daerah yang berdaya saing. Ketiga pilar tersebut salingterkait dan dikembangkan secara selaras, terpadu, dan saling memperkuat. Kebijakan dasar dilandasi kebudayaan Bali Tri Hita Karana. sebagai landasan segala gerak dan langkah pembangunan dalam rangka mewujudkan Karangasem yang Cerdas dan Bermartabat.

Langkah awal dalam implementasi SPM yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah melakukan sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaan yang dilakukan. Langkah berikutnya melakukan pemetaan kondisi awal SPM terkait penerapan dan

pencapaiannya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan Pemetaan kondisi awal SPM Penerapan dan pencapaian SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga memenuhi standar capaian SPM secara nasional.

Dari sisi waktu pencapaiannya, melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karangasem terus mengarahkan dan memantau pelaksanaan dan capaian tingkat cakupan yang minimal sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah untuk masing-masing indikator SPM masing-masing OPD.

Mengkoordinasikan dalam proses capaian tujuan dari SPM pada masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten merupakan salah satu peran dan tugas koordinatif melalui Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor 222/HK/2020 Tanggal 25 Juli 2020, tentang Tim Penyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2020.

Tim mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan kepada seluruh OPD terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM yang meliputi :

- a. memberikan masukan terhadap kegiatan fasilitasi percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Perangkat Daerah pemangku Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penyusunan Laporan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal kewenangan Perangkat Daerah Pemangku Standar Pelayanan Minimal.
- c. Mengadakan pertemuan-pertemuan terkait fasilitas percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati selaku Pembina penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- e. Menyampaikan laporan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk Kabupaten Karangasem kepada Gubernur melalui Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali.

Rencana pencapaian dan penerapan SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berikut 6 urusan pemerintahan wajib yang menjadi prioritas pelaporan SPM pada Tahun 2020 serta penanggung jawab dalam pencapaian dan penerapan SPM di Kabupaten Karangasem :

- 1) Bidang Pendidikan, pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem,
- 2) Bidang Kesehatan, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem,
- 3) Bidang Pekerjaan Umum, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Karangasem,
- 4) Bidang Perumahan Rakyat, pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Karangasem.
- 5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, pada Sat. Pol PP Kab. Karangasem, Dinas Pemadam Kebakaran dan Unsur terkait sesuai jenis layanan dasarnya.
- 6) Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karangasem.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

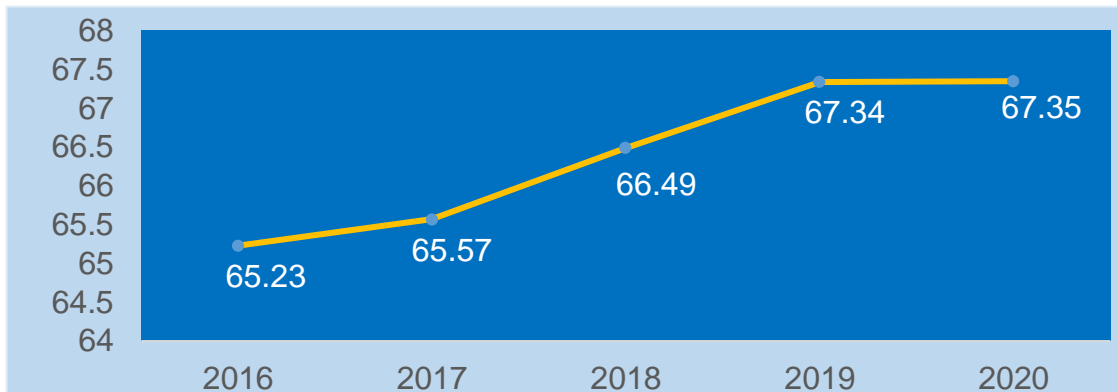
Aspek kesejahteraan ekonomi yang penting diukur adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karangasem atau laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010, Penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kabupaten Karangasem periode tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karangasem mencapai 67,34 dan IPM tahun 2010 sebesar 67,35 Secara rinci perkembangan IPM Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada Grafik dibawah ini :

Garfik 2.1
IPM Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. BPS menggunakan beberapa indikator dalam pengukuran tingkat kemiskinan, yaitu Garis Kemiskinan (GK), persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan.

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem selama kurun waktu 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2020

Kemiskinan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	27.120	27.020	26.020	25.990	24.690
Persentase Penduduk Miskin (%)	6,61	6,55	6,28	6,25	5,91

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, BPS Kab. Karangasem, 2019

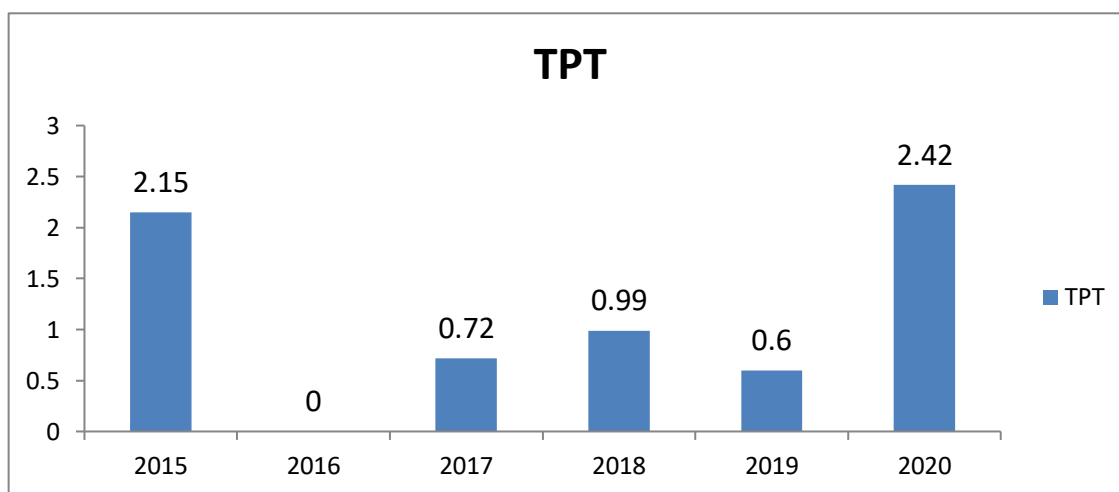
Dalam kurun waktu 2016-2020 Jumlah penduduk Miskin Kabupaten Karangasem mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 27.120 jiwa (6,61%) turun menjadi 24.690 jiwa (5,91%) pada tahun 2020, hal ini disebabkan karena beberapa program dan kebijakan pemerintah sudah dapat berjalan seperti bedah rumah, program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

3. Angka Pengangguran

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Bali, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Terendah di Bali. Terhadap hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang ada sebagian besar sudah terserap di sektor formal maupun non formal, tahun 2016 tidak dilaksanakan survei, seperti dalam Tabel Berikut :

Grafik 2.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2020



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, berdasarkan harga konstan 2010 nilai PDRB Kabupaten Karangasem pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, nilai PDRB Kabupaten Karangasem atas dasar harga konstan 2010 tahun 2019 mencapai 11,13 triliun. Angka tersebut naik 10,55 triliun rupiah pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50 persen lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,48 persen.

Kabupaten Karangasem sebagai daerah pertanian menjadi pendorong lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi

lapangan usaha yang dominan dengan pertumbuhan cukup tinggi ditengah melambatnya sebagian besar lapangan usaha di Kabupaten Karangasem lapangan usaha ini mampu tumbuh sebesar 2,85 persen tahun 2019.

Tumbuhnya ekonomi Kabupaten Karangasem banyak dipengaruhi oleh tumbuhnya lapangan usaha pertambangan dan penggalian, jasa pendidikan penyediaan akomodasi dan makan minum dan jasa lainnya dalam pembentukan nilai tambah di Kabupaten Karangasem.

Pada kurun waktu 2015 – 2019 Lapangan usaha dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 9,93 persen, kemudian lapangan usaha jelas pendidikan dengan rata – rata pertumbuhan 8,75 persen, dan yang ketiga lapangan usaha jasa lainnya dengan rata-rata pertumbuhan 8,65 persen.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Karangasem

Laju Pertumbuhan Ekonomi	2015	2016	2017	2018	2019
Kabupaten Karangasem	6,00	5,95	5,06	5,48	5,50

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, BPS Kab. Karangasem, 2020

5. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita Karangasem tahun 2015 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 30,10 juta. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, setiap penduduk di Karangasem menerima pendapatan sebesar Rp 30,10 juta selama tahun 2015, atau sekitar Rp 2,5 juta perbulannya. Besarnya PDRB perkapita atas dasar harga konstan mencapai Rp 17,79 juta maka tahun 2015 sudah mencapai Rp 22 juta. Adapun PDRB perkapita pada tahun 2017 besarnya mencapai Rp 35,53 Juta atas dasar harga berlaku (ADHB), dan PDRB Kab Karangasem baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan 2010 pada tga tahun terakhir mengalami trend yang positif. PDRB Kab Karangasem pada tahun 2019 mencapai 41,06 ribu rupiah.

Tabel 2.3
Perbandingan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB Perkapita Kabupaten Karangasem (ribu rupiah)	2015	2016	2017	2018	2019
ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku)	29,93	32,65	35,36	38,27	41,06
ADHK (Atas Dasar Harga Konstan)	22,00	23,18	24,24	25,44	26,73

Sumber Data: BPS Provinsi Bali, BPS Kab. Karangasem, 2020

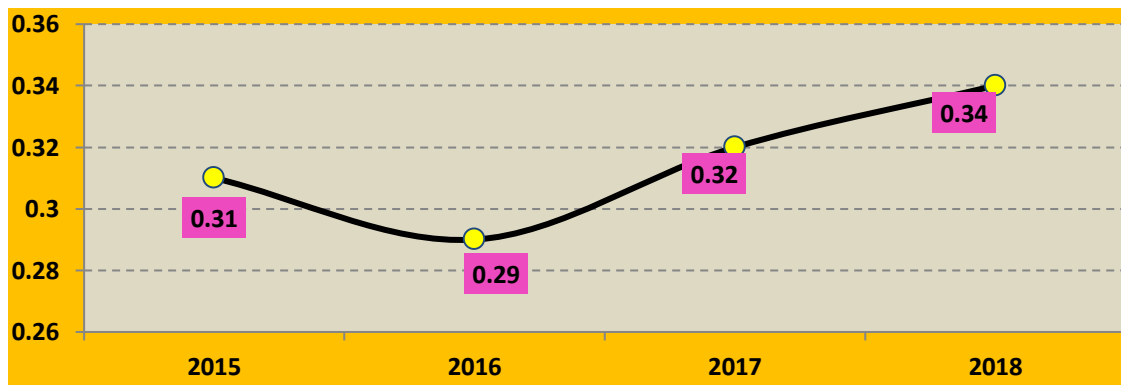
6. Indeks Gini Rasio (Ketimpangan Pendapatan)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan masyarakat Kab Karangasem tahun 2018 sebesar 0,34 mengalami peningkatan sebesar 0,02 dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 0,32 namun hal ini masih dalam batas kewajaran dan masih dibawah rata-rata Nasional dan Provinsi.

Grafik 2.3

Indeks Gini Ratio Kabupaten Karangasem Tahun 2015-2018



Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

Tabel 2.4
Rekapan Capaian Kinerja Makro

No	INDikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Manusia	67,34	67,35	0,01
2	Angka Kemiskinan	25.990	24.690	-5,27
3	Angka Pengangguran	0,6	2,42	75,21
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,48	5,50	0,36
5	Pendapatan Per Kapita	38,27	41,06	6,79
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,32	0,34	5,88

Sumber : Bappelitbangda Kab. Karangasem, 2020

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	44 Satuan Pendidikan	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	743 Peserta	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	460 Kebutuhan Minimal	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	376 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	374 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kepala Sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki	162 Kepala Sekolah	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah			
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	402 SD dan SMP	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.220 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3.088 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	44.477 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima	20.935 Peserta Didik	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pembebasan biaya pendidikan			
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3.045 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.439 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.518 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.125 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	299 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	312 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	333 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	326 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang	1.836 Pendidik	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	658 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	330 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah	47 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2 Tenaga Penunjang	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	396 SD dan SMP	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.131 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.978 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	44.477 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20.935 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.045 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.439 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3.496 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.097 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga	299 Kebutuhan	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kependidikan pada jenjang sekolah dasar			
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	312 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	333 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	326 Tenaga Kependidikan	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.836 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	658 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	330 Kepala Sekolah	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan	47 Kepala Sekolah	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		calon kepala sekolah			
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2 Tenaga Penunjang	Disdikpora	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	10 Satuan Pendidikan	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima Perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	815 Peserta Didik	Disdikpora	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	58 Kebutuhan	Disdikpora	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	239 Pendidik	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	195 Pendidik	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	11 Kepala Sekolah	Disdikpora	
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	3 RS	Diskes	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3 RS	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	807.218 logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	132 orang	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	30 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	149 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12.914 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	205 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6.847 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	139 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	614 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	262 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.500 Logistik	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35.845 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	70 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.500 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.500 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.448 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	36 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12.321 Logistik	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	55 Orang	Diskes	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	160.154 Logistik	Diskes	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	69 Orang	Diskes	
3	Pekerjaan Umum	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	864 Ha	Dis PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	2.300 m	Dis PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	63,80 Ha	Dis PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	1.140 m	Dis PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	SK. Kepala DPUPR Kab. Karangasem No. 01 Tahun 2020 Tentang Pembagian Tugas Pengamat, Juru Pengairan, Penjaga Bendung/ Pintu Air dan Penjaga Embung pada Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. Karangasem T.A. 2020	Dis PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana	DED Perencanaan Irigasi : 16 Paket DED Perencanaan Sugai : 4 Paket	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/ kota	DED Perencanaan Mata Air : 1 Paket DED Perencanaan Pantai : 2 Paket		
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Panjang bangunan pantai : 3.319 m Panjang bangunan sungai : 1.709 m	Dis PUPR	
		Luas kawasan pemukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	864 Ha	Dis PUPR	
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	2.300 m	Dis PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	63,80 Ha	Dis PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	1.140 m	Dis PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/ rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	SK. Kepala DPUPR Kab. Karangasem No. 01 Tahun 2020 Tentang Pembagian Tugas Pengamat, Juru Pengairan, Penjaga Bendung/ Pintu Air dan Penjaga Embung pada Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kab. Karangasem T.A. 2020	Dis PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	DED Perencanaan Irigasi : 16 Paket DED Perencanaan Sugai : 4 Paket DED Perencanaan Mata Air : 1 Paket DED Perencanaan Pantai : 2 Paket	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Panjang bangunan pantai : 3.319 m Panjang bangunan sungai : 1.709 m	Dis PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) 222.440,4 m ----- x 100% = 72,12% Panjang jaringan irigasi primer (m) 308.415 m	Dis PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) 12.594,7 m ----- x 100% = 66,94% Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 18.814,7 m	Dis PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- x 100% = 0% Panjang jaringan irigasi tersier (m)	Dis PUPR	
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	1 Dokumen	Dis PUPR	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Pemuktakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Karangasem 2016-2019	Dis PUPR	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota Penyelenggaraan SPAM	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	2 Kerja Sama	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	123.861 Rumah (KK)	Dis PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	3.237 Rumah (KK)	Dis PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	127.098 Rumah (KK)	Dis PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	145 Rumah	Dis PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	145 Rumah	Dis PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	127.098 Rumah (KK)	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha}} = \frac{123.861 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 87,67\%$	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\Sigma \text{ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\Sigma \text{ rumah di wilayah pengembangan SPALDS}} = \frac{89 \text{ KK}}{141.281 \text{ KK}} \times 100\% = 0,06\%$	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/ha		
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Σ rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD 3.237 KK ----- x 100% = 2,29% Σ rumah di wilayah pengembangan SPALDT 141.281 KK	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Σ rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat 123.861 KK ----- x 100% = 87,67% Σ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S 141.281 KK	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Σ jumlah sarana pengangkutan yang tersedia 3 Unit ----- x 100% = 100 % Σ jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota 3 Unit	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Σ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia 1,5 m³/hari ----- x 100% = 5% Σ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota 30 m³/hari	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Σ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD 3.237 KK ----- x 100% = 2,29% Σ jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota 141.281 KK	Dis PUPR	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Σ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot 89 KK ----- x 100% = 0,06% Σ jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S 141.281 KK	Dis PUPR	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Σ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku ----- x 100% = 0% Σ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	Dis PUPR	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	99 IMB	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	2 Dokumen	Dis PUPR	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	6 Buah Bagunan Gedung	Dis PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	216 Buah	Dis PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/ dirawat	216 Buah	Dis PUPR	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.202,54 Km	Dis PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun	2 KM	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang dibangun	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	2.920 Km	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang diganti/ dilebarkan	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Panjang jalan yang dipelihara	8,98 Km	Dis PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator /teknisi / analis di wilayah Kabupaten/kota	10 Orang	Dis PUPR	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi /analis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	10 Orang	Dis PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	457 Orang	Dis PUPR	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Aplikasi SIPJAKI	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di	Ada	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN			
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi	10 Sertifikat	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/ analis			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/ analis di wilayah kab/kota	457 Sertifikat	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/ kota	41 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tersedia	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis,	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	104 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	72 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	41 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	41 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	35 Badan Usaha	Dis PUPR	
		Jumlah pengawasan Terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	(Tidak Ada Data)	Dis PUPR	
4	Perumahan Rakyat	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/ atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	8.121 ha	Dis Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	12,41 Ha	Dis Perkim	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	4.277 Unit	Dis Perkim	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,79.895 Ha	Dis Perkim	
		Jumlah rumah di kab/kota	253.171 Rumah	Dis Perkim	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	4.277 Unit	Dis Perkim	
		Jumlah rumah tidak layak huni	8.121 Unit	Dis Perkim	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Rasio rumah dan KK	$\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Jumlah total unit rumah}} = \frac{253.171}{253.171}$	Dis Perkim	
		Jumlah rumah pembangunan baru	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	(Tidak Ada Data)	Dis Perkim	
5	Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	Jumlah pengaduan yang ditangani = 55 -----x 100% = 91,67% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 60	SatPol PP	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Satlinmas yang dikukuhkan = 2230 ----- x 100% = 80,27% Satlinmas yang terlatih = 2778	SatPol PP	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda / Perkada yang memuat Sanksi yang ditegakkan = 11 -----x 100% = 100% Jumlah keseluruhan Perda / Perkada yang memuat Sanksi = 11	SatPol PP	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki kualitas PPNS = 1 -----x 100% = 1,06% Jumlah Polisi Pamong Praja = 94	SatPol PP	
		Tersedianya SOP dalam penegakan	Ada	SatPol PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum			
		Tersedianya sarana prasarana minimal	Ada	SatPol PP	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>x 100%= 0 <i>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan</i>	BPBD	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	<i>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> 519.998=x 100%= 100% <i>Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i> 519.998	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>x 100%= 0 <i>Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan</i>	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	<i>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</i>x 100%= 0 <i>Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan</i>	BPBD	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</i>x 100%= 0 <i>Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana</i>	BPBD	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	<i>Jumlah warga negara yang ikut pelatihan</i>x 100%= 0 <i>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i>	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	<i>jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops</i> = 519.998 <i>jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i> = 519.998 -----x 100% = 100%	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	<i>jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan</i> = 519.998 <i>jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</i> = 519.998 -----x 100% = 100%	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	<i>jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB</i> -----x 100% = 0 <i>jumlah seluruh penetapan status KLB</i>	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	<i>jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana</i> = 1 -----x 100% = 100% <i>jumlah seluruh penetapan status darurat bencana</i> = 1	BPBD	SK Darurat Covid
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	<i>jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</i> = 35 -----x 100% = 41,66% <i>jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana</i> = 84	BPBD	SK Tim TRC, EWS, Pusdalops
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	<i>jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi</i> = 18 -----x 100% = 100% <i>Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana</i> = 18	BPBD	Data Rekap Korban Bencana (Meninggal, Luka Ringan, Luka Berat)
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan	Jenis Layanan = 10 Layanan Jumlah Layanan = 71 Layanan	Dis Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penyelamatan di kabupaten/kota			
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Dis Damkar	
		Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Dis Damkar	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Ada	Dis Damkar	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Ada	Dis Damkar	
		Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Diklat pemadam I = 50 Orang	Dis Damkar	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Dis Damkar	
		Jumlah peningkatan kapasitas	0	Dis Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		aparatur pemadam kebakaran			
6	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	0	Dis Sosial	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0	Dis Sosial	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	55 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	0	Dis Sosial	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	5 Kendaraan	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	75 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dis Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	17 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dis Sosial	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dis Sosial	
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dis Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	56 Orang TAGANA; 7 Orang Tenaga Pelopor Perdamaian; 156 Orang PSM; 78 Karang Taruna; 6 Orang Pekerja Sosial LK3; 4 Orang Pekerja Pendamping Disabilitas, Anak Terlantar dan Gelandangan.	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	20 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	Dis Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	Dis Sosial	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	384 Orang	Dis Sosial	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	70 KK	Dis Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	38 Paket	Dis Sosial	
		Jumlah tempat penampungan	0	Dis Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengungsi yang dimiliki			
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dis Sosial	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dis Sosial	
		Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	56 Orang TAGANA; 7 Orang Tenaga Pelopor Perdamaian; 156 Orang PSM; 78 Karang Taruna; 6 Orang Pekerja Sosial LK3; 4 Orang Pekerja Pendamping Disabilitas, Anak Terlantar dan Gelandangan.	Dis Sosial	
7	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	Ada	Disnaker	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Realisasi indikator} - \text{target indikator}}{\text{Realisasi}} \times 100\% = \text{(Tidak ada data)}$	Disnaker	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	(Tidak Ada Data)	Disnaker	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{\text{jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKN1 atau okupasi pada tahun n}}{\text{keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n}} \times 100\% = 100\%$	Disnaker	
		Persentase instruktur Bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n}}{\text{jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n}} \times 100\% = 100\%$	Disnaker	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{jumlah instruktur pada tahun n}}{\text{jumlah peserta pelatihan pada tahun n}} = 0,034$	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase LPK yang terakreditasi	jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n 9 ----- jumlah seluruh LPK pada tahun n 22 ----- x100%= 40,90%	Disnaker	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n 16 ----- jumlah LPK yang terdata pada tahun n 22 ----- x100%= 72,70%	Disnaker	
		Jumlah penganggur yang dilatih	320 Orang		
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n 320 ----- jumlah orang yang dilatih pada tahun n 320 ----- x100%= 100%	Disnaker	
		Persentase penyerapan lulusan	jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n 0 ----- jumlah lulusan pada tahun n 320 ----- x100%= 0%	Disnaker	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n 162 ----- jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n 320 ----- x100%= 50,62%	Disnaker	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	ΣCPMI dilatih 0 ----- ΣCPMI terdaftar 163 ----- x100%= 0%	Disnaker	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0/ (Tidak Ada)	Disnaker	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ----- jumlah perusahaan pada tahun n ----- x100%= 0%	Disnaker	
		Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja). (Tidak Ada Data)	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	<i>jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n</i> = $\frac{26}{401} \times 100\% = 6,48\%$ <i>jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih</i>	Disnaker	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	<i>jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n</i> = $\frac{10}{18} \times 100\% = 55,50\%$ <i>jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB</i>	Disnaker	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	18	Disnaker	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	<i>jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah</i> x100%= (Tidak Ada Data) <i>jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP atau PKB).</i>	Disnaker	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	<i>jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan</i> = $\frac{1.398}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor</i>	Disnaker	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	<i>jumlah perusahaan yang berselisih</i> = $\frac{3}{3.894} \times 100\% = 0,077\%$ <i>jumlah perusahaan pada tahun n</i>	Disnaker	
		Jumlah mogok kerja	0	Disnaker	
		Jumlah penutupan perusahaan	333 Perusahaan	Disnaker	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	Disnaker	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Disnaker	
		Jumlah perselisihan PHK	2	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	117	Disnaker	
		Jumlah perselisihan yang Diselesaikan melalui Perundingan bipartite	0	Disnaker	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0	Disnaker	
		Persentase perselisihan Hubungan industrial yang Diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah kasus perselisihan}} = \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$	Disnaker	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	20 Loker	Disnaker	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	704 Pencaker	Disnaker	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	5	Disnaker	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Disnaker	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Disnaker	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	Disnaker	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	56	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	836	Disnaker	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\Sigma \text{CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\Sigma \text{CPMI/CTKI}} = \frac{0}{163} \times 100\% = 0\%$	Disnaker	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	163	Disnaker	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\Sigma \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\Sigma \text{PMI yang pulang}} = \frac{0}{1.077} \times 100\% = 0\%$	Disnaker	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\Sigma \text{PMI TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\Sigma \text{PMI/TKI}} = \frac{0}{163} \times 100\% = 0\%$	Disnaker	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\Sigma \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\Sigma \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\% = 0$	Disnaker	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\Sigma \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\% = 0$	Disnaker	
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/ kota yang telah dilatih PUG	Jumlah Perangkat Desa yang terlatih sebanyak 25 Orang	Dis P3A	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	(Tidak ada Kegiatan)	Dis P3A	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1 WEB (dpppa.karangasemb.go.id)	Dis P3A	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1 Lembaga (DPPA Kabupaten Karangasem)	Dis P3A	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{jumlah korban kekerasan anak di tingkat provinsi}} \times 100\% = \frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$	Dis P3A	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	4 Desa (SK Penetapan Peserta Pelatihan)	Dis P3A	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	(Tidak ada Kegiatan)	Dis P3A	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan dalam mengembangkan ekonomi keluarga sebanyak 100 orang (16 organisasi wanita)	Dis P3A	
		Jumlah kader perempuan tingkat	a. Jumlah Perempuan yang terbina dalam mengelola usahanya sebanyak 48 orang b. Jumlah anggota kelompok P2WKSS yang terbina sebanyak 25 orang	Dis P3A	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota yang sudah dilatih			
		Jumlah lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	(Tidak ada Kegiatan)	Dis P3A	
		Jumlah lembaga layanan Pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	(Tidak ada Kegiatan)	Dis P3A	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 Program (SK TPPO)	Dis P3A	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	(Tidak ada Kegiatan)	Dis P3A	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{\text{jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan}}{\text{jumlah korban kekerasan terhadap perempuan}} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	Dis P3A	
9	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	10 Gubang Cadangan Pangan	Dis Pangan	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Sesuai hasil pemantauan ketersediaan pangan utama (Surplus)	Dis Pangan	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	(Tidak ada data)	Dis Pangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Pembinaan pada 6 KWT	Dis Pangan	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Tersusunnya peta FSVA (Food Security and Vinerability Atlas)	Dis Pangan	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Terlaksananya Keg Pertanian Keluarga / 1 Kelurahan	Dis Pangan	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	(Tidak ada data)	Dis Pangan	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Melalui uji lab (100%)	Dis Pangan	
10	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	<i>Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+ jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun</i>		
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	<i>Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform</i>		
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee	<i>Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek</i>		
		Dokumen Izin membuka tanah	<i>Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui+jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak</i>		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			-----x100%= 0 <i>jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun</i>		
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	<i>jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik</i> -----x100%= 0 <i>jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun</i>		
11	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan kabupaten terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU) b. Indeks tutupan hutan (ITH) c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	Indeks Kualitas Air (IKA) Karangasem = 50 Indek Kualitas Udara (IKU) Karangasem = 91,51 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Karangasem = 47,46 TH = Tutupan Hutan	Dis LH	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah = 15 Rayon 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah = 16 TPST/ TPS3R 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan = 44 Bank Sampah	Dis LH	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	<i>Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i> 10 -----x100%= 100% <i>jumlah usulan permohonan yang teregistrasi</i> 10	Dis LH	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah	<i>Jumlah PPLHD yang ada</i> -----x100%= 0	Dis LH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	<i>jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i>		
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	<i>jmlh MHA yg diakui</i> -----x100%= 0 <i>jmlh usulan MHA</i>	Dis LH	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	<i>jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan</i> -----x100%= 0 <i>jmlh MHA yg ada</i>	Dis LH	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	<i>jmlh lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana</i> -----x100%= 0 <i>target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat</i>	Dis LH	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	<i>Pengaduan masyarakat yg ditangani</i> 7 ----- <i>total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi</i> 7 -----x100%=100%	Dis LH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	<i>jumlah akta perkawinan yang diterbitkan</i> 4.183 -----x100%=100% <i>Peristiwa perkawinan yang dilaporkan</i> 4.183	Dis Dukcapil	
		Penerbitan akta perceraian	<i>jumlah akta perceraian yang diterbitkan</i> 197 -----x100%=100% <i>Peristiwa perceraian yang dilaporkan</i> 197	Dis Dukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Penerbitan akta kematian	<i>Jumlah akta kematian yang diterbitkan</i> 1.650 -----x100%=100%	Dis Dukcapil	
		Penyajian data kependudukan	<i>Peristiwa kematian yang dilaporkan</i> 1.650 <i>Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun</i> 196 -----x100%=52,69% <i>2 tahun</i> 372	Dis Dukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0 Desa	Dis PMD	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa	Dis PMD	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	PKK 8 Kelompok	Dis PMD	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	PKK 8 Kelompok	Dis PMD	
		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0 Desa	Dis PMD	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah	0 Desa	Dis PMD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	PKK 8 Kelompok	Dis PMD	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	PKK 8 Kelompok	Dis PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tersedia (GDPK) berdsarkan Perpres Nomor 153 Tahun 2014	Dis PPKB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	20,0 (berdasarkan indikator biren Susenas 2019)	Dis PPKB	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_{if}} \times k = 38,59 \text{ per } 1.000$ (berdasarkan indikator biren Susenas 2019)	Dis PPKB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	<i>Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)</i> 2.520 <i>jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)</i> 152.462 -----x100%=1,65%	Dis PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah stakeholders/ Pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	19 Perangkat Daerah (sesuai SK Bupati No 94/HK/2019)	Dis PPKB	
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{jumlah faskes}} = \frac{24}{25} \times 100\% = 96\%$	Dis PPKB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA)Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{jumlah PUS}} = \frac{75.904}{88.620} \times 100\% = 85,65\%$	Dis PPKB	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	11 Pokja Kampung KB	Dis PPKB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} = \frac{1.501}{6.920} \times 100\% = 21,69\%$	Dis PPKB	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0%	Dis PPKB	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	$\frac{\text{jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{jumlah Keluarga PBI}} = \frac{16.045}{20.335} \times 100\% = 78,90\%$	Dis PPKB	
15	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas	<i>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan</i>	Dishub	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	<i>Tipe C yang tersedia</i> 11 $\frac{11}{15} \times 100\% = 73,33\%$ <i>Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan</i> 15		
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	<i>Jumlah kendaraan yang diuji per tahun</i> 4.893 $\frac{4.893}{6.785} \times 100\% = 72,11\%$ <i>Jumlah kendaraan wajib uji</i> 6.785	Dishub	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	<i>Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan</i> 12 $\frac{12}{18} \times 100\% = 66,67\%$ <i>Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota</i> 18	Dishub	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	<i>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</i> 1.424 $\frac{1.424}{12.030} \times 100\% = 11,84\%$ <i>Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota</i> 12.030	Dishub	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota</i> 1.424 $\frac{1.424}{12.030} \times 100\% = 11,84\%$ <i>Target kebutuhan perlengkapan Jalan Kabupaten atau Kota</i> 12.030	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	<i>Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i> 53 $\frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$ <i>Jumlah Perangkat Daerah</i> 53	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan</i>	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	<i>dinas kominfo</i> = $\frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$ <i>Jumlah Perangkat Daerah</i> = 53		
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Website, Repeater, Sekermas, Videotron	Diskominfo	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	<i>Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</i>x100%= 0 % <i>Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah</i>	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	<i>Jumlah perangkat daerah yang memiliki portaldan situs web yang sesuai standar</i> = $\frac{38}{53} \times 100\% = 71,70\%$ <i>Jumlah Perangkat Daerah</i> = 53	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang Mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan</i> = $\frac{53}{53} \times 100\% = 100\%$ <i>Jumlah Perangkat Daerah</i> = 53	Diskominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi	<i>Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis</i>	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	<i>yang telah diimplementasikan secara elektronik</i> -----x100%= 0% <i>Jumlah layanan</i>		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	<i>Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik</i> -----x100%= 0% <i>Jumlah layanan</i>	Diskominfo	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<i>Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</i> -----x100%= 0% <i>Jumlah sistem elektronik</i>	Diskominfo	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	<i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</i> 5 -----x100%= 9,43% <i>Jumlah layanan publik dan layanan administrasi</i> 53	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	<i>Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah</i> 5 -----x100%= 9,43% <i>Jumlah perangkat daerah</i> 53	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	<i>Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat</i> 5 -----x100%= 9,43% <i>Jumlah perangkat daerah</i> 53	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	<i>Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya</i> 53 -----x100%= 100% <i>Jumlah perangkat daerah</i> 53	Diskominfo	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	<i>Jumlah data yang dapat berbagi pakai</i> -----x100%= 0% <i>Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah</i>	Diskominfo	
		Persentase perangkat daerah yang	<i>Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi</i>	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	<i>yang mendukung smart city</i> -----= <i>Jumlah perangkat daerah</i> 39 -----x100%= 73,58% 53		
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	<i>Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo</i> 2 -----= <i>Jumlah ASN Pengelola TIK</i> 2 -----x100%= 100%	Diskominfo	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Perbup Karangasem Nomor 44 Tahun 2015	Diskominfo	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	<i>Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah</i> 78 -----= <i>Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi</i> 78 -----x100% = 100%	Diskominfo	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	<i>Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</i> -----= <i>Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Provinsi)</i> -----x100%= 100%	Diskominfo	Di informasikan di web. Pemkab krs
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	<i>Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP</i> 7 -----= <i>Σ Diseminasi dan layanan Informasi Publik</i> 10 -----x100%= 70%	Diskominfo	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi	<i>Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan</i>	Diskoperasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	-----x100%= 0 <i>Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam</i>		
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan</i>	Diskoperasi	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi</i> 6 -----x100%= 1,88% <i>Jumlah koperasi yang ada</i> 320	Diskoperasi	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya</i> 40 -----x100%= 12,50% <i>Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada</i> 320	Diskoperasi	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan</i> 100 -----x100%= 45,87% <i>Jumlah koperasi yang ada</i> 218	Diskoperasi	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian</i> 120 -----x100%=55,06% <i>Jumlah anggota koperasi yang ada</i> 218	Diskoperasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan</i> $\frac{0}{218} \times 100\% = 0\%$ <i>Jumlah koperasi yang ada</i> 218	Diskoperasi	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		Diskoperasi	Tidak perlu diisi
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)</i> $\frac{190}{218} \times 100\% = 87,16\%$ <i>Jumlah koperasi yang ada</i> 218	Diskoperasi	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan</i> $\frac{131}{218} \times 100\% = 60,09\%$ <i>Jumlah koperasi yang ada</i> 218	Diskoperasi	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran</i> $\frac{131}{218} \times 100\% = 60,09\%$ <i>Jumlah koperasi yang ada</i> 218	Diskoperasi	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha</i> $\frac{50}{218} \times 100\% = 22,94\%$ <i>Jumlah koperasi yang ada</i> 218	Diskoperasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan</i> = 120 <i>Jumlah koperasi yang ada</i> = 218 $\frac{120}{218} \times 100\% = 55,05\%$	Diskoperasi	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	<i>Jumlah pertumbuhan wirausaha baru</i> = 25.925 <i>Jumlah wirausaha yang ada</i> = 57.456 $\frac{25.925}{57.456} \times 100\% = 45,12\%$	Diskoperasi	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	<i>Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)</i> = 90 <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> = 57.456 $\frac{90}{57.456} \times 100\% = 0,16\%$	Diskoperasi	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	<i>Jumlah usaha mikro yang bermitra</i> = 68 <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> = 57.456 $\frac{68}{57.456} \times 100\% = 0,12\%$	Diskoperasi	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi</i> = 67 <i>Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk</i> = 57.389 $\frac{67}{57.389} \times 100\% = 0,12\%$	Diskoperasi	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran</i> = 17 <i>Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran</i> = 57.439 $\frac{17}{57.439} \times 100\% = 0,03\%$	Diskoperasi	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan</i> = 50 <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> = 57.456 $\frac{50}{57.456} \times 100\% = 0,09\%$	Diskoperasi	
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	<i>Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha</i> = 92 <i>Jumlah usaha mikro yang ada</i> = 57.456 $\frac{92}{57.456} \times 100\% = 0,16\%$	Diskoperasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
18	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	(Tidak Ada data)	DPMPPTSP	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	(Tidak Ada data)	DPMPPTSP	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	(Tidak Ada data)	DPMPPTSP	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1 Kali	DPMPPTSP	
		Kegiatan pameran penanaman modal	(Tidak Ada data)	DPMPPTSP	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	(Tidak Ada data)	DPMPPTSP	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	14 Orang	DPMPPTSP	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1.476 Buah	DPMPPTSP	
		Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 259.778.669.265	DPMPPTSP	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	9 Orang	DPMPPTSP	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	15 Perusahaan	DPMPPTSP	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi	4/4 = 100%	DPMPPTSP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota			
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	30 Orang	Disdikpora	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	50 Orang	Disdikpora	
		Jumlah penyelenggaraan event Olah Raga prestasi tingkat daerah	0 (Tidak ada data)	Disdikpora	
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	Ada/ tersedia	Bapelit Bangda	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	(Tidak Ada Data)	Bapelit Bangda	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	(Tidak Ada Data)	Bapelit Bangda	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	(Tidak Ada Data)	Bapelit Bangda	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	(Tidak Ada Data)	Bapelit Bangda	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\% = 0\%$	Bapelit Bangda	
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\% = 0\%$	Bapelit Bangda	
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan strategis teramankan}}{\text{Jumlah kegiatan strategis yang ada}} \times 100\% = 0$	Diskominfo	
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsipprinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah SE yang ada}} \times 100\% = 0$	Diskominfo	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan	<i>Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah</i>	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		resiko kategori rendahx100%=0 <i>Jumlah SE yang ada</i>		
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	<i>Jumlah titik teramankan</i>x100%=0 <i>Jumlah titik pada PHKS</i>	Diskominfo	
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Ada 5 obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	Disbud	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Pengkajian sebanyak 1 Karya Budaya	Disbud	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	2 Obyek Pemajuan Kebudayaan	Disbud	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	5 Sekaa/sanggar seni, 5 cabang lomba sastra (199 orang)	Disbud	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	(tidak ada data)	Disbud	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan,	(tidak ada data)	Disbud	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)			
		Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	(tidak ada data)	Disbud	
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	(tidak ada data)	Disbud	
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	(tidak ada data)	Disbud	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	(tidak ada data)	Disbud	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	(tidak ada data)	Disbud	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	(tidak ada data)	Disbud	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	(tidak ada data)	Disbud	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	(tidak ada data)	Disbud	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Ada 4 Orang Anggota, dengan didukung oleh Keputusan Bupati Karangasem Nomor 13/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Karangasem Tahun 2019	Disbud	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	(tidak ada data)	Disbud	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	(tidak ada data)	Disbud	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	(tidak ada data)	Disbud	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	(tidak ada data)	Disbud	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	(tidak ada data)	Disbud	
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi Perpustakaan dengan penduduk	<i>Koleksi perpustakaan yang tersediadi berbagai perpustakaan di wilayahnya(dalam eksemplar)</i> 14.471 -----x100%= 2,78% <i>Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)</i> 519.998	Dis Pustaka Arsip	
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	<i>Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkanperpustakaan baik secara online maupunonsite</i> 956 -----x100%= 0,18% <i>Jumlah penduduk di wilayahnya</i> 519.998	Dis Pustaka Arsip	
		Rasio ketercukupan tenaga Perpustakaan dengan penduduk	<i>Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya</i> 455 -----x100%= 0,08% <i>Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)</i> 919.998	Dis Pustaka Arsip	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	<i>Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan</i> 455 -----x100%= 0,08% <i>Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya</i> 519.998	Dis Pustaka Arsip	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	100 Orang		
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi /dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	(Tidak Ada Data)	Dis Pustaka Arsip	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	49 Naskah	Dis Pustaka Arsip	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/ atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2.878 Item	Dis Pustaka Arsip	
24	Kearsipan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i> 45	Dis Pustaka Arsip	
			-----x100%=100%		
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	<i>Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</i> 81	Dis Pustaka Arsip	
			-----x100%=100%		
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	<i>Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</i> 0	Dis Pustaka Arsip	
			-----x100%=0%		
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	<i>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</i> 95	Dis Pustaka Arsip	
			-----x100%=100%		
			<i>Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan provinsi</i> 95		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	(Tidak Ada Data)	Dis Pustaka Arsip	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	(Tidak Ada Data)	Dis Pustaka Arsip	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/Kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	(Tidak Ada Data)	Dis Pustaka Arsip	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	(Tidak Ada Data)	Dis Pustaka Arsip	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	(Tidak Ada Data)	Dis Pustaka Arsip	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	(Tidak Ada Data)	Dis Pustaka Arsip	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	(Tidak ada data)	Dis Perikanan	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah}} \times 100\% = 0$	Dis Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<i>Kabupaten Kota</i>		
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	10 Ijin Usaha Perikanan	Dis Perikanan	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan Pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ Penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	9 Kelompok Pembudidaya Ikan	Dis Perikanan	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	1.064.200 benih budidaya ikan	Dis Perikanan	
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	77 DTW	Dispar	
		Jumlah kelengkapan Infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	18 DTW	Dispar	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/ kota	30 TUDP	Dispar	
		Jumlah wisatawan Mancanegara per kebangsaan	171.353 Wisatawan	Dispar	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	1 Kali	Dispar	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti	0 (Tidak event yang diikuti)	Dispar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota			
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	15 Industri Pariwisata	Dispar	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	<i>Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi</i> 520 ----- = -----x100%= 100% <i>Jumlah tenaga kerja pariwisata</i> 520	Dispar	
		Persentase SDM peserta Pembekalan sektor kepariwisataan	<i>Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan</i> 1.100 ----- = -----x100%= 100% <i>Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan</i> 1.100	Dispar	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10 Lokasi	Dispar	
27	Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	1. Jumlah Sarana Pertanian = 14 Jenis Sarana yang diberikan 2. Jumlah Prasarana Pertanian = 14 Jenis Prasarana yang diberikan	Dis Pertanian	
		Prasaran pertanian yang digunakan	Semua Prasarana yang disalurkan oleh Dinas Pertanian digunakan oleh petani	Dis Pertanian	
		Penerbitan izin usaha pertanian	(Tidak Ada Data)	Dis Pertanian	
		Persentase prasarana yang digunakan	<i>Jumlah prasarana yang aktif digunakan</i> 18 ----- = -----x100%= 100% <i>Jumlah prasarana yang dibangun</i> 18	Dis Pertanian	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	<i>Jumlah usulan yang difasilitasi</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah usulan usaha pertanian</i>	Dis Pertanian	
		Persentase fasilitasi Penanggulangan	<i>Jumlah area yang dapat ditanggulangi</i> 848 ----- = -----x100%= 97,13%	Dis Pertanian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		bencana	<i>Luas area terkena bencana</i> 873		
28	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura			
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			
		Pemulihan ekosistem pada Tahura			
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	Bag. Ekonomi	
30	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	<i>Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</i> -----x100%= 0% <i>Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</i> <i>Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja</i> -----x100%= 0% <i>Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar</i>	Disperindag	
		Persentase penerbitan TDG	<i>Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja</i> 1 -----= ---x100%=11,11% <i>Jumlah permohonan penerbitan TDG</i> 9	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	<p><i>Jumlah penerbitan TDG</i> 9 -----x100%=100%</p> <p><i>Jumlah gudang yang ada di Kab Kota</i> 9</p>	Disperindag	
		<p>Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :</p> <p>a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</p> <p>b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> <p>c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p>	<p><i>Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> -----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</i></p> <p><i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> -----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</i></p> <p><i>Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar</i> -----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</i></p>	Disperindag	
		Persentase pemeriksaan Fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	<p><i>Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota</i> -----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer</i></p>	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	<p><i>Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja (1 x 24 jam)</i> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\% = 0\%$</p> <p><i>Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar</i></p>	Disperindag	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana Distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\% = (0,5+0,5) \times 100\% = 100\%$	Disperindag	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Daftar Koefisien Harga	Disperindag	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{b \times c} \times 100\% = \frac{5.304,63}{10.640,20 \times 11.822,44} = 0,0042\%$	Dis Pertanian	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	<p><i>Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan</i> 308</p> <p>$\frac{308}{8.438} \times 100\% = 3,65\%$</p> <p><i>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab Kota</i> 8.438</p>	Disperindag	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	<p><i>Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku</i> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\% = 0\%$</p> <p><i>Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan</i></p>	Disperindag	
31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan	<p><i>Jumlah realisasi izin yang diterbitkan</i> $\frac{\dots}{\dots} \times 100\% = 0\%$</p> <p><i>Jumlah permohonan atau pengajuan</i></p>	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	<i>izin yang masuk</i>		
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	0%	Disperindag	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\% = \frac{0}{0} = 100\%$	Disperindag	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\% = 0\%$	Disperindag	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota di SIINas}}{\text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab Kota}} \times 100\% = 0\%$	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Disnaker	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Disnaker	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Disnaker	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD } 6.375}{\text{jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi } 14.547 \text{ yang bersangkutan}} \times 100\% = 46,30\%$	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar } 40.920}{\text{jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi } 41.158 \text{ yang bersangkutan}} \times 100\% = 99,42\%$	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan	$\frac{\text{jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama } 17.097}{\text{jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan } 20.366} \times 100\% = 83,95\%$	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	$\frac{\text{jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan } 74.308}{\text{jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan } 83.420} \times 100\% = 89,08\%$	Disdikpora	
2	Kesehatan	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{jumlah daya tampung rumah sakit rujukan } 355}{\text{jumlah penduduk di kabupaten/kota } 519.998} \times 100\% = 0,068$	Diskes	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	$\frac{\text{jumlah RS Rujukan yang terakreditasi } 3}{\text{jumlah RS di kabupaten/kota } 3} \times 100\% = 100\%$	Diskes	
		Persentase ibu hamil mendapatkan	$\frac{\text{jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan } 6.598}{\text{jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan } 6.598} \times 100\% = 100\%$	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}}{\text{jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100\% = 95,43\%$ 6.914		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota}} \times 100\% = 104,86\%$ 6.920 6.599	Diskes	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota}} \times 100\% = 106,14\%$ 6.671 6.285	Diskes	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah balita di kabupaten/kota}} \times 100\% = 90,81\%$ 23.007 25.334	Diskes	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	$\frac{\text{jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota}} \times 100\% = 45,15\%$ 28.719 63.602	Diskes	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota}} \times 100\% = 37,80\%$ 95.743 253.300	Diskes	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai	$\frac{\text{jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota}} \times 100\% = 52,82\%$ 33.133 62.732	Diskes	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	$\frac{\text{jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}} \times 100\%$ 44.379	Diskes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sesuai standar	----- Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota 86.791 -----x100%= 51,13%		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 3.815 ----- Jumlah penderita DM di kabupaten/kota 4.427 -----x100%= 86,18%	Diskes	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1.051 ----- Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota 1.255 -----x100%= 83,75%	Diskes	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 924 ----- Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota 2.327 -----x100%= 39,71%	Diskes	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar 5.535 ----- Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota 7.669 -----x100%= 72,17%	Diskes	
3	Pekerjaan Umum	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) 127.73 Ha ----- Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) 864 Ha -----x100%=14,78%	Dis PUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) 11,63	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) 63,80 -----x100%=18,23%		
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan danelihara (ha) 280,17 Ha -----x100%= 5,92% luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota 4.727 Ha	Dis PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota 437.250 jiwa -----x100%=92,67% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut 471.820 jiwa	Dis PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD 3.237 +123.861 -----x100%= 89,96% Jumlah rumah di Kabupaten Kota 141.281 KK	Dis PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya 99 -----x100%= 4,37% Jumlah IMB yang berlaku 2.262	Dis PUPR	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap 852,27 Km -----x100%= 70,87% Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota 1.202,54 Km	Dis PUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan	Dis PUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	<i>sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</i> 9 -----x100%= 60% <i>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota</i> 15		
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	<i>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</i> 0 -----x100%= 0% <i>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya</i> 39	Dis PUPR	
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n</i>	Dis Perkim	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	<i>Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</i>	Dis Perkim	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	<i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</i> 79,90 -----x100%= 643,84% <i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha</i> 12,41	Dis Perkim	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	<i>Jumlah unit rumah tidak layak huni.</i> 8.121 -----x100%=3,21% <i>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota</i> 253.171	Dis Perkim	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	<i>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</i> -----x100%= 0 <i>Jumlah unit rumah kab/kota</i>	Dis Perkim	
5	Ketentraman, Ketertiban umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	<i>Jumlah pengaduan yang ditangani</i> 55 -----x100%= 91,67% <i>Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk</i> 60	Satpol PP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	dan Perlindungan Masyarakat				
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\% = 100\%$	Satpol PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 519.998 Orang	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 519.998 Orang	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 18 Orang	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota}} \times 100\% = 30,30\%$	Dis Damkar	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran = 1.857/66 = 17,53menit	Dis Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	<p><i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i> 496</p> <p>-----x100%= 7,45%</p> <p><i>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis</i> 6.662</p>	Disos	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<p><i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i> 70</p> <p>-----x100%= 100%</p> <p><i>kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota</i> 70</p>	Disos	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	<p><i>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD</i> 32</p> <p>-----x100%= 100%</p> <p><i>jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota</i> 32</p>	Disnaker	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	<p><i>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi</i> 2.239</p> <p>-----x100%= 11,18%</p> <p><i>Jumlah tenaga kerja keseluruhan</i> 20.021</p>	Disnaker	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	<p><i>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)</i> 11.134.797.000.000</p> <p>-----x100%= 55.615.588.632%</p> <p><i>jumlah tenaga kerja</i> 20.021</p>	Disnaker	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	<p><i>Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak</i> 1.398</p> <p>-----x100%= 35,90 %</p> <p><i>Jumlah perusahaan</i> 3.894</p>	Disnaker	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam	<p><i>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan</i> 836</p> <p>-----x100%= 81,80%</p> <p><i>Jumlah pencaker yang terdaftar</i> 1.022</p>	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Wilayah Kabupaten/Kota			
8	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	<i>Jumlah ARG pada belanja langsung APBD</i> 129.165.000,00x100%= 0,022% <i>Jumlah seluruh belanja langsung di APBD</i> 583.078.720.080,96	DP3A	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	<i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi</i> 9x100%= 5,96% <i>Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)</i> 150.884	DP3A	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	<i>Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan</i> 12x100%= 0% <i>Jumlah penduduk perempuan</i> 256.441	DP3A	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	<i>Jumlah cadangan pangan</i> 59.867,70x100%=103,20% <i>Jumlah kebutuhan pangan</i> 58.021,38	Dis Pangan	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	<i>Luas tanah sesuai peruntukkan izin lokasi</i>x100%= 0 <i>Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi</i>		
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	<i>Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i>x100%= 0 <i>Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum</i>		
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	<i>Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi</i>x100%= 0 <i>Luas izin lokasi yang diterbitkan</i>		
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari	<i>Jumlah penerima tanah obyek landreform dngan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha</i> 2x100%= 3,28%		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	<i>jumlah penerima tanah obyek landreform</i> 61		
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	<i>Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah</i>x100%= 0 <i>Luas izin membuka tanah yang diterbitkan</i>		
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	<i>Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani</i> 3=x100%=100% <i>Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan</i> 3		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	<i>IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) = 66,27</i> <i>IKA = Indeks Kualitas Air</i> <i>IKD = Indeks Kualitas Udara</i> <i>ITH = Indeks Tutupan Hutan</i>	Dis LH	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	<i>Total volume sampah yang dapat ditangani</i> 81.180,48=x100%= 89,14% <i>total volume timbunan sampah kabupaten/kota</i> 91.067,5	Dis LH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	<i>Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota</i> 0=x100%=0% <i>usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan</i> 90	Dis LH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	<i>jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP</i> 365.455x100%= x 100% = 96,87% <i>Jumlah penduduk 17 tahun ke atas</i> 377.239	Disdukcapil	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	<i>Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA</i> 26.960x100%=x 100% = 18,87% <i>Jumlah anak usia 0-17 tahun</i> 142.769	Disdukcapil	
		Kepemilikan akta kelahiran	<i>Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir</i> 144.217 x100%=x 100% = 90,56% <i>Jumlah anak usia 0-18 tahun</i> 159.242	Disdukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	<p><i>Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama</i></p> <p>22 -----x100%= 44,89%</p> <p><i>Jumlah OPD</i> 49</p>	Disdukcapil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	<p><i>Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun</i></p> <p>-----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)</i></p>	Dis PMD	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	<p><i>Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun</i></p> <p>3 -----x100%= 5,45%</p> <p><i>Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)</i> 55</p>	Dis PMD	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	<p>TFR Karangasem = 2,39</p> $s \sum_{t=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur <i>b_i</i> = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur <i>i</i> pada tahun tertentu <i>p_i</i> = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur <i>i</i> pada pertengahan tahun yang sama <i>i</i> = kelompok umur (<i>i</i>=1 untuk kelompok umur 15-19, <i>i</i>=2 untuk kelompok umur 20-24, ..., <i>i</i>=7 untuk kelompok Umur 45-49) <i>K</i> = Bilangan Konstanta biasanya 1000</p>	Dis PPKB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	<p><i>Jumlah peserta KB aktif modern</i> 75.904 -----x100%= 85,65%</p> <p><i>Jumlah Pasangan Usia Subur</i> 88.620</p>	Dis PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	1.950 -----X100%= 2,20% 88.620	Dis PPKB	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	<p><i>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut ▪ IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP ▪ Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil ▪ Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5 <p><i>Rasio konektivitas Kabupaten Karangasem (0,89x50)+(1x50) = 94,5</i></p>	Dishub	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten Karangasem (0,60<V/C<0,70)	Dishub	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung	<p><i>Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</i></p> <p>53</p>	Diskominfo	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\% = 100\%$ 53		
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\% = 9,4\%$ 5 53	Diskominfo	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100\% = 27,76\%$ 144.390 519.998	Diskominfo	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang m.eningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\% = 67,29\%$ 142 211	Dis Koperasi	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\% = 100\%$ 57.456 57.456	Dis Koperasi	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	$\frac{\text{Jumlah inestasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota}} \times 100\% = 14,99\%$ (259.778.669.265 - 225.908.255.089) 22. (225.908.255.089)	DPMPPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota}} \times 100\% = 0,04\%$ 30 84,848	Disdikpora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota}} \times 100\% = 0,73\%$ 616	Disdikpora	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			<i>Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota</i> 84.848		
		Peningkatan Prestasi Olahraga	<i>Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional = 0 (Tidak Ada Data)</i>	Disdikpora	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	<i>(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</i> 50 OPD ----- x100%=100 % <i>Jumlah OPD</i> 50 OPD	Bapelit Bangda	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	<i>(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</i> 50 OPD ----- x100%= 100 % <i>Jumlah OPD</i> 50 OPD	Bapelit Bangda	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	<i>Jumlah nilai per area keamanan informasi</i> ----- x100%= 0% <i>Jumlah area penilaian</i>	Diskominfo	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	<i>Jumlah cagar budaya yang dilestarikan</i> 70 ----- x100%= 20,53% <i>Jumlah cagar budaya yang terdata</i> 341	Disbud	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	<i>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat = (0)</i>	Dis Pustaka Arsip	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<i>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) = (0)</i> UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan <i>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =</i> $\sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100$	Dis Pustaka Arsip	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai	$T = (a + i + s + j) / 4 = (100 + 100 + 0 + 63) / 4 = 66\%$ T = Tingkat ketersediaan arsip	Dis Pustaka	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Arsip	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6 = (0)$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	Dis Pustaka Arsip	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	<i>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)</i> 26.224,56 Ton	Dis Perikanan	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\% = \frac{171.353 - 234.903}{234.903} \times 100\% = -27\%$	Dispar	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\% = \frac{368.570 - 381.752}{381.752} \times 100\% = -3,5\%$	Dispar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual 304 -----X100%=8,01% Jumlah kamar yang tersedia 3.794	Dispar	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku = 2.011.223.000.000,00	Dispar	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Sektor Pariwisata 15.803.524.889,38 -----x100%= 7,21% Total PAD 219.176.733.602,34	Dispar	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun 137.511,81 -----X100%= 587,43% Luas panen 23.408,97	Dis Pertanian	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya 10.036-11.129 -----X100%=-9,82% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) 11.129	Dis Pertanian	
28	Kehutanan	-			
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin -----x100%=0% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	Bag. Ekonomi	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan 2 -----x100%=100% Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota 2	Disperindag	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi 5.304,63 -----x100%=44,87% RDKK 11.822,44	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	<p><i>Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan</i> 308</p> <p>-----x100%=3,65%</p> <p><i>Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota</i> 8.438</p>	Disperindag	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	<p><i>Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n-jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1</i> 14.935-14.935</p> <p>-----x100%=0%</p> <p><i>Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1</i> 14.935</p>	Disperindag	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator	<p><i>Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%</i></p> <p><i>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%</i></p> <p><i>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut = 0%</i></p>	Disperindag	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	<p><i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i></p> <p>-----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i></p>	Disperindag	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	<p><i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i></p> <p>-----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i></p>	Disperindag	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri	<p><i>Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan</i></p> <p>-----x100%= 0%</p> <p><i>Jumlah izin yang dikeluarkan</i></p>	Disperindag	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota			
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>1) Keterkinian informasi industri : 0</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi : 0</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energy (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi investasi (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2) (0%+20%)=20%</p>	Disperindag	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsdi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	<i>Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan</i> 265.325.646.969,62 ----- <i>Jumlah APBD</i> 1.276.165.813.851,82 ----- x100%=20,79%	BPKAD	
		Rasio PAD	<i>Jumlah PAD</i> 219.176.733.602,34 ----- <i>Jumlah APBD Non Migas</i> 1.480.619.791.676,96 ----- x100%=14,8%	BPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Itda	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Itda	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	<i>Jumlah belanja urusan pemerintahan-transfer expenditures</i> 920.744.753.666,75 ----- <i>Jumlah belanja APBD</i> 1.276.165.813.851,82 ----- x100%=72,15%	BPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	Tahun 2010 Opini Disclaimer Tahun 2011 Opini Wajar dengan pengecualian Tahun 2012 Opini Wajar dengan pengecualian Tahun 2013 Opini Wajar dengan pengecualian Tahun 2014 Opini Wajar dengan pengecualian Tahun 2015 Opini Wajar tanpa pegecualian Tahun 2016 Opini Wajar tanpa pegecualian Tahun 2017 Opini Wajar tanpa pegecualian Tahun 2018 Opini Wajar tanpa pegecualian Tahun 2019 Opini Wajar tanpa pegecualian	BPKAD	

No	Fungsdi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	<i>Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n</i> ----- 0 -----x100%= 0% <i>Jumlah kontrak keseluruhan tahun n</i> 30	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	<i>Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif</i> ----- 30 -----x100%= 4,27% <i>Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif</i> 702	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	<i>Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan</i> ----- 27.506.896.863,64 -----x100%=5,27% <i>Total belanja langsung</i> 522.357.988.512,13	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<i>Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas</i> ----- 984 -----x100%=103,25% <i>Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah</i> 953	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<i>Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)</i> ----- 126 Orang -----x100%= 6,90% <i>Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i> 1.826 Orang	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<i>Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi</i> ----- 126 Orang -----x100%= 100% <i>Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)</i> 126 Orang	BKPSDM	

No	Fungsdi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
4	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[\left(\frac{1.276.165.813.851,00}{1.276.165.813.851,51}\right)-1\right] \times 100\% = 0\%$	BPKAD	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[\left(\frac{219.176.733.602,00}{219.176.733.602,34}\right)-1\right] \times 100\% = 0\%$	BPKAD	
		Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	BPKAD	
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	<i>Nilai realisasi SiLPA Total</i> 119.255.330.199,66 ----- = -----x100% = 7,29% <i>belanja anggaran tahun sebelumnya</i> 1.635.821.925.442,27	BPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	<i>Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda</i> 40 ----- = -----x100% = 100% <i>realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda</i> 40	BPKAD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	<i>Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda</i> 13 ----- = -----x100% = 100% <i>Total jumlah dokumen yang telah dirinci</i> 13	BPKAD	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun yang termuat dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yakni adanya Target Kinerja dalam perjanjian kinerja, yang dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5

Target Kinerja dalam perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Tujuan 1 : Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas				
1	Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 (Sembilan) tahun	1.1 Persentase penduduk buta aksara	%	14
2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan SD sampai dengan SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal	2.1 Jumlah satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	%	100
		2.2 Jumlah satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	%	85
3	Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya tingkat kelulusan SD, SMP dan SMA/SMK atau sederajat	3.1 Persentase kelulusan SD/MI paket A	%	100
		3.2 Persentase kelulusan SMP/MTs paket B	%	100
4	Meningkatnya prestasi murid SD dan SMP serta meningkatnya angka partisipasi sekolah	4.1 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100
		4.2 Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99
5	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Karangasem	5.1 APK perguruan tinggi	%	14,75
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)				
6	Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan derajat pendidikan.	6.1 Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,41

Tujuan 3 : Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas					
7	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	8.1	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	%	95
8	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	9.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	7
		9.2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	90
		9.3	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	8
		9.4	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	8
9	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan	10.1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	95
Tujuan 4: Meningkatkan peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.					
10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.	11.1	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	%	85
11	Meningkatnya disiplin PNS	12.1	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	%	100
12	Meningkatnya kompetensi dan profesional PNS	13.1	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	%	65
13	Meningkatnya kinerja laporan keuangan perangkat daerah	14.1	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	A
14	Meningkatnya prestasi PNS dan menurunnya jumlah penerima sanksi	15.1	Persentase aparatur yang disiplin	%	100
15	Meningkatnya kualitas aparatur desa melalui bintek dan pelatihan	16.1	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	%	90
16	Meningkatnya kesejahteraan aparatur desa sesuai peraturan perundang-undangan.	17.1	Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan	Orang	226
17	Meningkatnya pendampingan teknis pengelolaan pembangunan bagi Desa Pekraman.	18.1	Jumlah desa yang melaksanakan BBGRM	Desa	75
Tujuan 5 : Meningkatkan kualitas sikap mental dan kultur masyarakat yang Bersih dan Bermartabat.					
18	Meningkatnya partisipasi desa pakraman dan organisasi tradisional dan kemasyarakatan dalam pengembangan budaya yang mendukung Karangasem Bersih dan Bermartabat	19.1	Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	Sekaa	50
19	Meningkatnya kompetensi lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	20.1	Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan daerah	lembaga	3

20	Meningkatnya partisipasi para tokoh masyarakat lembaga pemerintah, lembaga adat dan kelompok lainnya yang mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	21.1	Jumlah tokoh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Kelompok	8
Tujuan 6 : Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.					
21	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan dan rumah layak huni bagi keluarga miskin	22.1	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	%	10
		22.2	Rasio rumah layak huni	Rasio	0,00166
22	Meningkatnya ketersediaan dan ketersediaan sarana dan prasarana utilitas umum, panjang jalan dalam kondisi baik.	23.1	Terbangunnya jalan kabupaten (Km)	Km	873,326
		23.2	Jumlah Desa Rawan Air	Desa	0
23	Meningkatnya usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin	24.1	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	Orang	6500
Tujuan 7 : Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.					
24	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan/pertanian (produksi sektor pertanian).	25.1	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Ton	274610,89
25	Meningkatnya sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	26.1	Jumlah prasarana yang disalurkan	Unit/kelompok Ton	700
		26.2	Jumlah sarana yang disalurkan		130.479
26	Meningkatnya pengembangan menghasilkan varietas baru tanaman pertanian	27.1	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	%	97
27	Meningkatnya angka kecukupan pangan	28.1	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	98,51
28	Meningkatnya produksi perikanan	29.1	Jumlah produksi perikanan	Ton	28.660
Tujuan 8 : Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.					
29	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan	30.1	Rata-rata lama pelayanan perizinan	Hari	3
30	Meningkatnya jumlah investasi	31.1	Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	US\$	2.634.705
		31.2	Nilai investasi Dalam Negeri	Juta Rp	170.065
31	Meningkatnya industri kecil menengah dan kerajinan rumah tangga	32.1	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	%	19

32	Meningkatnya perdagangan dalam negeri	33.1	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	%	100
33	Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD	34.1	Tingkat cakupan pelayanan PDAM	%	50,7
34	Meningkatnya daya saing pasar tradisional	35.1	Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	%	90
Tujuan 9 : Meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi.					
35	Meningkatnya modal usaha kecil, menengah dan koperasi	36.1	Persentase pembinaan koperasi yang berprestasi	%	100
36	Meningkatnya koperasi yang aktif	37.1	Persentase koperasi aktif	%	87
37	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro, UKM dan koperasi	38.1	Persentase penguatan kualitas dan pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	%	100
38	Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, dan pedagang kecil	39.1	Cakupan perkembangan usaha mikro kecil menengah yang dibantu kredit perbankan	%	100
Tujuan 10 : Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.					
39	Meningkatnya daya tarik wisata yang sedang berkembang	40.1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	DTW	7
40	Meningkatnya penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata	41.1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang tertata	DTW	5
41	Meningkatnya promosi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri	42.1	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	%	25
Tujuan 11 : Meningkatkan kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.					
42	Meningkatnya pengembangan pariwisata spiritual	43.1	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata alternatif	DTW	15
43	Meningkatnya pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan	44.1	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Kelompok	18
Tujuan 12 : Meningkatkan pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.					
44	Meningkatnya ketersediaan perencanaan tata ruang	45.1	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	%	100

45	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam	46.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	68,5
46	Meningkatnya efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi eks galian C	47.1	Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina (pengusaha)	%	100
Tujuan 13 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan.					
47	Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, irigasi terutama kawasan perdesaan	48.1	Persentase terlaksananya pembangunan infrastruktur	%	89
Tujuan 14 : Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.					
48	Meningkatnya pengelolaan persampahan	49.1	Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalapura	%	84,5
49	Meningkatnya kualitas ruas jalan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif	50.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	1,479,36 Km / 227.203 unit
Tujuan 15 : Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.					
50	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan	51.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	%	87
51	Meningkatnya kualitas trotoar, penerangan jalan dan taman	52.1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	Tidak Diukur
Tujuan 16 : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.					
52	Meningkatnya bantuan keuangan kepada lembaga agama dan adat	53.1	Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	%	100
53	Meningkatnya kualitas dan peranan lembaga agama dan adat melalui pembinaan dan penyuluhan	54.1	Persentase pembinaan sekaa truna di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi	%	100
54	Meningkatnya koordinasi serta peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam mewujudkan Karangasem yang Bermartabat	55.1	Jumlah pertemuan FKUB	Kali per tahun	2
55	Meningkatnya kapasitas lembaga pesraman di masing-masing Desa Pakraman	56.1	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina	Desa	7
56	Meningkatnya sarana dan prasarana tempat ibadah	57.1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	9,270
57	Meningkatnya sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan	58.1	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	Buah	10
Tujuan 17 : Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, pemuda dan olahraga.					

58	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar & kaum lansia	59.1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMK5) yang mengalami peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan keberfungsian social	Orang	618 or 1 LKSA 78 Unit
59	Meningkatnya kualitas layanan terhadap kaum perempuan	60.1	Indeks Pemberdayaan Gender	%	61,98
		60.2	Indeks Pembangunan Gender	Angka	76,92
60	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	61.1	Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	%	50
61	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, generasi muda, kepemudaan dan keolahragaan	62.1	Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Spesific Fertility Rate)	Per 1000 Penduduk	30 per 1000
		62.2	Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	%	93
Tujuan 18 : Meningkatkan kualitas seni dan budaya masyarakat.					
62	Meningkatnya kualitas dan pengembangan seni dan budaya yang hampir punah	63.1	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisinwarisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	%	1
62	Meningkatnya perlindungan asset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada dimasyarakat	64.1	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	%	100
63	Meningkatnya kreatifitas dan atraksi seni dan budaya	65.1	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	Kali per tahun	12
64	Meningkatnya seni budaya berbasis desa pakraman dalam rangka mendukung PKB	66.1	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pakraman yang ikut pesta kesenian bali	Kelompok	200
65	Meningkatnya penghargaan terhadap para seniman, budayawan dan penggiat seni lainnya	67.1	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Seniman	112
Tujuan 19 : Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi					
67	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan demokrasi	68.1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pilukada	%	92
68	Meningkatnya advokasi dan pendidikan politik masyarakat	69.1	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	%	100
69	Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal	70.1	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	%	75

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem 2016-2021 yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran belanja daerah tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Karangasem tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Adapun pengukuran capaian kinerja masing - masing sasaran dan indikator sasaran dibandingkan dengan target perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

tujuan yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Tujuan 1
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas

	Indikator Sasaran	Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penduduk Buta Aksara	%	14	14,61	95,64
2	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	%	100	8,3	8,3
3	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	%	85	2,08	2,45
4	Persentase kelulusan SD/MI paket A	%	100	100	100
5	Persentase kelulusan SMP/MTs paket B	%	100	100	100
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	100	99,71	99,71
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	99	83,95	105,5
Rata- rata capaian Kinerja					73,09

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 73,09 % yang dikategorikan baik.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B tercapai 8,3% dari target 100%
- Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B tercapai 2,08% dari target 85%

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Tujuan 2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Indikator Sasaran		Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,41	Blm ada data dr BPS	Blm ada data dr BPS
Rata- rata capaian Kinerja					

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 belum dapat disajikan sehingga belum dapat disajikan dengan kategori penilaian masih menunggu data dari BPS.

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Tujuan 3
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas

Indikator Sasaran		Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	(%)	95	15	15,79
2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	(%)	7	6,43	108,14
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	90	107,34	80,73
4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	8	0,58	192,75
5	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Per 1000	8	5,47	131,63

	per 1000 kelahiran hidup	KH			
6	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	(%)	95	93	97,89
Rata- rata capaian Kinerja					128,31

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 128,31% yang dikategorikan baik sekali.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling) tercapai 15% dari target 95%
- Angka Kematian Ibu (AKI) tercapai 107,34 Per 100.000 KH dari target yang ditetapkan 90 Per 100.000 KH
- Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas tercapai 93% dari target yang ditetapkan 95%

Tabel 2.9
Capaian Kinerja Tujuan 4
Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/aparatur	%	100	100	100
3	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	%	65	25	38,46
4	Nilai evaluasi AKIP	Predikat	A	B	85,06
5	Persentase aparatur yang disiplin	%	100	99,97	99,97
6	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	%	90	0	0
7	Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan	Orang	226	0	0
8	Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	desa	75	0	0
Rata- rata capaian Kinerja					52,94

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 52,94% yang dikategorikan kurang.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan tercapai 25% dari target 65%
- Nilai evaluasi AKIP terealisasi B dari target A
- Persentase aparatur yang disiplin tercapai 99,97% dari target 100%

Sedangkan indikator

- Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya
- Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan
- Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Tercapai 0 dikarenakan wewenang sudah dikerjakan oleh masing-masing desa

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Tujuan 5
Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat.

Indikator Sasaran	Satuan	2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	sekaa	50	0	0
2 Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	lembaga	3	0	0
3 Jumlah tokoh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Orang/kelompok	8 kelompok	8	100
Rata-rata capaian Kinerja				33,33

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 33,33% yang dikategorikan kurang.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun terrealisasi 0 dikarenakan refocusing anggaran untuk penanggulangan covid 19
- Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah dikarenakan refocusing anggaran untuk penanggulangan covid 19

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Tujuan 6
Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan

Indikator Sasaran	Satuan	2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	%	10	6	60
2 Terbangunnya jalan kabupaten	Km	873.326	887.026	101.57
3 Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	Orang	6500	300	4,62
Rata- rata capaian Kinerja				55,40

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 55,40% yang dikategorikan kurang.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan terealisasi 6% dari 10% yang ditargetkan
- Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani terrealisasi 300 orang dari target 6500 orang

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Tujuan 7
Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.

Indikator Sasaran	Satuan	2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Ton	274610,89	106042,19	38,62
2 Jumlah prasarana yang disalurkan	Unit/	700	54	7,72
3 Jumlah sarana yang disalurkan	Ton	130.479	5.809,78	4,44
4 Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	%	97	97	100
5 Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	89	89,1	100
6 Jumlah produksi perikanan	Ton	27315	26224	96.01
Rata- rata capaian Kinerja				50,16

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 50,16% yang dikategorikan kurang.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah) terealisasi 106.042,19 Ton dari target 274.610,89 Ton
- Jumlah prasarana yang disalurkan terealisasi 54 Unit dari target 700 Unit
- Jumlah sarana yang disalurkan terrealisasi 5.809,78 Ton dari target yang ditetapkan 130.479Ton
- Jumlah produksi perikanan terealisasi 26.224 Ton dari target 27.315 Ton

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Tujuan 8
Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.

Indikator Sasaran	Satuan	2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Rata-rata lama pelayanan perizinan	hari	3	7	42,86
2 Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	US\$	2634705	1255250	47,64
3 Nilai investasi (juta Rp)	Juta Rp	170065	142285	83,67
4 Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	%	19	8,42	62
5 Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuh pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	%	100	70,53	70,53
6 Tingkat cakupan pelayanan PDAM	%	50,7	34,32	67,69
7 Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	%	90	68,75	76,39
				69,15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 69,15% yang dikategorikan Cukup.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Rata-rata lama pelayanan perizinan terealisasi 7 hari dari target 3 hari
- Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$ terealisasi US\$ 1.255.250 dari target US\$ 2.634.705
- Nilai investasi (juta Rp) terealisasi Rp.142.285.000.000 dari target Rp. 170.065.000.000
- Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM terealisasi 8,42% dari target 19%
- Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuh pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen terealisasi 70,53% dari target 100%
- Tingkat cakupan pelayanan PDAM terealisasi 34,32 % dari target 50,7%

- Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar terealisasi 68,75% dari target 90%

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Tujuan 9
Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

	Indikator Sasaran	Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pembinaan koperasi yang berprestasi	%	100	100	100
2	Persentase koperasi aktif	%	87	80	91,95
3	Persentase penguatan kualitas dan pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	%	100	100	100
4	Cakupan perkembangan usaha mikro kecil menengah yang dibantu kredit perbankan	%	100	100	100
Rata- rata capaian Kinerja					97,99

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 97,99% yang dikategorikan Baik.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Persentase koperasi aktif terealisasi 80% dari target 87%

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Tujuan 10
Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.

	Indikator Sasaran	Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	DTW	7	0	0
2	Jumlah daya tarik wisata yang tertata	DTW	5	18	360
3	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	%	25	16	64
Rata- rata capaian Kinerja					141,33

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 141,33% yang dikategorikan Baik Sekali.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan terealisasi 0 DTW dari target 7 DTW
- Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem terealisasi 16% dari target 25%

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Tujuan 11
Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

Indikator Sasaran	Satuan	2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Jumlah Desa wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan alternatif	DTW	3	3	100
2 Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Kelompok	3	3	100
Rata-rata capaian Kinerja				100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% yang dikategorikan Baik.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Tujuan 12
Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.

Indikator Sasaran	Satuan	2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	%	100	100	100
2 Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	68	66,27	97,46
3 Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C	%	100	100	100

	yang terbina (pengusaha)				
	Rata- rata capaian Kinerja				99,15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99,15% yang dikategorikan Baik.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Indeks kualitas lingkungan hidup terealisasi 66,27 dari target 68

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Tujuan 13
Meningkatnya pembangunan infrastruktur pedesaan.

Indikator Sasaran	Satuan	2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Persentase terlaksananya pembangunan infrastruktur	%	89	Tidak dihitung	Tidak dihitung
Rata- rata capaian Kinerja				0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 tidak dapat disajikan dikarenakan kewenangan pembangunan infrastruktur pedesaan telah dikelola langsung oleh kedesaan masing-masing.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Tujuan 14
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.

Indikator Sasaran	Satuan	2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalapura	%	84,5	50,35	59,58
2 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	1.479,36 Km/227.203	1.446,39 Km/211.821	95,50
Rata- rata capaian Kinerja				77,54

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99,15% yang dikategorikan Baik.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalapura terealisasi 50,35% dari target 84,5%
- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan terealisasi 1.479,36 Km/ 227.203 dari target 1.446,39 Km/ 211.821

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Tujuan 15
Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.

	Indikator Sasaran	Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	Tidak diukur	-	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 tidak dapat disajikan dikarenakan kewenangan pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan telah dikelola langsung oleh kedesaan masing-masing.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Tujuan 16
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.

	Indikator Sasaran	Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	%	100	100	100
2	Jumlah pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	kali per tahun	2	2	100
3	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina	Desa	1	1	100
4	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	buah	14	14	100
Rata-rata capaian Kinerja					100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% yang dikategorikan Baik.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Tujuan 17
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Sasaran		Satuan	2020		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMK5) yang mengalami peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan keberfungsian sosial	Orang	618	550	89
		LKSA	1	1	100
		unit	78	78	100
2	Indeks Pemberdayaan Gender	%	61,98	60,77	98,05
3	Indeks Pembangunan Gender	Angka	76,92	88,87	115,54
4	Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	%	50	70,58	58,84
5	Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Spesific Fertility Rate)	Per 1000 penduduk	30 per 1000	38 per 1000	73,33
6	Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	%	93	97,00	104
Rata- rata capaian Kinerja					92,35

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 92,35% yang dikategorikan Baik.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Indeks Pemberdayaan Gender terealisasi 60,77 dari target 61,98
- Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan terealisasi 70,58% dari target 50%
- Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Spesific Fertility Rate) 38 per 1000 dari target 30 per 1000

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Tujuan 18
Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat.

Indikator Sasaran	Satuan	2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisinwarisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	%	100	100	100
2	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	%	100	0	0
3	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	kali per tahun	12	9	75
4	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pakraman yang ikut pesta kesenian bali	sekaa	200	60	30
5	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Seniman	112	49	43,75
Rata- rata capaian Kinerja					49,75

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 92,35% yang dikategorikan Baik.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah terealisasi 0% dari target 100%
- Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan terealisasi 9 kali per tahun dari target 12 kali per tahun
- Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pakraman yang ikut pesta kesenian bali terealisasi 60 sekaa dari target 200 sekaa
- Jumlah seniman yang mendapat penghargaan terealisasi 49 seniman dari 112 seniman

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Tujuan 19
Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi

Indikator Sasaran	Satuan	2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	%	92	71,03	77,21
2 Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	%	100	0	0
3 Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	%	75	75	100
Rata- rata capaian Kinerja				59,07

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 92,35% yang dikategorikan Baik.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian yaitu:

- Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada terealisasi 71,03 % dari target 92%
- Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat terealisasi 0% dari target 100%

c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 2.25
Target tercapainya Visi Misi Kabupaten Karangasem Tahun 2020

VISI : KARANGASEM CERDAS, BERSIH DAN BERMARTABAT BERLANDASKAN TRI HITTA KARANA

NO	MISI		INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	Target
	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN/SASARAN				2020
1	Misi 1	:	Membentuk sumber daya manusia yang cerdas, sehat, bermartabat dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, ramah dan paripurna.		
	Tujuan 1	:	Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas		

Indikator Tujuan		: Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,3
sasaran		:		
1	Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.	Persentase Penduduk Buta Aksara	Persentase (%)	14
2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan SD sampai dengan SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	Persentase (%)	100
		Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	Persentase (%)	85
3	Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya tingkat kelulusan SD-SMP dan SMA/SMK atau sederajat.	Persentase kelulusan SD/MI paket A	Persentase (%)	100
		Persentase kelulusan SMP/MTs, Paket B	Persentase (%)	100
4	Meningkatnya prestasi murid SD dan SMP serta meningkatnya angka partisipasi sekolah.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase (%)	100
		Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase (%)	99
5	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Karangasem.	APK Perguruan Tinggi	Persentase (%)	14,75
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)				
Indikator Tujuan		: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	66,87
sasaran		:		
6	Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan derajat pendidikan.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,41
	Konsumsi perkapita	Pengeluaran Perkapita/pertahun	Ribu Rp	10499
Tujuan 3 : Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas				
Indikator Tujuan		: Umur Harapan hidup	Tahun	70,45
sasaran		:		
10	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	Persentase (%)	95

	11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Persentase (%)	7
			Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	90
			Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	8
			Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	8
	12	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Persentase (%)	95
2	Misi 2	: Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, budaya suap.			
	Tujuan 4	: Meningkatkan peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.			
	Indikator Tujuan	: Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	indeks	3,5	
		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	status	WTP	
	sasaran	:			
	13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	Persentase (%)	85
	14	Meningkatnya disiplin PNS	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	Persentase (%)	100
	15	Meningkatnya kompetensi dan profesional PNS	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	Persentase (%)	0,65
	16	Meningkatnya kinerja laporan keuangan perangkat daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Peringkat	A
	17	Meningkatnya prestasi PNS dan menurunnya jumlah penerima sanksi	Persentase aparatur yang disiplin	Persentase (%)	100
	7	Meningkatnya kualitas aparatur desa melalui bintek dan pelatihan	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	Persentase (%)	90
	8	Meningkatnya kesejahteraan aparatur desa sesuai peraturan perundang-undangan.	Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan	Orang	226
	9	Meningkatnya pendampingan teknis pengelolaan pembangunan	Jumlah desa yang melaksanakan BBGRM	Desa	75

		bagi Desa Pekraman.		
	Tujuan 5	: Meningkatkan kualitas sikap mental dan kultur masyarakat yang Bersih dan Bermartabat.		
	Indikator Tujuan	: Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2
	sasaran	:		
18	Meningkatnya partisipasi Desa Pekraman dan organisasi tradisional dan kemasyarakatan dalam pengembangan budaya yang mendukung Karangasem Bersih dan Bermartabat	Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	Sekaa	50
19	Meningkatnya kompetensi lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	Lembaga	3
20	Meningkatnya partisipasi para tokoh masyarakat lembaga pemerintah, lembaga adat dan kelompok lainnya yang mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat	Jumlah tokoh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Kelompok	8
3	Misi 3	: Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil dan menengah		
	Tujuan 6	: Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan.		
	Indikator Tujuan	: Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase (%)	94,06 (angka kemiskinan 5,94)
		Koefisien Gini (Indeks Gini)	Angka	0,3226
	sasaran	:		
21	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan dan rumah layak huni bagi keluarga miskin	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	Persentase (%)	10

			Rasio rumah layak huni	Rasio	0,00166
	22	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana utilitas umum, panjang jalan dalam kondisi baik	Terbangunnya Jalan Kabupaten (Km)	Km	873,326
			Jumlah Desa Rawan Air (Desa)	Desa	0
	23	Meningkatnya usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin.	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	Orang	6500
Tujuan 7 : Meningkatkan produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.					
	Indikator Tujuan	: Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persentase (%)	26,3	
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	101,53	
	sasaran	:			
	24	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan/pertanian (produksi sektor pertanian).	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Ton	274610,89
	25	Meningkatnya sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan	Jumlah prasarana yang disalurkan	unit/klp)	700
			Jumlah sarana yang disalurkan	Ton	130,479
	26	Meningkatnya pengembangan menghasilkan varietas baru tanaman pertanian	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	Persentase (%)	97
	27	Meningkatnya angka kecukupan pangan	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Persentase (%)	98,51
	28	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan	Ton	28660
Tujuan 8 : Meningkatkan investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri serta memperbaiki iklim perdagangan.					
	Indikator Tujuan	: Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase (%)	5,7	
	sasaran	:			
	29	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan	Rata-rata lama pelayanan perizinan (hari)	Hari	3

	30	Meningkatnya jumlah investasi.	Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	US\$	2634705
			Nilai investasi dalam negeri	Juta Ruoiah	170065
	31	Meningkatnya industri kecil menengah dan kerajinan rumah tangga	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	Persentase (%)	19
	32	Meningkatnya perdagangan dalam negeri.	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuh pokok dengan berkembangna tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	Persentase (%)	100
	33	Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD	Tingkat cakupan pelayanan PDAM	Persentase (%)	50,7
	34	Meningkatnya daya saing pasar tradisional	Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	Persentase (%)	90
	Tujuan 9 : Meningkatkan produktivitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dan koperasi.				
	Indikator Tujuan	: Persentase Usaha Mikro Kecil dan menengah		Persentase (%)	98,8
	sasaran	:			
	35	Meningkatnya modal usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Persentase Pembinaan Koperasi yang Berprestasi	Persentase (%)	100
	36	Meningkatnya koperasi yang aktif.	Persentase Koperasi aktif	Persentase (%)	87
	37	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi	Persentase penguatan kualitas dan Pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	Persentase (%)	100
	38	Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, dan pedagang kecil	Cakupan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang dibantu kredit perbankan	Persentase (%)	100
4	Misi 4	: Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan kerja, pariwisata kerakyatan dan peningkatan investasi yang berwawasan lingkungan			
	Tujuan 10	: Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.			
	Indikator Tujuan	: PAD sektor pariwisata		Persentase (%)	6,46

	sasaran	:			
	39	Meningkatnya daya tarik wisata yang sedang berkembang	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan	DTW	7
	40	Meningkatnya penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata	Jumlah data tarik wisata yang tertata	DTW	5
	41	Meningkatnya promosi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	Persentase (%)	25
	Tujuan 11	: Meningkatkan kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.			
	Indikator Tujuan	: Jumlah wisatawan mancanegara		Orang	415.000
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara		Orang	200.000
	sasaran	:			
	42	Meningkatnya pengembangan pariwisata spiritual	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata alternatif	DTW	3
	43	Meningkatnya pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Kelompok	3
	Tujuan 12	: Meningkatkan pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.			
	Indikator Tujuan	: Ketaatan terhadap RTRW		Persentase (%)	85
	sasaran	:			
	44	Meningkatnya ketersediaan perencanaan tata ruang	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	Persentase (%)	100
	45	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	68
	46	Meningkatnya efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi eks galian C	Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina (pengusaha)	%	100
5	Misi 5	: Membangun infrastruktur wilayah yang merata, berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis potensi lokal perdesaan.			

	Tujuan 13	: Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.		
	Indikator Tujuan	: Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase (%)	100
		Persentase penduduk berakses air minum	Persentase (%)	100
	sasaran	:		
47	Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, irigasi terutama kawasan perdesaan	Persentase terlaksananya pembangunan Infrastruktur	Persentase (%)	89
	Tujuan 14	: Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.		
	Indikator Tujuan	: Persentase areal kawasan kumuh	Persentase (%)	50
	sasaran	:		
48	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di Kota Amlapura	Persentase (%)	84,5
49	Meningkatnya kualitas ruas jalan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	1,479,36 Km / 227.203 unit
	Tujuan 15	: Meningkatkan pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.		
	Indikator Tujuan	: Persentase terlaksananya pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Persentase (%)	100
	sasaran	:		
50	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persentase (%)	87
51	Meningkatnya kualitas trotoar, penerangan jalan dan taman	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	Tidak diukur
6	Misi 6	: Mengembangkan peri kehidupan rakyat yang religius, toleran, berkarakter dan bermartabat melalui peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan, sosial budaya, politik dan kesejahteraan sosial.		
	Tujuan 16	: Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.		
	Indikator Tujuan	: Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	9,270
	sasaran	:		

	52	Meningkatnya bantuan keuangan kepada lembaga agama dan adat	Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	Persentase (%)	100
	53	Meningkatnya kualitas dan peranan lembaga agama dan adat melalui pembinaan dan penyuluhan	Persentase pembinaan sekaa truna di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi	Persentase (%)	100
	54	Meningkatnya koordinasi serta peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam mewujudkan Karangasem yang Bermartabat	Jumlah pertemuan FKUB	kali per tahun	2
	55	Meningkatnya kapasitas lembaga pesraman di masing-masing Desa Pekraman	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina		7
	56	Meningkatnya sarana dan prasarana tempat ibadah	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Rasio	9,270
	57	Meningkatnya sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	Unit	10
Tujuan 17 : Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, pemuda dan olahraga.					
	Indikator Tujuan	: Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		Persentase (%)	0,48
	sasaran	:			
	58	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan keberfungsian sosial	Orang	618 or 1 LKSA 78 Unit
	59	Meningkatnya kualitas layanan terhadap kaum perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	Persentase (%)	61,98
			Indeks Pembangunan Gender	Angka	76,92
	60	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Persentase (%)	50
	61	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, generasi muda, kepemudaan dan keolahragaan	Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Spesific Fertility Rate)	Per 1000 Penduduk	30 per 1000
			Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	Persentase (%)	93
Tujuan 18 : Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat.					

	Indikator Tujuan	: Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	2	
	sasaran	:			
	62	Meningkatnya kualitas dan pengembangan seni dan budaya yang hampir punah	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi warisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	Persentase (%)	1
	63	Meningkatnya perlindungan aset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada di masyarakat	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	Persentase (%)	100
	64	Meningkatnya kreativitas dan atraksi seni dan budaya	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	Kali/tahun	12
	65	Meningkatnya seni budaya berbasis Desa Pekraman dalam rangka mendukung PKB	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman yang ikut Pesta Kesenian Bali	Orang	200
	66	Meningkatnya penghargaan terhadap para seniman, budayawan dan penggiat seni lainnya	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Orang	112
	Tujuan 19	: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi.			
	Indikator Tujuan	: Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (Persentase meningkatnya swadaya murni masyarakat dalam membangun desa)	Persentase (%)	100	
	sasaran	:			
	67	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan demokrasi	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	Persentase (%)	92
	68	Meningkatnya advokasi dan pendidikan politik masyarakat.	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	Persentase (%)	100
	69	Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Persentase (%)	75

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karangasem dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran tingkat pencapaian target sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karangasem 2016-2021 disesuaikan dengan kemampuan anggaran belanja daerah tahun 2020 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bupati Karangasem tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran diatas digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	> 100 %	Baik Sekali
2	> 75 % - 100 %	Baik
3	55 %- 75 %	Cukup
4	< 55 %	Kurang

Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Tahun 2020

Pengukuran capaian kinerja dikelompokkan sesuai tujuan, sehingga disajikan ke dalam 19 tabel sesuai jumlah tujuan yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.26
 Capaian Kinerja Tujuan 1
 Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Penduduk Buta Aksara	%	16	16,52	96,75	14	14,61	95,64
2	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	%	99,5	96	96,48	100	8,3	8,3
3	Persentase satuan pendidikan	%	75	93,6	124,80	85	2,08	2,45

	formal tingkat SMP terakreditasi minimal B							
4	Persentase kelulusan SD/MI paket A	%	100	100	100,00	100	100	100
5	Persentase kelulusan SMP/MTs paket B	%	100	100	100,00	100	100	100
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,9	99,7	99,80	100	99,71	99,71
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	98	83,95	85,66	99	83,95	105,5
Rata- rata capaian Kinerja					84,25			73,09

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 73,09 %,turun jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 84,25%, sehingga menjadi kategori **Cukup**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

- Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B tercapai hanya tercapai 8,3% dari target 100%, hal ini diakibatkan tidak terlaksananya kegiatan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional akibat Covid.
- Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B tercapainya tercapai 2,08% dari target 85%, hal ini diakibatkan tidak terlaksananya kegiatan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional akibat Covid.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Tujuan 2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,40	12,40	100	12,41	Blm ada data dr BPS	Blm ada data dr BPS
Rata- rata capaian Kinerja				100			

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 belum dapat disajikan sehingga belum dapat diukur serta dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%, sehingga kategori penilaian masih menunggu data dari BPS.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Tujuan 3
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	(%)	90	100	111,11	95	15	15,79
2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	(%)	8	7,1	111,25	7	6,43	108,14
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	90	58	135,56	90	107,34	80,73
4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	10	0,7	193	8	0,58	192,75
5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	9	6,2	131,11	8	5,47	131,63
6	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	(%)	90	96	106,67	95	93	97,89

Rata- rata capaian Kinerja				131,45			128,31
----------------------------	--	--	--	--------	--	--	--------

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 128,31%,turun jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 131,45%, namun masih kategori **Baik Sekali**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

- Angka Kematian Ibu (AKI)dari target 90 Per 100.000 KHnamun meningkat dengan 107,34 Per 100.000 KH
- Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas yang menargetkan 95% terealisasi hanya 93%

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Tujuan 4
Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	%	87	134,5	154,60	100	100	89,36
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/aparatur	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	%	60	60	100	65	25	38,46
4	Nilai evaluasi AKIP	Predikat	B	B	100	A	B	85,06
5	Persentase aparatur yang disiplin	%	100	96,39	96,39	100	99,97	99,97
6	Persentase desa yang terbina	%	80	80	100	90	0	0

	aparat pemerintah desanya							
7	Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan	Orang	151	1,149	760,93	226	0	0
8	Jumlah desayang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	desa	75	75	100	75	0	0
Rata- rata capaian Kinerja					188,99			51,61

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 51,61%,turun jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 188,99%, sehingga dalam kategori **Kurang**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 6 (enam) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

- Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti
- Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan
- Nilai evaluasi AKIP
- Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya
- Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan
- Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

Sebagian besar indikator tidak mencapai target dikarenakan refocusing penanggulangan covid 19

Tabel 2.30
 Capaian Kinerja Tujuan 5
 Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung
 gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	sekaa	50	52	104	50	0	0
2 Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	lembaga	3	0	0	3	0	0
3 Jumlah tokoh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Orang/kelompok	55orang	55	100	8 kelompok	8	100
Rata-rata capaian Kinerja			68				33,33

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 33,33%, turun jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 68%, sehingga dalam kategori **Kurang**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

- Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun
- Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah

Dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat akibat vandemi covid 19 mengakibatkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat /orang banyak ditiadakan sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target-target kinerja pemerintah Kabupaten Karangasem.

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Tujuan 6
Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	%	10	10	100	10	6	60
2	Terbangunnya jalan kabupaten	Km	870,326	932,386	107,13	873.326	887.026	101.57
3	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	Orang	6000	6000	100,00	6500	300	4,62
Rata- rata capaian Kinerja					102,37			55,40

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 55,40%,turun jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 102,37%, sehingga dalam kategori **Cukup**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

- Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan
- Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani

Tabel 2.32
 Capaian Kinerja Tujuan 7
 Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian dalam arti luas.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Ton	265.452,15	187.011,65	70,45	274610,89	106042,19	38,62
2	Jumlah prasarana yang disalurkan	Unit/	680	85	12,50	700	54	7,72
3	Jumlah sarana yang disalurkan	Ton	129.979	4.688,67	3,61	130.479	5.809,78	4,44
4	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	%	96,5	96,47	99,97	97	97	100
5	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	96,32	85,45	88,71	89	89,1	100
6	Jumlah produksi perikanan	Ton	28.130	27.070,78	96,23	27315	26224	96,01
Rata-rata capaian Kinerja					61,91			50,16

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 50,16%, turun jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 61,91%, sehingga dalam kategori **Kurang**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator yang tidak mencapai target, yaitu:

- Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)
- Jumlah prasarana yang disalurkan
- Jumlah sarana yang disalurkan
- Jumlah produksi perikanan

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Tujuan 8
Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Rata-rata lama pelayanan perizinan	hari	5	6	83,33	3	7	42.86
2 Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	US\$	2.608.619	1.780.006	68,24	2634705	1255250	47.64
3 Nilai investasi (juta Rp)	Juta Rp	168.381	200.965	119,35	170065	142285	83.67
4 Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	%	16,45	8,42	51,19	19	8,42	62
5 Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	%	100	97,26	97,26	100	70,53	70,53
6 Tingkat cakupan pelayanan PDAM	%	50,6	33,63	66,46	50,7	34,32	67,69
7 Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	%	80	68,7	85,88	90	68,75	76,39
Rata- rata capaian Kinerja			81,67				69,15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 69,15%, turun jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 81,67%, sehingga dalam kategori **Cukup**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) indikator yang mengalami penurunan capaian yang signifikan, yaitu:

- Rata-rata lama pelayanan perizinan

- Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$
- Nilai investasi (juta Rp)

Masa pandemi covid 19 merupakan pukulan bagi dunia usaha di Kabupaten Karangasem sehingga mengakibatkan menurunnya investasi baik investasi asing maupun investasi lokal. Hal ini mengakibatkan penurunan capaian indikator yang signifikan.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Tujuan 9
Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase pembinaan koperasi yang berprestasi	%	100	57	57,00	100	100	100
2	Persentase koperasi aktif	%	85	66	77,65	87	80	91,95
3	Persentase penguatan kualitas dan pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	%	100	36,66	36,66	100	100	100
4	Cakupan perkembangan usaha mikro kecil menengah yang dibantu kredit perbankan	%	100	86,68	86,68	100	100	100
Rata- rata capaian Kinerja					64,50			97,99

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 97,99%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 64,50%, sehingga dalam kategori **Baik**. Peningkatan ini dipengaruhi oleh seluruh indikator kinerja mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Tujuan 10
Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	DTW	6	1	16,67	7	0	0
2	Jumlah daya tarik wisata yang tertata	DTW	4	3	75	5	18	360
3	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	%	20	9	45	25	16	64
Rata-rata capaian Kinerja					45,56			141,33

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 141,33%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 45,56%, sehingga dalam kategori **Baik Sekali**. Peningkatan ini dipengaruhi oleh indikator kinerja Jumlah daya tarik wisata yang tertata mengalami peningkatan yang signifikan

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Tujuan 11
Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah Desa wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan alternatif	DTW	3	3	100	3	3	100
2	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Kelompok	3	3	100	3	3	100

Rata- rata capaian Kinerja				100			100
-------------------------------	--	--	--	-----	--	--	-----

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%, sama dengan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 100%, dengan tetap pada kategori **Baik**.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Tujuan 12
Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Terpuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	%	100	100	100	100	100	100
2 Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	67,5	Tidak dihitung	Tidak dihitung	68	66,27	97,46
3 Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina (pengusaha)	%	80	80	100	100	100	100
Rata- rata capaian Kinerja				66,65			99,15

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 99,15%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 66,65%, sehingga dalam kategori **Baik**. Peningkatan ini dipengaruhi oleh 1 (satu) indikator yang mengalami peningkatan capaian kinerja, yaitu:

- Indeks kualitas lingkungan hidup yang tahun sebelumnya tidak dilakukan penghitungan dan di tahun 2020 baru mendapatkan indeks 66,27 yang ditargetkan 68 dengan capaian 97,46%

Tabel 2.38
 Capaian Kinerja Tujuan 13
 Meningkatnya pembangunan infrastruktur pedesaan.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase terlaksananya pembangunan infrastruktur	%	87	87	100	89	Tidak dihitung	Tidak dihitung
Rata- rata capaian Kinerja					100			0

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja pada tahun 2020 tidak dapat disajikan dikarenakan kewenangan pembangunan infrastruktur pedesaan telah dikelola langsung oleh kedesaan masing-masing.

Tabel 2.39
 Capaian Kinerja Tujuan 14
 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalapura	%	84	84	100	84,5	50,35	59,58
2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	1.476,36 Km/212.203	1.446,39 Km/204.776	97,24	1.479,36 Km/227.203	1.446,39 Km/211.821	95,50
Rata- rata capaian Kinerja					98,62			77,54

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 77,54%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 98,62%, walaupun demikian masih dalam kategori **Baik**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 2 (dua) indikator yaitu:

- Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalapura yang tercapai 59,56 % di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 40,42% dimana pada tahun 2019 tercapai 100%

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dimana pada tahun 2020 tercapai 95,50% turun sebesar 1,74% dari tahun 2019 yang tercapai 97,24%

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Tujuan 15
 Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	Tidak diukur	-	-	Tidak diukur	-	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwacapaian kinerja pada tahun 2020 tidak dapat disajikan dikarenakan kewenangan pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaantelah dikelola langsung oleh kedesaan masing-masing.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Tujuan 16
 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	%	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	kali per tahun	2	2	100	2	2	100
3	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina	Desa	5	1	20	1	1	100

4	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	buah	12	14	116,67	14	14	100
Rata-rata capaian Kinerja					84,17			100

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%, mengalami peningkatan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 84,17%, sehingga dalam kategori **Baik**. Peningkatan ini dipengaruhi seluruh indikator yang mengalami peningkatan capaian kinerja 100%

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Tujuan 17
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial	Orang	678	678	100	618	550	89
	LKSA	1	1	100	1	1	100
	unit	96	96	100	78	78	100
2 Indeks Pemberdayaan Gender	%	61,92	69,03	111,48	61,98	60,77	98,05
3 Indeks Pembangunan Gender	Angka	74,65	91,09	122,02	76,92	88,87	115,54
4 Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	%	50	42,86	114,28	50	70,58	58,84
5 Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Specific Fertility Rate)	Per 1000 penduduk	40 per 1000	32 per 1000	120	30 per 1000	38 per 1000	73,33
6 Persentase penduduk	%	90	82,7	91,89	93	97,00	104

Karangasem yang tertib administrasi kependudukan							
Rata-rata capaian Kinerja				107,46			92,35

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 92,35%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 107,46%, walaupun demikian masih dalam kategori **Baik**. Penurunan ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) indikator yaitu:

- Indeks Pemberdayaan Gender hanya tercapai 98,05% dengan target 61,98% dan tercapai 60,77%
- Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan mengalami peningkatan dimana target 50% dan realisasi 70,58
- Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Spesific Fertility Rate) jauh melampaui target yaitu 38 per 1000 penduduk dari target 30 per 100 Penduduk

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Tujuan 18
Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat.

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisinwarisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	%	100	100	100	100	100	100
2 Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	%	100	100	100	100	0	0
3 Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	kali per tahun	10	12	120,00	12	9	75

4	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pakraman yang ikut pesta kesenian bali	sekaa	180	180	100	200	60	30
5	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Seniman	96	97	101,04	112	49	43,75
Rata- rata capaian Kinerja					104,21			49,75

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 49,75%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata - rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 104,21%, dalam kategori **kurang**. Penurunan ini dipengaruhi oleh rasionalisasi anggaran dan refocusing pada penanganan Covid 19 sehingga ada 3 (tiga) indikator mengalami penurunan dan 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan yaitu:

- Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Tujuan 19
Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi

Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	%	85	78,48	92,32	92	71,03	77,21
2	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	%	100	93,16	93,16	100	0	0
3	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	%	70	91,7	131,00	75	75	100
Rata- rata capaian Kinerja					105,5			59,07

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 59,07%, mengalami penurunan jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 104,21%, dalam kategori **Cukup**. Penurunan ini dipengaruhi oleh rasionalisasi anggaran dan refocusing pada penanganan Covid 19 sehingga ada 1 (satu) indikator mengalami penurunan dan 1 (satu) indikator tidak dilaksanakan yaitu:

- Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui kategori capaian kinerja dari 19 tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagai berikut :

Tabel 2.45
Rata-Rata Capaian dan Kategori Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No	Tujuan	Rata-Rata Capaian	Kategori
1	Tujuan 1	73,09	cukup
2	Tujuan 2	0	Baik Sekali
2	Tujuan 3	128,31	Baik Sekali
4	Tujuan 4	51,61	Kurang
5	Tujuan 5	33,33	Kurang
6	Tujuan 6	55,4	Cukup
7	Tujuan 7	50,16	Kurang
8	Tujuan 8	69,15	Cukup
9	Tujuan 9	97,99	Baik
10	Tujuan 10	141,33	Baik Sekali
11	Tujuan 11	100	Baik
12	Tujuan 12	99,15	Baik
13	Tujuan 13	0	kurang
14	Tujuan 14	77,54	Baik
15	Tujuan 15	0	Kurang
16	Tujuan 16	100	Baik
17	Tujuan 17	92,35	Baik
18	Tujuan 18	49,75	Kurang

19	Tujuan 19	59,07	Cukup
	Rata-Rata Capaian	67,28	Cukup

Hasil analisis Pengukuran Kinerja terhadap 19 tujuan diketahui bahwa ada 3tujuan yang masuk kategori capaian Baik Sekali, 6tujuan masuk ke dalam kategori capaian Baik, 6tujuan baru mencapai kategori Cukup dan 6tujuanmasih masuk ke dalam kategori Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 67,28% dengan kategori **Cukup**.

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun sedemikian rupa yang dibagi dalam periode 5 tahun untuk dilaksanakan secara bertahap sehingga dapat mencapai target akhir. Tahun 2020 merupakan tahun kelima dari periode RPJMD Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021, oleh karena itu seharusnya capaian kinerja sudah mendekati target akhir dalam RPJMD. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Karangasem pada Tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD disajikan pada tabel yang dibagi ke dalam 19 tabel berdasarkan jumlah tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Tujuan 1
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir	Capaian
1	Persentase Penduduk Buta Aksara	%	1,39	12	11,58
2	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	%	5	100	5,00
3	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	%	1	100	1,00
4	Persentase kelulusan SD/MI paket A	%	100	100	100,00
5	Persentase kelulusan SMP/MTs paket B	%	100	100	100,00
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	99,71	100	99,71

7	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	83,95	99	84,80
---	---	---	-------	----	-------

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Tujuan 2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Blm ada data dr BPS	12,42	Blm bisa dihitung

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Tujuan 3
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam bidang kesehatan yang berkualitas

	Indikator Sasaran	Satuan	2020 Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	(%)	15	100	15
2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	(%)	6,43	7	108,14
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	107,34	90	80,73
4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	0,58	8	192,75
5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 KH	5,47	8	131,63
6	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	(%)	93	95	97,89

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Tujuan 4
Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter, bersih, berwibawa dan profesional.

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	%	100	90	111,11

2	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/aparat	%	100	100	100
3	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	%	25	70	35,71
4	Nilai evaluasi AKIP	Predikat	B	A	85,06
5	Persentase aparat yang disiplin	%	99,97	100	99,97
6	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	%	0	100	0
7	Jumlah aparat desa yang menerima penghargaan	Orang	0	275	0
8	Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	desa	0	75	0

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Tujuan 5
Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat.

Indikator Sasaran		Satuan	2020 Realisasi	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	sekaa	0	50	0
2	Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	lembaga	0	9	30
3	Jumlah tokoh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Orang/kelompok	8	75	84

Tabel 2.51
Capaian Kinerja Tujuan 6
Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	%	6	10	60
2	Terbangunnya jalan kabupaten	Km	887.026	873.326	101,57

3	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	Orang	300	6935	4,33
---	--	-------	-----	------	------

Tabel 2.52
Capaian Kinerja Tujuan 7
Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian
dalam arti luas.

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Ton	106042,19	283119,63	37,45
2	Jumlah prasarana yang disalurkan	Unit/	54	700	7,71
3	Jumlah sarana yang disalurkan	Ton	5.809,78	130,479	44,53
4	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	%	97	97	100
5	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	89,1	98,75	90,23
6	Jumlah produksi perikanan	Ton	26224	28660	91,50

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Tujuan 8
Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama
agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Rata-rata lama pelayanan perizinan	hari	7	3	33,33
2	Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	US\$	1255250	2661052	47,17
3	Nilai investasi (juta Rp)	Juta Rp	142285	171765	82,84
4	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	%	8,42	19,44	43,31
5	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	%	70,53	100	70,53
6	Tingkat cakupan pelayanan PDAM	%	34,32	50,84	67,51
7	Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	%	68,75	100	68,75

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Tujuan 9
Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase pembinaan koperasi yang berprestasi	%	100	100	100
2	Persentase koperasi aktif	%	80	90	88,89
3	Persentase penguatan kualitas dan pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	%	100	100	100
4	Cakupan perkembangan usaha mikro kecil menengah yang dibantu kredit perbankan	%	100	100	100

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Tujuan 10
Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	DTW	0	25	
2	Jumlah daya tarik wisata yang tertata	DTW	18	17	
3	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	%	16	25	64

Tabel 2.56
Capaian Kinerja Tujuan 11
Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Jumlah Desa wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan alternatif	DTW	3	15	
2	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Kelompok	3	18	

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Tujuan 12
Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang
sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	%	100	100	100
2	Indeks kualitas lingkungan hidup	indeks	66,27	68,5	96,74
3	Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina (pengusaha)	%	100	100	100

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Tujuan 13
Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase terlaksananya pembangunan infrastruktur	%	Tidak dihitung	90	Tidak bisa dihitung

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Tujuan 14
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalapura	%	50,35	85	59,24
2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit	1.446,39 Km/ 211.821 unit	1.482,36 Km / 232.203 unit	94,40

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Tujuan 15
Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang
berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Kasus	-	Tidak Diukur	-

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Tujuan 16
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan
agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	%	100	100	100
2	Jumlah pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	kali per tahun	2	2	100
3	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina	Desa	1	8	
4	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	rasio	Blm ada data dr BPS	9,271	Blm bisa dihitung
6	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	buah	14	10	140

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Tujuan 17
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan keberfungsian sosial	Orang	550	900	69,89
		LKSA	1		
		unit	78		
2	Indeks Pemberdayaan Gender	%	60,77	61,98	98,05
3	Indeks Pembangunan Gender	Angka	88,87	76,92	115,54
4	Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	%	70,58	50	58,84

5	Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Spesific Fertility Rate)	Per 1000 penduduk	38 per 1000	30 per 1000	73,33
6	Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	%	97,00	95	102

Tabel 2.63
Capaian Kinerja Tujuan 18
Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat.

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian %
1	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi warisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	%	100	100	100
2	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	%	0	100	0
3	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	kali per tahun	9	13	69,23
4	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pakraman yang ikut pesta kesenian bali	sekaa	60	200	30
5	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Seniman	49	112	43,75

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Tujuan 19
Terwujudnya peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman demokrasi

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2020	Target Akhir RPJMD	Capaian %
1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	%	71,03	100	71,03
2	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	%	0	100	0
3	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	%	75	80	93,75

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.65
Tingkat Efisiensi Tujuan 1
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Penduduk Buta Aksara	100	Tidak ada program	-	95,64	-	-	Efisien tanpa anggaran
2	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	100	Tidak ada program	-	8,3	-	-	Efisien tanpa anggaran
3	Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	100	100	1	2,45	99,88	0,02	-0,98
4	Persentase kelulusan SD/MI paket A	100	100	1	100	98,54	1,01	0,01
5	Persentase kelulusan SMP/MTs paket B	100	Tidak ada program	-	100	-	-	Efisien tanpa anggaran
6	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100	100	1	99,71	98,89	1,01	0,01
7	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100	100	1	105,5	97,64	1,08	0,08

Tabel 2.66
Tingkat Efisiensi Tujuan 2
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Harapan Lama Sekolah	100	Tidak ada program	-	Blm ada data dr BPS	-	-	-

Tabel 2.67
Tingkat Efisiensi Tujuan 3
Meningkatkan jangkauan, ketersediaan pelayanan, dan kesetaraan dalam
bidang kesehatan yang berkualitas

	Indikator Sasaran	Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	100	100	1	15,79	26,00	0,61	-0,39
2	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	100	100	1	108,14	41,86	2,58	1,58
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	100	100	1	80,73	41,75	1,93	0,93
4	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	100	100	1	192,75	10,47	18,41	17,41
5	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	100	100	1	131,63	7,90	16,66	15,66
6	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	100	100	1	97,89	99,96	0,98	-0,02

Tabel 2.68
Tingkat Efisiensi Tujuan 4
Meningkatnya peran pelayanan aparatur sipil negara yang berkarakter,
bersih, berwibawa dan profesional.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	1	89,36	97,44	0,92	-0,08
2	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/aparatur	100	100	1	100	99,68	1,00	0,00
3	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	100	100	1	38,46	56,47	0,68	-0,32
4	Nilai evaluasi AKIP	100	100	1	85,06	100	0,85	-0,15
5	Persentase aparatur yang disiplin	100	100	1	99,97	100	1,00	0,00
6	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	100	Tidak ada anggaran	-	-	-	-	-
7	Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan	100	Tidak ada anggaran	-	-	-	-	-
8	Jumlah desa yang melaksanakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	100	Tidak ada anggaran	-	-	-	-	-

Tabel 2.69
Tingkat Efisiensi Tujuan 5
Meningkatnya kualitas sikap mental dan kultur masyarakat dalam
mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	100	100	1	0	41,69	0	-1,00
2	Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	100	Tidak ada anggaran	-	-	-	-	-
3	Jumlah tokoh asyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang diberikan penghargaan yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	100	100	1	100	98	1,02	0,02

Tabel 2.70
Tingkat Efisiensi Tujuan 6
Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	100	100	1	60	98,6	0,61	-0,39
2	Terbangunnya jalan kabupaten	100	100	1	101,57	94,46	1,08	0,08
3	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	100	100	1	4,62	98,76	0,05	-0,95

Tabel 2.71
Tingkat Efisiensi Tujuan 7
Meningkatnya produktivitas dan skala usaha hasil pertanian
dalam arti luas.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	100	100	1	38,62	93,31	0,41	-0,59
2	Jumlah prasarana yang disalurkan	100	100	1	7,72	95,25	0,08	-0,92
3	Jumlah sarana yang disalurkan	100	100	1	4.452,65	94,47	47,13	46,13
4	Persentase luas pertanaman aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	100	100	1	100	88,03	1,14	0,14
5	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100	100	1	100	98,46	1,02	0,02
6	Jumlah produksi perikanan	100	100	1	96,01	80,89	1,19	0,19

Tabel 2.72
Tingkat Efisiensi Tujuan 8
Meningkatnya investasi dan daya saing produk industri terutama
agroindustri dan meningkatnya iklim perdagangan.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Rata-rata lama pelayanan perizinan	100	100	1	42,86	93,82	0,46	-0,54
2	Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	100	100	1	47,64	94,30	0,51	-0,49
3	Nilai investasi dalam negeri (juta Rp)	100	100	1	83,67	85,20	0,98	-0,02
4	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	100	100	1	62	96	0,65	-0,35
5	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	100	100	1	70,53	98	0,72	-0,28

6	Tingkat cakupan pelayanan PDAM	100	100	1	67,69			
7	Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	100	100	1	76,39	99,87	0,76	-0,24

Tabel 2.73
Tingkat Efisiensi Tujuan 9
Meningkatnya produktivitas dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase pembinaan koperasi yang berprestasi	100	100	1	100	82,05	1,22	0,22
2	Persentase koperasi aktif	100	100	1	91,95	96,86	0,95	-0,05
3	Persentase penguatan kualitas dan pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	100	100	1	100	99	1,01	0,01
4	Cakupan perkembangan usaha mikro kecil menengah yang dibantu kredit perbankan	100	100	1	100	99	1,01	0,01

Tabel 2.74
Tingkat Efisiensi Tujuan 10
Meningkatkan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	100	100	1	0	32	0,00	-1,00
2	Jumlah daya tarik wisata yang tertata	100	100	1	360	32	11,25	10,25
3	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	100	100	1	64	86	0,74	-0,26

Tabel 2.75
Tingkat Efisiensi Tujuan 11
Meningkatnya kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Jumlah Desa wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan alternatif	100	100	1	100	99	1,01	0,01
2	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	100	100	1	100	95	1,05	0,05

Tabel 2.76
Tingkat Efisiensi Tujuan 12
Meningkatnya pengendalian ruang dan harmonisasi rencana tata ruang sesuai dengan perkembangan teknologi, sosial ekonomi masyarakat.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	100	100	1	100	87,82	1,14	0,14
2	Indeks kualitas lingkungan hidup	100	100	1	97,46	98,30	0,99	-0,01
3	Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina (pengusaha)	100	100	1	100	88	1,14	0,14

Tabel 2.77
Tingkat Efisiensi Tujuan 13
Meningkatnya pembangunan infrastruktur perdesaan.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase terlaksananya pembangunan infrastruktur	100	100	1	Tidak dihitung	88	-	-

Tabel 2.78
Tingkat Efisiensi Tujuan 14
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana infrastruktur.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di kota Amalapura	100	100	1	59,58	95,4	0,62	-0,38
2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	100	100	1	95,50	61,89	1,54	0,54

Tabel 2.79
Tingkat Efisiensi Tujuan 15
Meningkatnya pembangunan dan kualitas sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pelayanan publik perdesaan.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Tidak diukur	-	-	Tidak diukur	-	-	-

Tabel 2.80
Tingkat Efisiensi Tujuan 16
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, pendidikan agama, serta sarana dan prasarana sosial dan keagamaan.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	100	100	1	100	57,03	1,75	0,75
2	Jumlah pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	100	100	1	100	50,77	1,97	0,97
3	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina	100	100	1	100	99,73	1,00	0,00
4	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	100	-	-	Blm ada data dr BPS	-	-	-
6	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	100	100	1	100	96,28	1,04	0,04

Tabel 2.81
Tingkat Efisiensi Tujuan 17
Meningkatnya kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial	100	100	1	96,33	89	1,08	0,08
2	Indeks Pemberdayaan	100	100	1	98,05	81,11	1,21	0,21

	Gender							
3	Indeks Pembangunan Gender	100	100	1	115,54	90,38	1,28	0,28
4	Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	100	100	1	58,84	90	0,65	-0,35
5	Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Specific Fertility Rate)	100	100	1	73,33	87,58	0,84	-0,16
6	Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	100	100	1	104	85,46	1,22	0,22

Tabel 2.82
Tingkat Efisiensi Tujuan 18
Meningkatnya kualitas seni dan budaya masyarakat.

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisinwarisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	100	100	1	100	97,01	1,03	0,03
2	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	100	100	1	0	88,57	0,00	-1,00
3	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	100	100	1	75	41,69	1,80	0,80
4	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis desa pakraman yang ikut pesta kesenian bali	100	100	1	30	100	0,30	-0,70
5	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	100	Tidak ada anggaran	-	43,75	-	-	Efisien tanpa anggaran

Tabel 2.83
Tingkat Efisiensi Tujuan 19
Terwujudnya Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan pemahaman
demokrasi

Indikator Sasaran		Target Output	Target Input	Standar Efisiensi	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi
1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada	100	100	1	77,21	90,69	0,85	-0,15
2	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	100	Tidak ada anggaran	-	-	-	-	-
3	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	100	100	1	100	90,31	1,11	0,11

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Tabel 2.84
Program yang mendukung capaian Kinerja

NO	Sasaran/ Indikator Sasaran	Program Kegiatan yang mendukung	Keuangan			
			Anggaran	Realisasi	Capaian	SiLPA
1	Meningkatnya angka melek huruf dan tuntasnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun.					
	1.1 Persentase Penduduk Buta Aksara	Tidak ada				
2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan SD sampai dengan SMP yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal.					
	2.1 Persentase satuan pendidikan formal tingkat SD terakreditasi minimal B	Tidak ada				
	2.2 Persentase satuan pendidikan formal tingkat SMP terakreditasi minimal B	Penyiapan Akreditasi SMP	2.456.000	2.453.000	99,88	3.000
3	Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya tingkat kelulusan SD-SMP dan SMA/SMK atau sederajat.					
	3.1 Persentase kelulusan SD/MI paket A	Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB	150.770.000	148.570.000	98,54	2.200.000
	3.2 Persentase kelulusan SMP/MTs, Paket B	Tidak ada				
4	Meningkatnya prestasi murid SD dan SMP serta meningkatnya angka partisipasi sekolah.					
	4.1 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Pemberian Beasiswa SD	4.569.516.897	4.518.591.630	98,89	50.925.267

4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Beasiswa SMP	1.645.000.050	1.606.099.050	97,64	38.901.000
5	Meningkatnya lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Karangasem.					
5.1	APK Perguruan Tinggi	Bukan kewenangan				
6	Meningkatnya rata-rata lama sekolah dan derajat pendidikan.					
6.1	Harapan Lama Sekolah	Tidak ada				
10	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat					
10.1	Persentase pelayanan kesehatan Goes To Banjar (Pusling)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	30.000.000	7.800.000	26,00	22.200.000
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.					
11.1	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	173.275.000	72.535.000	41,86	100.740.000
11.2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1.504.812.000	628.333.600	41,75	876.478.400
11.3	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	393.779.000	41.226.000	10,47	352.553.000
11.4	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	591.190.000	46.675.000	7,90	544.515.000
12	Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar kesehatan					
12.1	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.209.601.751	1.209.147.643	99,96	454.108
13	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik perangkat daerah.					
13.1	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	25.055.900	24.415.250	97,44	640.650
14	Meningkatnya disiplin PNS					
14.1	Persentase penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS/Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur / Kegiatan Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	4.579.800	4.565.200	99,68	14.600
15	Meningkatnya kompetensi dan profesional PNS					
15.1	Persentase lelang jabatan untuk eselon tertentu sesuai dengan kebutuhan	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/ Kegiatan Penempatan PNS	412.472.550	232.925.681	56,47	179.546.869
16	Meningkatnya kinerja laporan keuangan perangkat daerah					
16.1	Nilai Evaluasi AKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/Kegiatan Penyusunan dan Penilaian LAKIP Kabupaten Karangasem	11.459.900	11.459.900	100	0

17	Meningkatnya prestasi PNS dan menurunnya jumlah penerima sangsi						
	17.1	Persentase aparatur yang disiplin	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/ Kegiatan Pembinaan Gerakan Disiplin Nasional	5.159.700	5.159.701	100	0
7	Meningkatnya kualitas aparatur desa melalui bintek dan pelatihan						
	7.1	Persentase desa yang terbina aparat pemerintah desanya	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	0	0	0	0
8	Meningkatnya kesejahteraan aparatur desa sesuai peraturan perundang-undangan.						
	8.1	Jumlah aparatur desa yang menerima penghargaan	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	0	0
9	Meningkatnya pendampingan teknis pengelolaan pembangunan bagi Desa Pekraman.						
	9.1	Jumlah desa yang melaksanakan BBGRM	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	0	0	0	0
18	Meningkatnya partisipasi Desa Pekraman dan organisasi tradisional dan kemasyarakatan dalam pengembangan budaya yang mendukung Karangasem Bersih dan Bermartabat						
	18.1	Jumlah organisasi tradisional (kelompok seni) yang ikut berpartisipasi dalam pagelaran seni budaya per tahun	Program Pengembangan Kreatifitas Seni dan Budaya/ Kegiatan Pelaksanaan Event Seni Budaya	79.000.000	32.937.600	41,69	46.062.400
19	Meningkatnya kompetensi lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku						
	19.1	Jumlah penghargaan kepada lembaga tradisional dan organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan Daerah	Tidak ada				
20	Meningkatnya partisipasi para tokoh masyarakat lembaga pemerintah, lembaga adat dan kelompok lainnya yang mendukung gerakan Karangasem Bersih dan Bermartabat						
	20.1	Jumlah tokoh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga pemerintah/lembaga adat yang berprestasi dalam bidang lingkungan hidup	Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup/ Kegiatan Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	93.216.700	93.216.700	98	1.323.250
21	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan pangan						

	dan rumah layak huni bagi keluarga miskin						
	21.1	Persentase tertatanya lingkungan sehat perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan/ Kegiatan Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	28.986.100	28.581.100	98,6	405.000
	21.2	Rasio rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan	83.736.300	83.548.100	99,78	182.200
22	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana utilitas umum, panjang jalan dalam kondisi baik						
	22.1	Terbangunnya Jalan Kabupaten (Km)	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan/ Kegiatan Pembangunan Jalan	2.983.244.700	2.902.440.857	98,66	39.508.843
			Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ 1. Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten	10.446.286.618	9.838.849.885	94,19	607.436.733
			2. Kegiatan Peningkatan Jalan Kabupaten	5.573.536.800	5.045.987.692	90,53	527.549.108
	22.2	Jumlah Desa Rawan Air (Desa)	Tidak ada				
23	Meningkatnya usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin.						
	23.1	Jumlah keluarga miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang ditangani	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya/Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin	24.041.400	23.743.100	98,76	298.300
24	Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman pangan/pertanian (produksi sektor pertanian).						
	24.1	Jumlah produksi tanaman pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah)	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	13.630.500	12.718.208	93,31	912.292
25	Meningkatnya sarana produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan						
	25.1	Jumlah prasarana yang disalurkan	Pembinaan Alsintan	2.751.000	2.603.000	94,62	148.000
			Pengelolaan lahan dan air	5.627.500	5.498.500	97,71	129.000
			Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	3.631.700	3.457.700	95,21	174.000
			Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian tanaman hortikultura	3.631.300	3.497.350	96,31	133.950
			Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan	2.993.000	2.765.650	92,4	227.350
	25.2	Jumlah sarana yang disalurkan	Pembibitan dan perawatan ternak	13.948.200	13.209.200	94,7	739.000
			Pendampingan Simantri	6.016.000	5.696.100	94,68	319.900
			Pengembangan Intensifikasi Tanaman Pangan	13.630.500	12.718.208	93,31	912.292
			Peningkatan kualitas bahan baku tanaman	372.621.880	354.736.500	95,2	17.885.380

			tembakau				
26	Meningkatnya pengembangan menghasilkan varietas baru tanaman pertanian						
	26.1	Persentase luas pertanian aman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan/dampak perubahan iklim dengan teknologi ramah lingkungan	Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman hortikultura	4.408.000	4.214.050	95,6	193.950
			Pengendalian Organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan	6.005.500	4.832.114	80,46	1.173.386
27	Meningkatnya angka kecukupan pangan						
	27.1	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan/ Kegiatan Pengembangan ketersediaan pangan daerah	16.293.500	16.043.150	98,46	250.350
28	Meningkatnya produksi perikanan						
	28.1	Jumlah produksi perikanan 1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	11.111.800	10.908.122	98,17	203.678
			1.2. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit	226.150.366	38.180.000	16,88	187.970.366
			1.3. Pembangunan Pengembangan Pembenihan Ikan	8.243.500	8.003.800	97,09	239.700
			1.4. Pembangunan Pengembangan Kawasan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	32.006.400	30.015.350	93,78	1.991.050
			2.1 Kegiatan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	13.970.700	11.714.700	83,85	2.256.000
			2.2. Kegiatan Pendampingan pada Kelompok Nelayan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	17.400.700	16.633.650	95,59	767.050
29	Meningkatnya kemudahan pelayanan perizinan						
	29.1	Rata-rata lama pelayanan perizinan (hari)	Program Bidang Pelayanan Bidang Perizinan	513.353.617	485.082.950	94,49	28.270.667
			Program Penyampaian Informasi dan Pengaduan Masyarakat	44.301.246	41.562.400	93,82	2.738.846
30	Meningkatnya jumlah investasi.						
	30.1	Jumlah Investasi Asing (PMA) US\$	Program Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi	54.678.250	51.563.000	94,30	3.115.250
	30.2	Nilai investasi dalam negeri	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	8.735.900	7.443.150	85,20	1.292.750
31	Meningkatnya industri kecil menengah dan kerajinan rumah tangga						
	31.1	Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas IKM	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	76.211.800	73.301.250	96	2.910.550

32	Meningkatnya perdagangan dalam negeri.						
	32.1	Persentase terpenuhinya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan berkembangnya tertib usaha perdagangan serta kepastian perlindungan terhadap konsumen	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	140.285.800	137.435.950	98	2.849.850
33	Meningkatnya kinerja pengelolaan BUMD						
	33.1	Tingkat cakupan pelayanan PDAM					
34	Meningkatnya daya saing pasar tradisional						
	34.1	Rasio Pasar Tradisional yang memenuhi standar	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	5.931.418.215	5.923.729.095	99,87	7.689.120
35	Meningkatnya modal usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi						
	35.1	Persentase Pembinaan Koperasi yang Berprestasi	Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	162.162.000	133.055.900	82,05	29.106.100
36	Meningkatnya koperasi yang aktif.						
	36.1	Persentase Koperasi aktif	Monev Laporan Koperasi	4.400.000	4.261.700	96,86	138.300
37	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi						
	37.1	Persentase penguatan kualitas dan Pertumbuhan UMKM melalui pendampingan dan pelatihan	Pemberdayaan Koperasi dan UMKM	4.003.800	3.995.000	99	8.800
38	Meningkatnya penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, dan pedagang kecil						
	38.1	Cakupan perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi yang dibantu kredit perbankan	Monev Usaha Mikro	4.620.150	4.620.150	99	38.450
39	Meningkatnya daya tarik wisata yang sedang berkembang		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata/ Kegiatan Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	4.935.085.500	1.605.077.490	32	3.330.008.010
	39.1	Jumlah daya tarik wisata yang dikembangkan					
40	Meningkatnya penataan kawasan pariwisata dan daya tarik wisata						
	40.1	Jumlah data tarik wisata yang tertata					
41	Meningkatnya promosi pariwisata baik dalam negeri maupun luar negeri.						
	41.1	Persentase tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem	Pengembangan Pemasaran Pariwisata/ Kegiatan Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara didalam dan di luar negeri	1.387.032.500	1.198.092.247	86	188.940.253
42	Meningkatnya pengembangan pariwisata spiritual						
	42.1	Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan sebagai daerah tujuan	Pengembangan Kemitraan / Kegiatan Pengembangan	1.079.399.667	1.069.732.050	99	9.667.617

		wisata alternatif	sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata				
43	Meningkatnya pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan						
	43.1	Jumlah kelompok wisata yang sadar wisata dan menjalankan sapta pesona	Pengembangan Pariwisata Alternatif/ Kegiatan Pembinaan dan pengembangan desa wisata	124.124.667	117.886.700	95	6.237.967
44	Meningkatnya ketersediaan perencanaan tata ruang						
	44.1	Terpenuhinya penyelenggaraan penataan dan pengendalian penataan ruang	Program Perencanaan Tata Ruang, Kegiatan Penetapan Kebijakan RDTRK,RTRK	17.843.000	15.670.593	87.82	2.172.407
45	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, dan perlindungan sumber daya alam						
	45.1	Indeks kualitas lingkungan hidup	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	239.224.400	235.168.160	98,30	4.056.240
46	Meningkatnya efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi eks galian C						
	46.1	Cakupan pengusaha bidang pertambangan bahan galian C yang terbina (pengusaha)	Kegiatan Pengawasan Penean dokumen lingkungan	52.786.800	46.245.520	88	6.541.280
47	Meningkatnya infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, irigasi terutama kawasan perdesaan						
	47.1	Persentase terlaksananya pembangunan Infrastruktur	Kegiatan Pengawasan Penean dokumen lingkungan	52.786.800	46.245.520	88	6.541.280
48	Meningkatnya pengelolaan persampahan						
	48.1	Persentase meningkatnya pengelolaan persampahan di Kota Amlapura	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan/ Kegiatan Pelayanan angkutan persampahan	1.673.535.408	1.617.879.550	97	55.655.858
			Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	5.724.516.800	5.720.486.950	100	4.029.850
			Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Pengelolaan Akhir Sampah	889.472.650	842.759.450	95	44.853.200
			Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.724.516.800	5.720.486.950	100	48.883.050
			Kegiatan Pemungutan Retribusi	93.482.750	79.762.850	85	13.719.900
49	Meningkatnya kualitas ruas jalan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif						
	49.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	245.818.650	152.126.000	61.89	93.692.650
50	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor desa/kelurahan.						
	50.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran	Tidak ada				

		pemerintahan desa yang baik					
51		Meningkatnya kualitas trotoar, penerangan jalan dan taman					
	51.1	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Tidak diukur				
52		Meningkatnya bantuan keuangan kepada lembaga agama dan adat					
	52.1	Persentase lembaga agama dan adat yang terfasilitasi penerimaan bantuan keuangan	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya/ Kegiatan Fasilitasi Bantuan kepada Lembaga adat/ tradisional	41.243.200	23.519.626	57,03	17.723.574
53		Meningkatnya kualitas dan peranan lembaga agama dan adat melalui pembinaan dan penyuluhan					
	53.1	Persentase pembinaan sekaa truna di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi	Tidak ada				
54		Meningkatnya koordinasi serta peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama dalam mewujudkan Karangasem yang Bermartabat					
	54.1	Jumlah pertemuan FKUB	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.461.900	1.250.000	50,77	1.211.900
55		Meningkatnya kapasitas lembaga pesraman di masing-masing Desa Pekraman					
	55.1	Jumlah kawasan desa yang dibentuk/dibina	Program Pemberdayaan Kawasan Perdesaan	4.698.000	4.685.400	99,73	12.600
56		Meningkatnya sarana dan prasarana tempat ibadah					
	56.1	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Tidak ada data capaian dari BPS				
57		Meningkatnya sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan					
	57.1	Jumlah perpustakaan dan taman bacaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.1 Operasional mobil/motor pintar	2.326.500	2.305.500	99,10	21.000
			1.2 Operasional perpustakaan keliling	2.600.500	2.430.400	93,46	170.100
58		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kaum lansia					
	58.1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMK5) yang mengalami peningkatan kualitas hidup,kemandirian dan keberfungsian sosial	1.1 Pelatihan dan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	24.041.400	23.743.100	100%	298.300
		1. Program Pemberdayaan Fakir	1.2 Koordinasi dan Sosialisasi Program	51.734.050	51.726.422	99,98	7.628

		Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya	Keluarga Harapan				
			1.3 Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	32.230.800	30.051.350	88,80	2.179.450
		2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	2.1 Penanganan Masalah - Masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	128.377.900	73.625.675	67,22	54.752.255
59	Meningkatnya kualitas layanan terhadap kaum perempuan						
	59.1	Indeks Pemberdayaan Gender	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	43.104.800	34.964.050	81,11	8.140.750
	59.2	Indeks Pembangunan Gender	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	21.734.800	19.643.750	90,38	2.091.050
60	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak						
	60.1	Proporsi perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	39.058.600	34.980.100	90	4.078.500
61	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan, generasi muda, kepemudaan dan keolahragaan						
	61.1	Angka Kelahiran pada Remaja 15-19 tahun (ASFR=Age Specific Fertility Rate)	Program keluarga Berencana	2.745.298.000	2.404.692.571	87,58	340.605.429
	61.2	Persentase penduduk Karangasem yang tertib administrasi kependudukan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.117.546.050	1.809.724.728	85,46	307.821.322
62	Meningkatnya kualitas dan pengembangan seni dan budaya yang hampir punah						
	62.1	Persentase terpenuhinya perlindungan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi warisan budaya dan pemanfaatan bidang kesenian	Program Pengembangan Nilai Budaya/ Kegiatan Pelestarian dan Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda	53.450.400	51.853.750	97,01	1.596.650
63	Meningkatnya perlindungan aset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada di masyarakat						
	63.1	Persentase tercapainya penyelamatan Dokumen Arsip daerah	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah / Penelusuran Dokumen Arsip Daerah	669.000	592.500	88,57	76.500
64	Meningkatnya kreativitas dan atraksi seni dan budaya						
	64.1	Jumlah gelar seni budaya yang dilaksanakan	Program Pengembangan Kreatifitas Seni dan Budaya/ Kegiatan Pelaksanaan Event Seni Budaya	79.000.000	32.937.600	41,69	46.062.400
65	Meningkatnya seni budaya berbasis Desa Pekraman dalam rangka mendukung PKB						
	65.1	Jumlah peserta kelompok-kelompok seni budaya berbasis Desa Pekraman yang ikut	Program Pengelolaan Keragaman Budaya/ Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	5.473.900	5.473.900	100	0

		Pesta Kesenian Bali	Daerah				
66	Meningkatnya penghargaan terhadap para seniman, budayawan dan penggiat seni lainnya						
	66.1	Jumlah seniman yang mendapat penghargaan	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Bidang Kebudayaan / Kegiatan Pemberian Dukungan/ Penghargaan Kepada Seniman dan Budayawan	0	0	0	0
67	Meningkatnya wawasan kebangsaan dan demokrasi						
	67.1	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu/kada	Pendidikan Politik Masyarakat	143716000	130338100	90,69	13377.900
68	Meningkatnya advokasi dan pendidikan politik masyarakat.						
	68.1	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Politik Masyarakat	Tidak ada				
69	Meningkatnya ketertiban dan keamanan berbasis kearifan lokal						
	69.1	Persentase desa/kelurahan dengan keamanan dan kenyamanan lingkungan terkendali	Patroli Wilayah dan Trantibum	166.235.450	150.130.400	90,31	16.105.050



BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran 2020, tidak menerima Tugas Pembantuan dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat, jadi pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2020 nihil.

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten


Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk Tahun Anggaran 2020, tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Bali, jadi pelaksanaan tugas pembantuan tahun 2020 nihil.

3.3 Permasalahan dan Kendala

-

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

-



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

Penerapan SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Karangasem dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah Pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

SPM Bidang Urusan Pendidikan merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.

Adapun Penerima pelayanan dasar terdapat pada:

1. SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. SPM pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

4. SPM pendidikan menengah merupakan peserta didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
5. SPM pendidikan khusus merupakan peserta didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

4.1.2 Target Capaian SPM Serta Realisasi Urusan Pendidikan

Tabel 4.1

Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kabupaten Karangasem Tahun 2020

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	JENJANG	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN SPM		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	PENDIDIKAN DASAR OLEH KABUPATEN KARANGASEM	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil	SD	2020	357	357	100
			MI		6	6	100
			SMP		8	8	100
			MTs		3	3	100
2		Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang	SD		357	346	96,91
			MI		6	6	100
			SMP		48	48	100
			MTS		3	3	100

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	JENJANG	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN SPM		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;					
3		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;	SMP		48	36	75
			MTS		3	3	100
4		Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
			SMP		48	48	100
			MTs		3	3	100
5		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
			SD				
			MI				

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	JENJANG	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN SPM		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		guru setiap satuan pendidikan					
6		Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;	SMP		48	48	100
			MTs		3	3	100
7		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
8		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%	SMP		48	48	100
			MTS		3	3	100
9		Di setiap SMP/MTs tersedia guru kualifikasi akademik	SMP		48	48	100

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	JENJANG	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN SPM		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		S-1 atau D-IV dan memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mapel Matematika, IPA, B. Indonesia, B. Inggris, dan PKn	MTs		3	3	100
10		Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
11		Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP		48	48	100
			MTs		3	3	100
12		Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
13		Di setiap kab/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;	SMP		48	48	100
			MTs		3	3	100

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	JENJANG	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN SPM		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
14		Di setiap kab/kota semua pengawas sekolah/ madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat Pendidik	SD		33	33	100
			MI				
15		Pemerintah kab/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
			SMP		48	48	100
			MTs		3	3	100
16		Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
			SMP		48	48	100
			MTs		3	3	100
17	PENDIDIKAN DASAR OLEH SATUAN PENDIDIKAN	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap	SD	2020	357	357	100
			MI		6	6	100

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	JENJANG	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN SPM		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		peserta didik					
18		Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;	SMP		48	48	100
			MTs		3	3	100
19		Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;	SD		357	0	0
			MI		6	0	0
20		Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;	SD		357	0	
			MI		6	0	
			SMP		48	0	
			MTs		3	0	
21		Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per	SD		3518	3518	100

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	JENJANG	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN SPM		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan & melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;	MI		77	77	100
			SMP		1213	1213	100
			MTs		72	72	100
22		Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut : a) Kelas I-II = 18 jam per minggu; b) Kelas III = 24 jam per minggu; c) Kelas IV-VI = 27 jam per minggu; atau d) Kelas VII-IX = 27 jam per minggu	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
			SMP		48	48	100
			MTs		3	3	100
23		Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum sesuai ketentuan yang berlaku	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
			SMP		48	48	100
			MTs		3	3	100
24		Setiap guru yang menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata	SD		3518	3518	100
			MI		77	77	100
			SMP		1213	1213	100
			MTs		72	72	100

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	JENJANG	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN SPM		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		pelajaran yang diampunya					
25		Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	SD		3518	3518	100
			MI		77	77	100
			SMP		1213	1213	100
			MTs		72	72	100
26		Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
			SMP		48	48	100
			MTs		3	3	100
27		Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil presentasi belajar peserta didik	SD		3518	3518	100
			MI		77	77	100
			SMP		1213	1213	100
			MTs		72	72	100
28		Kepala sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas(UKK) serta Ujian Akhir(US/ UN) kepada orang tua	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
			SMP		48	48	100

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN / INDIKATOR KINERJA	JENJANG	TAHUN PENCAPAIAN	CAPAIAN SPM		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
		peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/ kota atau Kantor Kemenag Kab/ kota pada setiap akhir semester	MTs		3	3	100
29		Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	SD		357	357	100
			MI		6	6	100
			SMP		48	48	100
			MTs		3	3	100

4.1.3 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2

Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Karangasem

No.	Jenis Belanja	Jumlah Anggaran
1	APBD	470.917.038.040,30
2	APBN	71.780.577.406,34
	- DAK SD	7.050.823.000
	- DAK SMP	1.330.963.190

	- DAK PAUD	748.065.000,00
	- DAK SKB	280.955.000,00
	- DANA BOS SD	37.095.307.294,60
	- DANA BOS SMP	22.047.386.042,74
	- DANA BOP PAUD	3.227.077.879
JUMLAH		542.697.615.446,64

4.1.4 Dukungan Personil Urusan Pendidikan

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

- a. PNS = 107 orang
- b. Non PNS = 87 orang

4.1.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Pendidikan

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut.

- Terlambatnya petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat, yang menyebabkan terhambatnya perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan DAK.
- Kurangnya konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan, sehingga masih relative banyak kegiatan yang baru direalisasikan pada akhir tahun anggaran atau bahkan tidak direalisasikan.
- Relatif banyaknya sekolah dan letak geografis sekolah yang sulit dan saling berjauhan, yang menjadi sasaran lokasi kegiatan, memerlukan tenaga dan waktu yang lebih banyak.

- Sumber daya manusia yang relatif masih kurang baik jumlah maupun kualitasnya.
- Banyaknya masalah-masalah yang harus diselesaikan yang muncul dari tenaga pendidik dan kependidikan pada tingkat satuan pendidikan baik dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, di seluruh wilayah Kabupaten Karangasem, menyita waktu dan perhatian yang cukup banyak untuk menyelesaikannya

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang begitu kompleks, beberapa strategi yang telah diambil selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Setiap kepala bidang mempresentasikan rencana kegiatan pada tahun anggaran pada awal tahun dihadapan seluruh karyawan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk lebih memahami kegiatan di masing-masing bidang.
2. Menyusun jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan bidang-bidang bersama-sama sebagai pedoman evaluasi.
3. Melaksanakan evaluasi rutin setiap saat terhadap perkembangan realisasi keuangan dan fisik dari masing-masing bidang melalui rapat rutin mingguan dan bulanan.
4. Mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan, seperti pelatihan pengelolaan keuangan, diklat sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).
5. Menyepakati tata nilai, komitmen, dan semboyan organisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi.
6. Menumbuhkan budaya organisasi dan pembelajaran organisasi melalui arahan-arahan dalam rapat-rapat dan kegiatan apel pagi.
7. Mengundang pimpinan (Bupati, Wakil Bupati, Sekda) dalam silaturahmi bersama untuk meningkatkan semangat dan motivasi kerja seluruh karyawan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Layanan Dasar Urusan Kesehatan

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency virus = HIV)

4.2.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Kesehatan

Tabel 4.3
Target dan Realisasi SPM bidang kesehatan oleh
Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Pencapaian	Realisasi Capaian sd semester II		
				Realisasi/ pembilang	Sasaran/ penyebut	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	6.598	6.914	95,43

2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	100%	6.920	6.599	104,86
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	6.671	6.285	106,14
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	100%	29.844	25.334	117,80
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	11.103	63.602	17,46
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	95743	253.300	37,80
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	33.133	62.732	52,82
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	44379	86.791	51,13
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	100%	3815	4.427	86,18

		standar				
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	1051	1.255	83,75
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	924	2329	39,67
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human mmunodeficiency virus = HIV)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	5535	7669	72,17

4.2.3 Alokasi Anggaran Urusan Kesehatan

Anggaran dalam rangka pelayanan dan pencapaian SPM bidang kesehatan bersumber dari DAK BOK, Kapitasi JKN, DAK Fisik dan APBD Kabupaten yang ditetapkan dalam APBD dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Alokasi Anggaran		
			APBD	APBN	Sumber Lainnya Yang Sah
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil		234.100.000	

2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin		768.862.000	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	13.200.000	198.765.000	10.000.000
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan pelayanan kesehatan Balita sesuai standar	12.000.000	279.000.000	10.000.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	11.630.000		5.500.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	17.010.000	217.133.333	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan kringing kesehatan sesuai standar		28.750.000	67.040.000
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	17.010.000	216.008.333	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13.200.000	260.127.890	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	13.200.000	260.127.890	273.327.890
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	21.476.000	499.895.000	

12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency virus = HIV)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	13.824.000	408.463.774	
Jumlah			155.132.500	3.973.719.447	34.0367.890

4.2.4 Dukungan Personil Urusan Kesehatan

Sumber daya manusia/dukungan personil dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan tahun 2020 berdasarkan jenis pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5

Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Urusan Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil yang terlibat Dalam penerapan/ pencapaian SPM
1	2	3
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Dokter umum, dokter spesialis kandungan, Bidan, Perawat dan tenaga kesehatan lainnya, tokoh masyarakat sejumlah = 23 orang
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Dokter umum, dokter spesialis kandungan, Bidan, Perawat dan tenaga kesehatan lainnya sejumlah = 161 orang
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dokter umum, dokter spesialis anak, Bidan, Perawat dan tenaga kesehatan lainnya sejumlah = 203 orang
4	Pelayanan kesehatan balita	Dokter umum, dokter spesialis anak, Bidan, Perawat dan tenaga kesehatan lainnya sejumlah = 139 orang
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Bidan, Perawat, tenaga kesehatan lainnya, Guru UKS, KKR (kader kesehatan remaja) sejumlah = 262 orang

6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pemegang program PTM di Puskesmas, petugas kesehatan lainnya yang ikut dalam Tim Terintegrasi dengan program lain dan Kader Posbindu PTM sejumlah = 36 orang
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Bidan, Perawat, tenaga kesehatan lainnya sejumlah = 60 orang
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pemegang program PTM, petugas kesehatan lainnya yang ikut dalam Tim Terintegrasi dengan program lain dan Kader Posbindu PTM sejumlah = 36 orang
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Pemegang program PTM, petugas kesehatan lainnya yang ikut dalam Tim Terintegrasi dengan program lain dan Kader Posbindu PTM sejumlah = 36 orang
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa	Pemegang Program kesehatan jiwa dan tim, Lintas Sektor seperti Satpol PP, Kepolisian, Dinas Sosial, Disdukcapil, BPJS, TNI sejumlah = 36 orang
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	TIM TB DOTS Puskesmas yang terdiri dari pemegang program, klinisi, laboratorium, tenaga Promosi kesehatan dan kader kurang lebih sebanyak = 66 orang
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Pemegang program HIV di Puskesmas, konselor, klinisi, laboratorium dan kader kurang lebih sebanyak = 63 orang

4.2.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Kesehatan

Beberapa permasalahan yang ada dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Karangasem tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Masa pandemi Covid-19 sehingga kegiatan pelayanan tidak berjalan optimal
2. Target penduduk yang perlu diskruining dan penduduk yang diberikan pelayanan relatif tinggi.
3. Alat dan bahan untuk skrining terbatas
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri lebih awal.
5. Perbedaan definisi operasional
6. Kurangnya Dukungan sumber daya manusia

7. Masih ada stigma yang kurang baik dari masyarakat untuk penderita HIV

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/ Kota terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic

4.3.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 4.6
Target dan Capaian SPM Dinas PUPR Kabupaten Karangasem

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/Indikator Kinerja	Tahun	Target SPM	Capaian Tahun 2020		
					Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (KK)	2020	100%	141.281	127.187	90,02
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Jiwa)	2020	100%	471.820	437.250	92,67

Target pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun 2020 adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dalam mencapai SPM selama kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu sebesar 100%.

Capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun 2020 merupakan perbandingan antara

realisasi kegiatan dengan target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

4.3.3 Alokasi Anggaran Urusan Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2020 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang PU tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Keterangan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (KK)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.863.053.314,00	
			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.696.055.826,00	APBD
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (jiwa)	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota	166.997.488,00	APBD

4.3.4 Dukungan Personil Urusan Pekerjaan Umum

Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem Tahun 2020 dukungan personil terdiri dari pegawai ASN dan Non ASN dengan jumlah sebagai berikut :

a. ASN= 12 Orang

b. Non ASN = 16 Orang

Dari jumlah 28 orang tersebut, 4 orang ASN adalah pejabat struktural, 1 orang ASN staf teknis, 7 orang staf administrasi, 16 orang staf lapangan.

4.3.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Pekerjaan Umum

a. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem antara lain :

1. Belum tercapainya target akses 100% air minum dalam layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sesuai target nasional.
2. Belum adanya data base air minum secara menyeluruh sebagai acuan pembangunan lebih lanjut
3. Belum tercapainya target layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sesuai target nasional.
4. Keterbatasan SDM dalam melaksanakan program dan kegiatan.
5. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung penanganan akhir limbah domestik untuk pelayanan di permukiman pada jalan sempit dan peralatan petugas operasional (APD, pompa genset) serta gedung petugas pengelola IPLT
6. Terbatasnya anggaran untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum dan sanitasi untuk mendukung capaian target kabupaten

b. Solusi

1. Membuat data base kebutuhan layanan pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di kabupaten sehingga memudahkan untuk memetakan kegiatan setiap tahunnya.
2. Berkoordinasi lebih intens dengan instansi yang mendukung pemenuhan SPM air minum dan sanitasi untuk selalu

memperbaharui (*update*) data sehingga dapat meningkatkan prosentase layanan.

3. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, dan PDAM untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sarana dan prasarana air minum dan sanitasi untuk meningkatkan pola hidup sehat untuk membangun sarana dan prasarana air minum dan sanitasi.
4. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam permohonan bantuan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi di pemerintahan kabupaten.
5. Mengadakan pelatihan cepat tanggap kepada personil lapangan dan berinovasi sehingga dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Menteri Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

- 1) Rumah layak huni dan terjangkau
- 2) Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

4.4.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.8
Target dan Realisasi Pemenuhan SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Uraian	Target		Capaian Tahun	
		Volume	Satuan	2020	2021
1	Terbangunnya Rumah Tinggal Layak Huni bagi MBR di Kabupaten Karangasem	694	Unit	Dirasionalisasi	
2	Persentase berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh di Kab.Karangasem	16,07	Kawasan	203 M	-
3	Meningkatnya Sistem Drainase di kawasan permukiman perkotaan	328,8	M1	214 M	-
4	Persentase terpeliharanya ruang terbuka hijau	100	%	100	

4.4.3 Alokasi Anggaran Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.9
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Uraian	Induk	Perubahan	Realisasi
1	2		3
Anggaran Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1. Belanja Tidak Langsung	2.766.930.869,18	2.371.253.039,06	2.272.950.740,00
2. Belanja Langsung	26.705.150.550,00	1.840.362.755,00	1.763.545.289,00
a. Belanja Pegawai	1.041.750.400,00	449.775.000,00	445.160.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa	23.098.912.500,00	819.229.355,00	752.312.112,00
c. Belanja Modal	2.660.484.400,00	571.358.400,00	566.073.977,00

4.4.4 Dukungan Personil Urusan Perumahan Rakyat

Tabel 4.10
Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai DPKP Kab. Karangasem

No	Klasifikasi	Jumlah
1	2	3
A	Golongan (Jumlah)	22 orang
	Golongan IV	5 orang
	Golongan III	7 orang
	Golongan II	4 orang
	Golongan I	6 orang
B	Eselon (Jumlah)	13 orang
	Eselon V	0
	Eselon IV	5 orang
	Eselon III	4 orang
	Eselon II	1 orang
	Eselon I	0
C	Pendidikan (Jumlah)	22 orang
	S3	0
	S2	5 orang
	S1	7 orang
	Diploma	0 orang
	SLTA	4 orang
	SLTP	1 orang
	SD	5 orang

4.4.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi, urusan serta solusi pemecahannya. Permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1.	<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>a. Besarnya jumlah rumah yang tidak layak huni sebanyak 14.429 Unit</p> <p>b. Permukiman kumuh masih banyak yang perlu ditangani</p> <p>c. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk memelihara taman telajakan didepan rumahnya</p>	<p>a. Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni</p> <p>b. Tetap menjadi prioritas usulan tahunan.</p> <p>c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara Taman dan Pengembangan (<i>Clean and Green</i>) dikawasan Permukiman</p>

4.5 Urusan Ketentraman, Ketertinan Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar urusan Trantibumlinmas

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Karangasem terdiri atas :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan dasar tersebut diatas dilaksanakan oleh tiga perangkat daerah, yaitu :

Sub Trantibumlinmas dilaksanakan oleh Satpol PP

Sub Kebencanaan dilaksanakan oleh BPBD

Sub Kebakaran dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran

4.5.2 Target Pencapaian dan Realisasi SPM urusan Trantibumlinmas

Target pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karangasem belum mencapai target Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis di lapangan dan semoga di tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Di tahun 2020 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan amanat dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang ada.

Berikut tabel indikator kinerja SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, target dan realisasinya.

Tabel 4.11
Target dan Realisasi SPM Satpol PP Karangasem Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian Semester II	Keterangan
1	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
		a. Jumlah Pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan	46	100%
		b. Jumlah Pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang dilaporkan dan/atau dipantau	46	
		2. Cakupan Patroli siaga ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian Semester II	Keterangan
		a. Banyaknya kelompok patrol dikalikan 3 kali patrol dalam sehari	45	
		b. Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)	8	
3. Cakupan Rasio Pertugas Linmas				
		a. Jumlah satuan Linmas	2.353 Orang	
		b. Jumlah RT/Br. Dinas	529 Br.Dinas	

Tabel 4.12
Target dan Realisasi SPM BPBD Kab. Karangasem Tahun 2020

NO	PELAYANAN DASAR	JENIS PELAYANAN	2020	
			TARGET	REALISASI
Pelayanan informasi rawan bencana				
		Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	8	0
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	519253	0
		Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	519253	0
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	519253	519253

		Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	361	1
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	519253	519253
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	519253	519253
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	18	18
		Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	519253	519253
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	519253	519253
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	519253	519253

Di Tahun 2020 ini Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran sesuai dengan amanat dari Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dengan segala keterbatasan yang ada.

Target dan realisasi SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.13
Target dan Realisasi SPM
Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Karangasem Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Ket.
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	87,01%	

4.5.3 Alokasi Anggaran urusan Trantibumlinmas

Tabel 4.14
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Satpol PP
Kabupaten Karangasem Tahun 2020

NAMA KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	TERCAPAIAN
Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 79.958.200	90%
Pembinaan Pengendali dan Penegakan PERDA	Rp. 30.937.825	80%
Penindakan Pelanggaran PERDA	Rp.252.462.400	32%
Pembinaan SATLINMAS	-	-

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karangasem Tahun 2020 sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan Operasional di Lapangan. Namun Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terus diupayakan secara optimal

dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi. Alokasi anggaran dalam rangkaian pencapaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat akan terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.

Tabel 4.15
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
BPBD Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan	
				Pagu	Realisasi
1	3	4	5	6	7
1	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten	5.346.650,00	4.952.950,00
2		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten / Kota		
			Penyusunan Rencana Kontigensi		
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	3.285.520,00	2.941.020,00
			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana		

			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten / Kota		
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	223.552.389,00	202.430.273,00
3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit / Wabah Zoonosis Prioritas		
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	4.567.134.314,66	2.769.616.164,43
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten		

		Kota		
JUMLAH			4.799.318.873,6	2.979.940.407,43

Alokasi anggaran untuk kegiatan menunjang penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020, seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun 2020

No.	Program Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
I.	BELANJA LANGSUNG	1.031.471.906,60		
1.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.031.471.906,60		
	1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran	1.031.471.906,60	958.870.793,00	92,96

4.5.4 Dukungan Personil urusan Trantibumlinmas

a. Satpol PP

Adapun dukungan personil/pegawai aktif pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem terhitung 31 Desember 2020 adalah 170 orang, terdiri dari 92 orang PNS, dan 75 orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak).

Menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pasca Sarjana (S2) : 5 orang
2. Sarjana (S1) : 23 orang
3. Diploma (DIII) : - orang
4. SLTA : 137 orang

5. SMP : 1 orang

6. SD : 1 orang

Jumlah tenaga PNS menurut golongan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pegawai golongan IV : 5 orang

2. Pegawai golongan III : 27 orang

3. Pegawai golongan II : 59 orang

4. Pegawai golongan I : 2 orang

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan Personil/Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem didominasi oleh tingkat SLTA 82%, kemudian S1 sebanyak 13,7% dan S2 sebanyak 2,9%.

b. BPBD

Adapun dukungan personil/pegawai aktif pada BPBD Kabupaten Karangasem terhitung sampai 31 Desember 2020 adalah 89 orang, terdiri dari 16 orang PNS, dan 73 orang Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak).

c. Dinas Pemadam Kebakaran

Adapun dukungan personil/ pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem Tahun 2020 adalah 58 orang, terdiri dari 5 orang PNS, dan 53 orang Pegawai Non PNS (tenaga kontrak). Dari jumlah 58 orang tersebut, 51 orang diantaranya adalah petugas pemadam kebakaran.

4.5.5 Permasalahan dan Solusi urusan Trantibumlinmas

a. Satpol PP

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

Masih kurangnya personil PPNS

Solusi:

Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan Penindakan, Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran PERDA.

Untuk optimalisasi tugas satlimas sangat didukung oleh ketersediaan anggaran tetapi belum semua desa-kelurahan merancang kegiatan dan penugasan satlimas dalam penyusunan RKP DES –APBDes

Solusi :

Menghimbau pada kades / lurah untuk merancang kegiatan Satlimas dalam penyusunan RKP DES-APBDes

Perencanaan pengadaan sarana (Pakaian dan Atribut Satlimas) di kedesaan-kelurahan masih belum memadai.

Solusi :

Memberikan arahan dan memfasilitasi pengadaan sarana (Pakaian dan Atribut Satlimas) di kedesaan-kelurahan.

Perencanaan tugas dan fungsi di bidang masyarakat dalam situasi pandemic Covid-19 kegiatan di tiadakan (di nol kan) sehingga ini jelas menghambat proses kinerja linmas termasuk upaya pemberdayaan dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas linmas.

Solusi :

- Demi kelancaran kegiatan dalam situasi Covid-19 memohon agar kegiatan tidak di nol kan.
- Upaya pemerdayaan Satlinmas di Desa/Kelurahan dalam bentuk Pembinaan, Pemantuan dan Monev menggunakan dana dari bidang Sekretariat seperti BBM dan Mami.

b. BPBD

Adapun beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan BPBD Karangasem pada tahun 2020 adalah :

1. Keterbatasan personil baik untuk melaksanakan tugas administrasi maupun tugas personil;

2. Penghasilan personil BPBD masih perlu untuk ditingkatkan
 3. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, perawatan peralatan, dan pembelian peralatan
 4. Gedung kantor dan gedung logistik masih jauh dari layak
 5. Masih kurangnya alat peringatan dini dan alat penanggulangan bencana
 6. Diperlukan persediaan logistik bantuan langsung untuk korban bencana
 7. Diperlukan persediaan anggaran untuk bantuan korban bencana
- Sedangkan solusi yang dapat kami sampaikan adalah :

1. Penambahan personil BPDB Karangasem;
2. Peningkatan penghasilan personil BPBD Karangasem;
3. Pembuatan gedung dan logistik BPBD yang saat ini sudah kami ajukan ke Perencanaan 2022
4. Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan peralatan maupun dukungan lainnya

c. Dinas Pemadam Kebakaran

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran antara lain :

1. Sulitnya mencari data ke bidang yang menangani kebakaran.
2. Rendahnya kompetensi aparatur pemadam kebakaran.
Sampai saat ini dari 51 personil pemadam kebakaran baru memenuhi kualifikasi Pemadam 1 sebanyak 50 orang.
3. Terbatasnya anggaran untuk operasional pemadam kebakaran.
4. Terbatasnya aparatur pemadam kebakaran pada Pos Pemadam Kebakaran.
5. Sarana dan prasarana kurang memadai dan hampir seluruhnya berusia tua.

6. Status kepegawaian aparatur pemadam kebakaran seluruhnya pegawai Non ASN dengan gaji masih dibawah UMK.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dilakukan adalah :

1. Melakukan pendekatan personal kepada pengelola data kejadian kebakaran.
2. Selalu melakukan koordinasi ke Kemendagri Republik Indonesia agar memberikan prioritas kepada Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem untuk mengikuti Diklat apabila menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran.
3. Membuat telaahan staf agar diberikan tambahan dana dalam penyusunan anggaran.
4. Memaksimalkan personil yang ada dengan mengatur sift secara proporsional.
5. Mengusulkan anggaran untuk pengadaan infrastruktur seperti pembangunan pos pemadam sesuai dengan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemadam kebakaran dengan mengusulkan anggaran untuk menaikkan nafkah/gaji

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka jenis pelayanan dasar Bidang Sosial adalah :

- (1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.
- (2) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti

- (3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- (4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- (5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

4.6.2 Target dan Realisasi SPM Urusan Sosial

Di Tahun 2020 ini Dinas Sosial Kabupaten Karangasem berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dengan segala keterbatasan yang ada. Target dan realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.17

Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi	Ket.
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehbilitasi sosial diluar Panti	100%	97,85%	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi diluar panti	100%	92,18%	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehbilitasi sosial diluar panti	100%	93,10%	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga Negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial	100%	84,91%	

		diluar panti			
5	Perlindungan dan jaminan sosial padasaat dan setelah tanggap darurat	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	57,35%	

4.6.3 Alokasi Anggaran Urusan Sosial

Alokasi anggaran untuk kegiatan menunjang penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial adalah belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran Dinas Sosial
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2020

No.	Program Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Ket.
I.	BELANJA LANGSUNG	279.294.400,00	
1.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	89.078.700,00	
	1 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	89.078.700,00	
2.	Program Pembinaan Anak Terlantar	29.589.400,00	
	1 Pembinaan dan Penyantunan anak terlantar	29.589.400,00	
3.	Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia	19.592.300,00	
	1 Pembinaan dan Penyantunan lansia	19.592.300,00	
4.	Program Pembinaan Ek; Penyandang Penyakit Sosial (Ek; Narapidana, PJK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	12.654.100,00	
	1 Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)	12.654.100,00	
5.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	128.377.900,00	
	1 Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut Tanggap cepat darurat.	128.377.900,00	

4.6.4 Dukungan Personil Urusan Sosial

Adapun dukungan personil/ pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Dinas Sosial Kabupaten Karangasem Tahun 2020 adalah 25 orang, terdiri dari 10 orang PNS, dan 2 orang Pegawai Non PNS (tenaga kontrak).

4.6.5 Permasalahan dan Solusi Urusan Sosial

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial antara lain :

- (1) Belum terpenuhinya semua kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- (2) Sumber daya aparatur yang menangani pencapaian standar pelayanan Minimal bidang sosial belum memadai artinya jumlah personil yang menangani kegiatan pencapaian SPM tidak seimbang dengan jumlah yang harus mendapatkan pelayanan.
- (3) Rendahnya kompetensi aparatur yang menangani Pelayanan Dasar / standar pelayanan minimal bidang sosial.
- (4) Terbatasnya anggaran untuk kegiatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- (5) Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti Gedung /Kantor Dinas Sosial.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka solusi yang dilakukan adalah

- (1) Memberikan Pemenuhan kebutuhan dasar secara bertahap kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- (2) Melakukan koordinasi ke bidang lain untuk bisa membantu personil yang menangani pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- (3) Untuk mempercepat pelayanan terhadap pencapaian standar pelayanan minimal dengan mengoptimalkan oleh seluruh Tenaga Administrasi (Kontrak) yang ada di Dinas Sosial

- (4) Mengajukan telaahan staf ke TAPD agar diberikan tambahan anggaran untuk kegiatan yang mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bidang sosial.
- (5) Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada sehingga kegiatan yang mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bisa berjalan normal.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Bidang Urusan Pendidikan

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan pembangunan dan pelayanan sektor Pendidikan di Kabupaten Karangasem, disusunlah Program dan Kegiatan yang secara rutin setiap tahun anggaran yang sumber dananya baik dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dananya dari APBN.

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem menetapkan beberapa kriteria sebagai landasan pertimbangan, antara lain :

1. Memperhatikan Tupoksi dari masing-masing bidang;
2. Memperhatikan program Pemerintah Kabupaten Karangasem, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
3. Mempertimbangkan hasil evaluasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, saat ini dan akan datang;
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi, baik Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga maupun Pemerintah Kabupaten Karangasem

Berikut adalah Program Kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem :

Tabel 4.19

**Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	DUKUNGAN PERSONIL
I	Program Pendidikan PAUD					
A	Pendidikan Anak Usia Dini					
1	Pembangunan Gedung Sekolah PAUD	Terbangunnya gedung sekolah sebanyak 5 TK Negeri	491.053.000,00	474.455.321,00	96,6	50 org
2	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Terpenuhinya kebutuhan sanitary dan air bersih untuk 2 TK Negeri	136.133.000,00	132.733.260,00	97,5	50 org
3	Pengadaan buku buku dan alat tulis siswa PAUD	Terpenuhinya kebutuhan buku untuk 5 TK Negeri	55.230.000,00	53.650.000,00	97,1	50 org
4	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Terpenuhinya kebutuhan alat permainan edukatif untuk 8 TK negeri	427.255.000,00	418.590.500,00	98,0	50 org

5	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Pemanfaatan dana DAK BOP PAUD untuk 8 TK Negeri	486.573.000,00	337.451.979,00	69,4	50 org
6	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Pemberian insentif untuk 450 orang	3.394.800.000,00	3.380.850.000,00	99,6	51 org
7	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD	Terselenggaranya kurikulum K13 untuk 160 orang	57.965.000,00	33.050.000,00	57,0	450 org
8	Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya pembinaan pendidikan paud dan lembaga paud sebanyak 3 lembaga	22.000.000	0	0,0	2709 org
9	Monitoring dan evaluasi PAUD	Terselenggaranya monitoring di lembaga PAUD sebanyak 3 lembaga	0	0		175 org
10	Lomba Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terselenggaranya Lomba kreatifitas pendidikan anak usia dini target 7.794 orang	0	0		100 org
B	Pendidikan Dasar					
1	Pembangunan Perpustakaan sekolah	Terealisasinya kegiatan pembangunan perpustakaan sebanyak 11 sekolah	1.511.310.000,00	1.292.122.740,00	85,5	100 org
2	Penambahan ruang kelas sekolah	Terlaksananya Penambahan ruang kelas di sekolah dasar sebanyak 4 sekolah	1.037.200.000,00	1.023.773.571,00	98,7	100 org
3	Pemeliharaan rutin / berkala bangunan sekolah SD	Terealisasinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala bangunan SD sebanyak 68 sekolah	2.444.095.435,00	2.327.479.040,00	95,2	100 org
4	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB serta Pesantren Salafiyah dan Satuan	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah untuk 276 Sekolah Dasar	37.095.307.294,60	24.790.300.903,93	66,8	368 org

5	Pembinaan Minat, bakat dan kreativitas siswa SD	Meningkatnya prestasi akademik dan non akademik siswa sebanyak 26 orang ke tingkat provinsi	23.000.000,00	23.000.000,00	100,0	500 org
6	Ujian Akhir Sekolah SMP/MTs	Terselenggaranya ujian akhir sekolah SMP/MTs (siswa SMP Kelas IX dari 51 sekolah)	0	0		900 org
7	Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB	Terealisasinya Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SDLB sebanyak 7.384 siswa	150.770.000,00	148.570.000,00	98,5	175 org
8	lomba Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa SMP	Terselenggaranya lomba minat bakat, dan kreatifitas siswa tingkat SMPN/MTs/Satap Negeri/Swasta (52 Sekolah SMP)	6.399.850,00	6.388.850,00	99,8	150 org
9	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP	Tercapainya pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP (smp Negeri 2 sidemen)	259.005.500,00	256.304.540,00	99,0	350 org
10	Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah SD	Terealisasinya bantuan rehabilitasi sedang/berat SD sebanyak 53 sekolah	3.026.013.440,00	2.880.259.923,00	95,2	350 org
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SD	Terealisasinya kegiatan pengadaan alat praktik peraga sebanyak 9 sekolah	828.829.800,00	761.638.500,00	91,9	
11	Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah SMP	Terlaksananya kegiatan rehabilitasi ruang kelas sekolah SMP (7 Sekolah)	576.380.000	134.050.000	23,3	132 org
12	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri / Swasta, SMP Terbuka / SMPN Satu Atap	Tersedianya Bantuan Operasional Sekolah SMP selama 12 bulan	22.047.386.042,74	13.548.146.766,31	61,5	54 org

13	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SMP	Terselenggaranya pelatihan penyusunan kurikulum (52 sekolah SMP)	35.000.000,00	34.896.500,00	99,7	100 org
14	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Tercapainya pelatihan penyusunan kurikulum kepada 40 guru SD	91.830.000,00	85.808.380,00	93,4	100 org
15	Pemberian Beasiswa untuk SD	Terealisasinya pemberian Beasiswa kepada 15.504 orang siswa sekolah dasar	4.569.516.897,00	4.518.591.630,00	98,9	465 org
16	Beasiswa SMP	Tersedianya beasiswa miskin atau prestasi bagi siswa SMP (3134 siswa)	1.645.000.050,00	1.606.099.050,00	97,6	465 org
17	Penyiapan Akreditasi SMP	Terselenggaranya persiapan akreditasi SMP (15 Sekolah)	2.456.000,00	2.453.000,00	99,9	75 org
18	Penambahan ruang kelas sekolah SMP	Tercapainya penambahan ruang kelas baru (SMP Negeri 6 Abang)	100.770.000,00	99.156.420,00	98,4	100 org
19	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah SMP	Tercapainya pemeliharaan rutin/ berkala bangunan sekolah (15 sekolah)	1.525.742.200,00	1.498.075.495,50	98,2	100 org
20	Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB	Terealisasinya penyediaan buku pelajaran untuk SD / MI sebanyak 22 sekolah	1.123.740.150,00	1.101.239.340,00	98,0	50 org
C Pendidikan Kesetaraan						
1	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	Berkurangnya siswa putus sekolah target 246 orang	45.220.000,00	43.134.000,00	95,4	100 org
2	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Berkurangnya siswa putus sekolah target 15 lembaga	136.620.000,00	127.074.000,00	93,0	100 org

3	Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) SKB	Terciptanya kegiatan pendidikan luar sekolah target 1 lembaga	2.425.958.000,00	1.718.633.482,00	70,8	50 org
---	---	---	------------------	------------------	------	--------

4.7.2 Bidang Urusan Kesehatan

Program dan Kegiatan serta anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian SPM bidang kesehatan tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.20
Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2020

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan		429.729.680,00	429.729.680,00
		Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	429.729.680,00	429.729.680,00
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		2.235.770.000,00	454.425.000,00
		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Manggis I	81.945.000,00	41.675.000,00
		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Manggis II	98.475.000,00	20.225.000,00
		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Rendang	227.550.000,00	84.000.000,00
		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Sidemen	174.800.000,00	57.775.000,00
		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Selat	200.300.000,00	54.950.000,00
		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Bebandem	166.525.000,00	47.425.000,00

		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Karangasem I	563.875.000,00	30.650.000,00
		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Karangasem II	200.800.000,00	24.325.000,00
		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Abang I	191.375.000,00	49.125.000,00
		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Abang II	92.110.000,00	21.225.000,00
		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Kubu I	82.050.000,00	19.650.000,00
		Peningkatan Upaya Kesehatan Puskesmas Kubu II	155.965.000,00	3.400.000,00
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		17.130.000,00	-
		Penyuluhan Masyarakat Melalui Sekolah	17.130.000,00	-
4	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		760.508.774,00	576.618.577,00
		Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	760.508.774,00	576.618.577,00
5	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan lansia		95.790.000,00	67.040.000,00
		Pelayanan pemeliharaan kesehatan	95.790.000,00	67.040.000,00
6	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		1.525.927.000,00	490.590.000,00

		Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.525.927.000,00	490.590.000,00
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak menular		85.912.250,00	33.681.300,00
		Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Deteksi dini penyakit tidak menular	85.912.250,00	33.681.300,00
Jumlah			5.150.767.704,00	2.052.084.557,00

4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, dilengkapi dengan anggaran serta realisasinya.

Tabel 4.21
Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran/ Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Realisasi Anggaran		
				Target APBD (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (KK)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.863.053.314,00	1.856.988.386,00	99,67

			Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.696.055.826,00	1.693.366.626	99,84
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (Jiwa)	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/kota	166.997.488,00	163.621.760	97,98

4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas melaksanakan otonomi daerah urusan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, pengembangan ruang terbuka hijau dan pertamanan dengan tujuan mewujudkan Karangasem yang bersih, dan teduh.

Lingkungan bersih dan teduh (clean and green) telah menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara nasional sehingga pengelolaannya dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta berubahnya perilaku masyarakat menjadi peduli lingkungan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DPKP Kabupaten Karangasem menentukan **Visi** “Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Ramah Lingkungan, Merata, Berkualitas, dan Berkelanjutan Berdasarkan Tri Hita Karana “. Untuk dapat mengidentifikasi arah dan kebijakan dalam mewujudkan **Visi** maka DPKP Kabupaten Karangasem mengemban **Misi** yaitu :

1. Meningkatkan ketersediaan perumahan
2. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
3. Mempertahankan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang bersih dan teduh (*Clean and Green*)

Visi diatas merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai dimasa depan melalui program dan kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar pelaku kepentingan yang terkait langsung maupun tidak dalam pengelolaan kebersihan/persampahan dan pengembangan kinerja pengelolaan ruang terbuka hijau (*Clean and Green*). Sasaran program dan kegiatan sampai tahun 2020 masih terkonsentrasi pada pelayanan kebersihan dan pertamanan (*Clean and Green*) di Kawasan Permukiman. Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karangasem, implementasi pembangunan bidang pelayanan Imfrastruktur tahun anggaran 2020 dilaksanakan melalui 9 program dan 28 kegiatan yaitu :

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1 Penyediaan jasa surat menyurat
- 2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3 Penyediaan alat tulis kantor
- 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
- 6 kantor
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 8 Penyediaan makanan dan minuman
- 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 10 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis/
Keamanan
- 11 Penyelenggaraan Biaya Canang, Bebanten Piodalan
- 12 Penataan Dekorasi dan Kegiatan hari hari nasional
- 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

IV. Program Pengembangan Perumahan

- 1 Monitoring dan evaluasi program perumahan Kabupaten Karangasem
- 2 Pendataan dan pemetaan rumah
- 3 Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni
- 4 Pendampingan Pembangunan Perumahan Masyarakat berpenghasilan Rendah

V. Program Lingkungan Sehat Perumahan

- 1 Perbaikan lingkungan permukiman
- 2 Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
- 3 Penyuluhan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Sehat Perumahan

VI. Program Pengembangan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

- 1 Pengembangan Saluran Drainase

VII. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- 1 Pemantauan Pengembangan Perumahan

VIII. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

- 1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan Perumahan

IX. Penataan Halaman dan Taman Kantor

- 1 Penataan Halaman dan Taman Kantor

4.7.5 Bidang Urusan Trantibumlinmas

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan pembinaan Pencegahan Pelanggaran Ketertiban Umum di tempat usaha. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- a. Mengawasi dan memberikan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk melengkapi usaha yang dijalani dengan IMB, SITU, SIUP dan ijin lingkungan serta melengkapi data identitas pramusaji.
- b. Mencegah terjadinya Gangguan Ketertiban Umum di tempat usaha berupa prostitusi, pekerja di bawah umur, miras dan narkoba.

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan:

- a. Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban, Kamtramtibmas

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengawasi dan menjamin kegiatan pemerintahan maupun kegiatan masyarakat agar berlangsung aman dan kondusif.
- Melakukan Penertiban atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

- b. Penyelidikan Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mengawasi dan memantau pelaksanaan Peraturan Daerah
- Melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan atas indikasi pelanggaran Peraturan Daerah
- Memberikan informasi dini atas gejolak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan mobilisasi dan pendataan Satuan Perlindungan Masyarakat. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Memperkuat fungsi perlindungan masyarakat di desa-desa pada tiap Kecamatan.

- b. Menambah jumlah anggota Linmas khususnya di daerah yang rawan bencana dan konflik.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif.

2. BPBD

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada BPBD Karangasem dilaksanakan dengan 4 (fungsi) yakni :

- Kegiatan Kesekretariatan
- Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Kegiatan Kedaruratan dan Logistik
- Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi

Adapun penjelasan mengenai pencapaian program dan kegiatan berdasarkan 4 (empat) fungsi tersebut sebagai berikut :

B.1 Kegiatan Kesekretariatan

Dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan, BPBD karangasem memiliki kegiatan :

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang didanai dengan Rp. 111.427.875,00 namun hanya terealisasi 79,15% disebabkan karena sebagian merupakan dana yang disiapkan untuk pelaksanaan penanggulangan Covid 19 di Kabupaten Karangasem. Penyerapan tersebut disebabkan karena kondisi kendaraan masih cukup baik dan masih layak pakai
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD didanai dengan anggaran Rp. 3.703.000,00 dilaksanakan untuk penyusunan LKPJ, LPPD, LAKIP dan Laporan Keuangan, anggaran ini tentunya masih sangat minim, sehingga hanya dimaksimalkan untuk pembelian alat tulis kantor saja, penyerapan anggaran untuk kegiatan ini mencapai 91.30%
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 2.000.000,- dengan penyerapan anggaran 86.70% merupakan kegiatan rutin yang

dilaksanakan sekretariat, sisa anggaran mengingat harga di DPA dengan harga belanja terdapat perbedaan (lebih murah pada belanja), namun tentunya dengan anggaran tersebut masih jauh dari kebutuhan riil pada sekretariat BPBD

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik anggaran kegiatan ini Rp. 61.214.037,00 dengan penyerapan 93,53% merupakan kegiatan untuk pembayaran kebutuhan air, listrik, telpon, dan internet pada Kantor BPBD Kabupaten Karangasem
- Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan anggaran Rp. 11.911.950,00 dengan penyerapan 86,97% merupakan kegiatan untuk pemenuhan ATK pada kantor BPBD Karangasem, penyerapan tidak sampai dengan 100% mengingat sebagian anggaran diperuntukkan untuk ATK Sekretariat Satgas Covid 19 dan pada saat SPJ satuan harga belanja lebih murah dari satuan harga pada DPA
- Penyediaan Makanan dan Minuman dengan anggaran Rp. 9.209.137,00 dengan penyerapan 98,40% merupakan kegiatan untuk penyiapan makanan dan minuman rapat pada BPBD Karangasem, sisa anggaran terjadi karena SPJ satuan harga belanja lebih murah dari satuan harga pada DPA
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah dengan anggaran Rp. 67.588.500,00 dan terealisasi 90,65%
- Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Keamanan dengan anggaran 1.287.600.000,00 telah terealisasi 99,94% untuk Pembayaran Upah dan BPJS Ketenagakerjaan 73 Tenaga Kontrak.
- Penyediaan Biaya canang, Bebanten Piodalan dengan anggaran Rp. 29.920.000,00 telah terealisasi 100% untuk biaya odalan di Kabupaten Karangasem
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah pada perubahan anggaran menjadi 0% karena dilakukan refocusing untuk pembiayaan penanganan Covid 19

B.2. Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Untuk Tahun 2020 pada Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Karangasem melaksanakan 2 (dua) Kegiatan sesuai jumlah anggaran yang tersedia pada DPA SKPD.

Adapun bentuk dari kegiatan ini pertama adalah Mitigasi Bencana berupa :

- i. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat maupun aparat pemerintah meliputi :
 - Cuaca Umum Bali - Kab.Karangasem
 - Cuaca Tempat-tempat Wisata di Bali
 - Cuaca Kabupaten se Bali
 - Cuaca tempat penyeberangan di Bali
 - Citra Satelit Indonesia
 - Peta Ketinggian Gelombang Laut
 - Peta Potensi Kebakaran Hutan
 - Info Gempabumi dan Tsunami
 - Peringatan Dini Cuaca Ekstrim di Bali
- ii. Untuk memberikan peringatan bahaya tanah longsor di wilayah Banjar Dinas Segu, Desa Bunutan Kecamatan Abang yang terpasang alat Landslide Early Warning System (LEWS)
- iii. Untuk membentuk Petugas Peringatan Dini yang mampu mengoperasikan alat-alat Peringatan Dini.
- iv. Terbentuknya komunikasi yang intens antar kecamatan yang memberikan laporan mengenai cuaca dan informasi bencana lainnya di sekitar kecamatan masing-masing.
- v. Tersampainya informasi peringatan dini sampai ke tingkat masyarakat desa.

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 223.552.389,00 dengan penyerapan anggaran 90,55%. Namun dengan anggaran tersebut tentunya belum dapat merealisasikan semua maksud dan

tujuan kegiatan, sehingga BPBD Karangasem melakukan beberapa pendekatan dan kerja sama sehingga saat ini BPBD Karangasem dapat memiliki alat peringatan dini seperti :

- Bekerjasama dengan IOF dan Mitraelkom untuk mendapatkan bantuan alat LEWS yang telah terpasang di Banjar Dinas Segu
- Bekerjasama dengan BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) untuk pemasangan alat WRS 2 Way dan WRS New Generation.
- Bekerjasama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) untuk pemasangan sensor Tsunami di Banjar Dinas Kusambi, Desa Bunutan Kecamatan Abang.
- Bekerja sama dengan PT. Asanka untuk pemasangan rambu peringatan zona berbahaya 2 km dari Puncak Gunung Agung.

Kegiatan kedua pada fungsi ini adalah Orientasi Manajemen Penanggulangan Bencana, namun mengingat refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19, yang semula kegiatan ini berjumlah Rp. 92.355.400,00 menjadi Rp. 3.285.520,00. Adapun pertimbangan dari refocusing anggaran pada kegiatan ini adalah karena untuk menjaga protokol kesehatan.

B.3. Kegiatan Kedaruratan dan Logistik

Pada kegiatan kegiatan Kedaruratan dan Logistik tahun 2020 BPBD juga hanya melaksanakan 1 (satu) kegiatan saja yakni POS Emergency Service Respont di Kabupaten Karangasem dengan anggaran sebesar Rp. 4.567.134.314,66 dengan realisasi anggaran sebesar 60,64%.

Adapun penyerapan anggaran hanya 60,64% disebabkan karena pada kegiatan ini dititipkan anggaran pembayaran klaim jasa kesehatan pengungsi Gunung Agung, dimana anggaranya berasal dari dana sumbangan masyarakat.

Pada pembayaran hutang klaim jasa kesehatan kepada 14 (empat belas) Rumah Sakit ini sebelumnya dilaksanakan verifikasi terhadap permohonan Rumah Sakit sehingga sisa dana sumbangan masyarakat tersebut dikembalikan ke Kas Daerah dan akan dipergunakan kembali untuk membayar klaim jasa kesehatan pengungsi Gunung Agung tahap berikutnya.

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Memberikan pelayanan pada masyarakat yang terdampak bencana dalam penyelamatan dan evakuasinya
2. Memberikan respon terhadap kejadian yang dapat mengganggu aktivitas, kehidupan dan penghidupan masyarakat.
3. Melaksanakan kaji cepat kejadian bencana

Beberapa bentuk kegiatan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah :

1. penanganan pohon tumbang yang menimpa akses masyarakat, rumah, sarana ibadah maupun sarana lainnya
2. Pencarian, pertolongan dan evakuasi terhadap warga yang mengalami kejadian di laut maupun gunung yang bersinergi dalam tim SAR Gabungan.
3. Penanganan dalam upaya pencegahan Covid-19 melalui kegiatan disinfeksi dan evakuasi/pemakaman jenazah dampak covid-19
4. Penanganan kejadian bencana alam lainnya seperti Erupsi Gunung Agung, kebakaran hutan, banjir dan longsor.
5. Pemberian bantuan langsung berupa logistik kepada warga terdampak.

Dengan keterbatasan anggaran BPBD Karangasem berupaya melaksanakan pelayanan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Perbekel, Kepala Dusun atau pejabat yang mewilayahi untuk menghimbau, memberikan pemahaman dan mengajak warga disekitar lokasi kejadian agar aktif dalam upaya penanggulangan bencana.

2. Memberikan apresiasi berupa ucapan terima kasih yang disampaikan melalui media sosial yang dimiliki BPBD Kabupaten Karangasem atas peran serta masyarakat maupun dunia usaha dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana.
3. Mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki sarana yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana seperti dengan Dinas PUPR Kabupaten, Provinsi dan Pusat, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pencarian dan Pertolongan, Palang Merah Indonesia, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial dan lainnya.
4. Mengupayakan pengembangan kapasitas personil dengan mengikutsertakan dalam pelatihan – pelatihan mandiri yang bekerjasama dengan Instansi lain seperti Dinas Nakertrans, Badan Pencarian dan Pertolongan dan Dinas Pemadam Kebakaran.
5. Melakukan upaya mandiri dalam pembuatan sarana penunjang pergudangan seperti Rak penyimpanan logistik.
6. Melaksanakan permohonan bantuan kepada pihak ketiga untuk mendapatkan bantuan APD dalam penanggulangan Covid - 19

B.4. Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diakibatkan oleh kejadian bencana.

Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Maksud dari kegiatan adalah memfasilitasi masyarakat dalam mengajukan proposal permohonan santunan dan bantuan sosial yang ditujukan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali. Santunan dan bantuan sosial berupa uang sebagai stimulan untuk membantu pemulihan Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum yang mengalami kerusakan akibat bencana.

- Tujuan dari kegiatan adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana, kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya bencana.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 23.525.800,00 dari semula sebesar Rp. 56.400.000,00 pengurangan anggaran ini disebabkan karena refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid – 19 di Kabupaten Karangasem, dengan penyerapan anggaran sebesar 92,64%.

Anggaran tersebut selama ini hanya dapat digunakan untuk operasional tim verifikasi rehabilitasi dan rekontruksi, sedangkan bantuan yang diserahkan kepada masyarakat merupakan anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi, sehingga kedepannya diharapkan Pemkab. Karangasem juga menyiapkan anggaran bantuan kepada korban-korban bencana di Kabupaten Karangasem.

Selain pelaksanaan 4 (empat) fungsi tersebut, BPBD Karangasem juga mendapat tugas tambahan dalam penanggulangan Covid – 19 di Kabupaten Karangasem yang aggarannya berasal dari refocusing anggaran 2020 dan dan BTT, yakni seperti :

1. Melaksanakan tugas kesekretariatan Satgas Penanggulangan Covid – 19 Kabupaten Karangasem
2. Melaksanakan tugas sebagai tim data Satgas Penanggulangan Covid – 19 Kabupaten Karangasem
3. Sebagai tim penanganan kedatangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
4. Sebagai tim desinfeksi Kabupaten Karangasem
5. Sebagai tim evakuasi / pemakaman jenazah yang diduga / konfirmasi Covid - 19 Kabupaten Karangasem
6. Sebagai OPD yang melaksanakan rekomendasi pencairan BTT pada OPD yang melaksanakan tugas penanggulangan Covid-19

3. Dinas Pemadam Kebakaran

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, anggaran serta realisasinya dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 4.22
Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi
Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2020

No.	Program Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	BELANJA LANGSUNG	1.031.471.906,60	958.870.793,00	92,96
1.	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.031.471.906,60	958.870.793,00	92,96
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran	1.031.471.906,60	958.870.793,00	92,96

4.7.6 Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM, anggaran serta realisasinya dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 4.23
Program, Kegiatan, Anggaran dan Realisasi
Dinas Sosial Kabupaten Karangasem
Tahun Anggaran 2020

No.	Program Kegiatan	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
I.	BELANJA LANGSUNG	279.294.400,00	217.385.085,00	85,08
1.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	89.078.700,00	87.164.610,00	97,85
1	<i>Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas</i>	<i>89.078.700,00</i>	<i>87.164.610,00</i>	<i>97,85</i>

2.	Program Pembinaan Anak Terlantar	29.589.400,00	27.274.650,00	92,18
	<i>1 Pembinaan dan Penyantunan anak terlantar</i>	<i>29.589.400,00</i>	<i>27.274.650,00</i>	<i>92,18</i>
3.	Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia	19.592.300,00	18.576.050,00	93,10
	<i>1 Pembinaan dan Penyantunan lansia</i>	<i>19.592.300,00</i>	<i>18.576.050,00</i>	<i>93,10</i>
4.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PJK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	12.654.100,00	10.744.100,00	84,91
	<i>1 Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)</i>	<i>12.654.100,00</i>	<i>10.744.100,00</i>	<i>84,91</i>
5.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	128.377.900,00	73.625.675,00	57,35
	<i>1 Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut Tanggap cepat darurat.</i>	<i>128.377.900,00</i>	<i>73.625.675,00</i>	<i>57,35</i>



BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bagian-bagian awal laporan ini, secara umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem pada tahun anggaran 2020 sudah dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari capaian program dan kegiatan dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah baik urusan wajib (24 urusan dan 4 bidang urusan penunjang pemerintahan) maupun urusan pilihan (8 urusan) yang terlihat dari capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Kunci urusan pemerintahan, capaian kinerja makro, capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, dan capaian penerapan standar pelayanan minimal.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melanda sepanjang tahun 2020, penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karangasem menyesuaikan dengan kondisi tersebut, dengan perubahan penjabaran APBD sebanyak sembilan kali juga merupakan salah satu strategi guna menangani pandemi Covid-19 dan menyiapkan jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat.

Dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah disusun tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan dan tantangan, namun itu semua bisa dilalui dengan upaya dan kerja keras seluruh jajaran aparat Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan dukungan masyarakat dan arahan dari Bupati/Wakil Bupati sebagai nahkoda pemerintahan. Berbagai solusi dan upaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan, pada akhirnya bermuara pada harapan terwujudnya masyarakat Karangasem yang sejahtera.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 disampaikan agar dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun-tahun mendatang. Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat menyajikan sebuah data

yang bisa dimanfaatkan sebagai alat ukur kinerja Pemerintahan Daerah serta sebagai referensi oleh berbagai stakeholder yang memerlukan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Karangasem.